

Penguatan Simpul Moderasi Beragama di Kampus Islam

UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Sunan Kalijaga



CONVEY REPORT



Penguatan Simpul Moderasi Beragama di Kampus Islam

UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Sunan Kalijaga



**CONVEY Indonesia
PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia
2020-2021**

CONVEY REPORT

Penguatan Simpul Moderasi Beragama di Kampus Islam

UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Sunan Kalijaga

Vol. 4 No. 3 Tahun 2021

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Tim Penulis dan Peneliti:

Arief Subhan (Koordinator), Ashma Nur Afifah, Annas Jiwa Pratama,

Muhammad Akhyar, Iif Fikriyati Ihsani

Desain Cover & Layout:

Nabilla Aliefiani Jayanti, Astrid Arastazia

ISBN:

9772723807006

Penerbit:

PPIM UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Ciputat Timur 15419

Kota Tangerang Selatan Banten 15419 INDONESIA

Telp. (62 21) 749-9272

Email: ppim@uinjkt.ac.id

Ucapan Terima Kasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Terima kasih yang tak terhingga tim peneliti ucapkan terutama pada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, ilmu dan kesehatan sehingga tim peneliti mampu menyelesaikan riset ini sampai akhir. Terima kasih juga kami sampaikan pada sejumlah pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

- Pihak PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Convey, atas dukungan dan kesempatan melakukan riset intervensi ini.
- Pihak Kementerian Agama, Ketua Pokja Moderasi Beragama, Bapak Oman Fathurrahman yang memperkaya moderasi beragama di penelitian ini dari awal serta Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag atas dukungan yang diberikan dalam memperkaya hasil penelitian.
- Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. (Rektor UIN Sunan Gunung Djati) dan Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A (Rektor UIN Sunan Kalijaga) beserta jajaran pejabat di ketiga UIN tersebut atas dukungan baik dari segi konten maupun teknis yang diberikan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai
- Pihak tim peneliti PTKIN, Pak Muchlas Noor Hidayat (Amay), Pak Wawan Hernawan dan Pak Achmad Zainal Arifin yang terlepas dari kondisi pandemi, tetap kondusif berkomunikasi dalam memastikan proses penelitian berjalan sesuai dengan standar.

- Pihak enumerator dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang atas kegigihannya dalam mencapai target partisipan survei dan FGD yang diinginkan.
- Tim penginput data dan petugas verbatim, atas ketekunan dan kesabaran menginput dan memproses data yang sangat berlimpah ini.
- Pihak Dirjen Pendis, PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian (BAPPENAS), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) dan Balitbang Kementerian Agama atas masukan yang berharga dan diskusi-diskusinya

Terakhir, tim peneliti memohon maaf jika dalam seluruh proses pelaksanaan riset ini terdapat kesalahan yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun. Semoga hasil riset ini dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak untuk kebaikan sebanyak mungkin orang.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Daftar isi.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	1
BAB I Pendahuluan	14
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	14
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	20
1.3 Tujuan Kegiatan	20
1.4 Program yang ditawarkan	21
1.5 Lokasi Penelitian	21
BAB II Landasan Teoritis	22
2.1 Ekstremisme Kekerasan	22
2.2 Moderasi Beragama.....	26
2.3 Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi...	42
BAB III Studi Baseline	46
3.1 Pelaksanaan Persiapan Penelitian dan Instrumen	
Alat Ukur.....	46
3.2 Uji Keterbacaan.....	50
3.3 Metode Penelitian Baseline	67
3.3.1 Metode Kuantitatif	68
3.3.2. Metode Kualitatif.....	70
3.4 Pelaksanaan Penelitian	74
3.4.1 Pengambilan data kuantitatif.....	74
3.4.2 Pengambilan Data Kualitatif.....	75
3.5 Analisis data	77
3.5.1 Analisis Data Kuantitatif	77
3.5.2 Analisis Data Kualitatif.....	78

3.6 Hasil Penelitian Baseline	79
3.6.1 Hasil Survei	79
3.6.2 Hasil FGD.....	85
3.7 Pembuatan Modul Pelatihan.....	114
BAB IV Capacity Building dan Technical Assistance	117
4.1 Capacity Building	117
4.2 Technical Assistance	126
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi.....	135
5.1 Kesimpulan.....	135
5.2 Rekomendasi.....	138
Referensi.....	140

Ringkasan Eksekutif

Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim

Latar Belakang

Moderasi beragama merupakan konsep yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam konteks beragama di Indonesia (Faiqah & Fransiska, 2018). Dalam satu dekade belakangan, moderasi beragama muncul dan semakin menguat sebagai antitesis terhadap perilaku keagamaan yang ekstrem dan radikal (Fahri & Zainuri, 2019, Faiqah & Fransiska, 2018). Ekstrem di sini dapat diartikan sebagai ketat dan kaku dalam memahami teks keagamaan dan memaksakan sudut pandang tertentu, bahkan jika diperlukan dipergunakan kekerasan untuk mewujudkan sudut pandang tersebut (Faiqah & Fransiska, 2018). Moderasi beragama sendiri, sebagaimana dijelaskan buku *Moderasi Beragama* (Litbang Kemenag, 2019)—yang pada tingkat tertentu dapat disebut sebagai “buku referensi utama” dalam konteks Indonesia belakangan karena sudah mengkompilasi pandangan para sarjana Muslim Indonesia—merupakan modus beragama yang berpihak pada “jalan tengah” dalam bersikap. Untuk kasus Islam, modus tersebut dikenal sebagai “*wasathiyah*”—literal: “jalan tengah”—yang memiliki akar dalam kitab suci al-Qur’an. Sedangkan untuk agama-agama lain akan menyesuaikan dengan doktrin dalam kitab suci masing-masing agama. Kementerian Agama memandang bahwa moderasi beragama merupakan terobosan dalam memperkuat kerukunan dan keharmoni-

nisan antar umat beragama yang tengah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks.

Kementerian Agama menurunkan moderasi beragama ke dalam empat (4) indikator yaitu 1) Komitmen Kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti-Kekerasan dan 4) Akomodasi terhadap budaya lokal (Moderasi Beragama, 2019). Sebagai kementerian yang secara langsung bekerja dalam bidang manajemen umat beragama di Indonesia, Kementerian Agama menjadi *leading sector* dalam mengembangkan konsep, implementasi, dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama ketika konsep moderasi beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dalam posisi sebagai *leading sector* tersebut, Kementerian Agama telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya terdapat butir-butir implementasi moderasi beragama dalam setiap program kerja yang dirancangnya; membentuk Satuan Tugas (Satgas) implementasi moderasi beragama; dan lebih dari itu adalah melibatkan PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri) untuk melakukan pengkajian, mengembangkan metode implementasi, sekaligus menjadi agen implementasi moderasi beragama.

Lebih lanjut, agenda moderasi beragama diamanatkan ke dalam lingkungan PTKIN secara kelembagaan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Nomor B- 3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama). Melalui Edaran Dirjen Pendis tersebut, pimpinan PTKIN diminta mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama di kampus masing-masing. Rumah Moderasi Beragama ini dimaksudkan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, dan penguatan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN. Melalui kebijakan tersebut, Kemenag tidak hanya melibatkan kampus, yang berisi kalangan terpelajar, untuk terlibat, tetapi juga menjadikannya sebagai garda terdepan dalam mengawal, mengembangkan, dan mengimplementasikan Moderasi Beragama.

Agenda moderasi beragama ini ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi Islam dengan mendirikan Rumah Moderasi Beragama, yang sampai Februari 2021 berjumlah 38 lembaga. Meskipun demikian, pada praktiknya sebagian besar institusi rumah moderasi beragama tersebut—sebagaimana layaknya lembaga baru—masih mencari bentuk dan peta jalan yang strategis dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan sivitas akademika (FGD, 2020). Sejumlah penelitian dengan

moderasi beragama sebagai subjek juga mengalami peningkatan, tentu dengan berbagai variasi dan konteksnya, di kalangan sivitas akademika Perguruan Tinggi Islam (contoh: Mahyuddin, Pikhahulan, dan Fajar, 2020; Winata, Sudrajat, Yuniarsih & Zaqiah, 2020).

Sebagai lembaga yang masih muda, mayoritas Rumah Moderasi Beragama masih mencari bentuk dan model yang akan ditempuh, baik pada dimensi kelembagaan maupun dimensi program, terutama dalam merumuskan program-program *mainstreaming* moderasi beragama, yang tepat sasaran. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, belum ada model implementasi moderasi beragama di PTKIN terutama yang dipergunakan sebagai bentuk ketahanan (*resilience*) dari ekstremisme-kekerasan (*VE/Violent-Extremism*). Kedua, implementasi moderasi beragama belum diadaptasi dengan konteks budaya, sistem, dan tantangan spesifik yang dihadapi setiap PTKIN. Ketiga, kapasitas institusi--dalam hal ini institusi Rumah Moderasi Beragama-- masih belum mendapatkan perhatian khusus dalam mengimplementasikan moderasi beragama di PTKIN.

Berdasarkan alasan tersebut, kegiatan penelitian dan penguatan institusi ini dilakukan dengan fokus pada konsep moderasi beragama, penguatan Rumah Moderasi Beragama, dengan menawarkan diagnosis terhadap realitas sivitas akademika melalui penelitian, dan langkah-langkah strategis serta modul yang dapat diterapkan untuk penguatan moderasi beragama. Pada aspek penelitian, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kondisi moderasi beragama di PTKIN serta mengidentifikasi hal-hal dalam moderasi beragama apa yang dapat menjadi fokus *capacity building* dalam meningkatkan moderasi beragama. Dengan tujuan sebagai *pilot project*, kegiatan ini hanya berlangsung di tiga PTKIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketiga PTKIN tersebut dipilih secara sengaja dengan argumen yang bersifat subjektif bahwa ketiganya dapat dijadikan sebagai model bagi PTKIN lain dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan pada aspek penguatan kapasitas (*capacity building*), kegiatan ini akan memberikan strategi pelatihan dan modul kepada lembaga Rumah Moderasi Beragama.

Metode Penelitian Baseline

a. Kuantitatif

Studi kuantitatif dilakukan dengan metode survei yang ditujukan ke ketiga PTKIN target. Tiga populasi dijadikan sampel; mahasiswa umum, mahasiswa rujukan, serta dosen dan pejabat fakultas. Mahasiswa umum yang dimaksud adalah mahasiswa dari ketiga PTKIN yang direkrut secara *random* dan berstrata dari setiap fakultas di masing-masing PTKIN. Mahasiswa rujukan adalah mahasiswa yang dianggap berpengaruh terhadap pandangan politik dan agama oleh mahasiswa yang direkrut secara *random*. Dosen dan pejabat fakultas terdiri dari beberapa sub-populasi; dosen PKN dan studi Islam yang direkrut secara *random*, dosen yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum, dan pejabat-pejabat fakultas. Dalam rekrutmen partisipan kami mengupayakan agar sampel seimbang secara gender. Sebagian besar pengisian survei dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Limesurvey, kecuali ada permintaan khusus dari partisipan dosen dan pejabat fakultas untuk mengisi dengan bertemu langsung.

Variabel prediktor yang diukur dalam studi kuantitatif adalah empati, *social dominance orientation*, anti-kekerasan, dan perilaku/sikap kewarganegaraan. Variabel-variabel ini merupakan operasionalisasi dari indikator moderasi beragama. Pengukuran variabel empati dilakukan menggunakan alat ukur adaptasi dari *ethnocultural empathy* (Wang, et al. 2003), yang dibagi menjadi empati terhadap penganut agama lain, yang di dalam penelitian ini kami gunakan agama Kristen sebagai acuan (empati eksternal) dan penganut aliran lain yang dianggap sesat (empati internal). Aliran yang digunakan untuk pengukuran empati internal adalah berdasarkan pilihan partisipan terkait aliran mana yang dianggap paling sesuatu atau berbeda dengan Islam yang dipraktekkan (mis. Ahmadiyah, Syiah). *Social Dominance Orientation* (SDO) adalah kecenderungan individu untuk menyetujui hierarki dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, diukur dengan adaptasi SDO7 (Ho, et al. 2015). Untuk mengukur sikap anti-kekerasan, kami menggunakan adaptasi dari sebagian skala BRAVE (Grossman, et al. 2020). Variabel-variabel prediktor ini diuji apakah dapat memprediksi variabel kriteria, yaitu kesetujuan dengan opini-opini yang menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan atas nama Islam atau negara Islam, yang diukur dengan menggunakan revisi skala Opi-

ni Pro-Ve/Radikalisme, yang dibuat oleh PPIM. Semua skala yang digunakan adalah skala Likert 1-6 (mis. Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Agak Tidak Setuju, Agak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). Analisis yang akan dilakukan adalah menguji apakah variabel-variabel moderasi beragama benar-benar memprediksi variabel Opini Pro-Ve/Radikalisme (Gambar 1). Untuk melakukan ini, kami menggunakan *multilevel regression* dengan populasi mahasiswa umum sebagai sampel analisis.

b. Kualitatif

Studi kualitatif dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* dengan empat jenis peserta yaitu mahasiswa tingkat 2, mahasiswa *key actors* (merupakan ketua Lembaga organisasi mahasiswa dan atau yang namanya muncul menjadi rujukan), dosen (yang mengajar mata kuliah PKN dan Pengantar Studi Islam, juga dosen yang namanya muncul dalam dosen rujukan) dan pihak pejabat PTKIN (Wakil Rektor, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga/Pusat Kajian). Pemilihan *sampel* dilakukan secara *purposive sampling*. FGD dilakukan secara *online* lewat platform meeting *zoom*. Kualitatif ini berfokus pada eksplorasi penggalan pemahaman moderasi beragama di mahasiswa, penerimaan definisi dan indikator moderasi beragama di Dosen dan Pejabat serta praktik PTKIN dalam meningkatkan moderasi beragama. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilih beberapa tema (kumpulan *coding* dari pernyataan dalam transkrip verbatim) yang paling sering disebut dari total 12 FGD yang dilakukan.

Hasil Penelitian

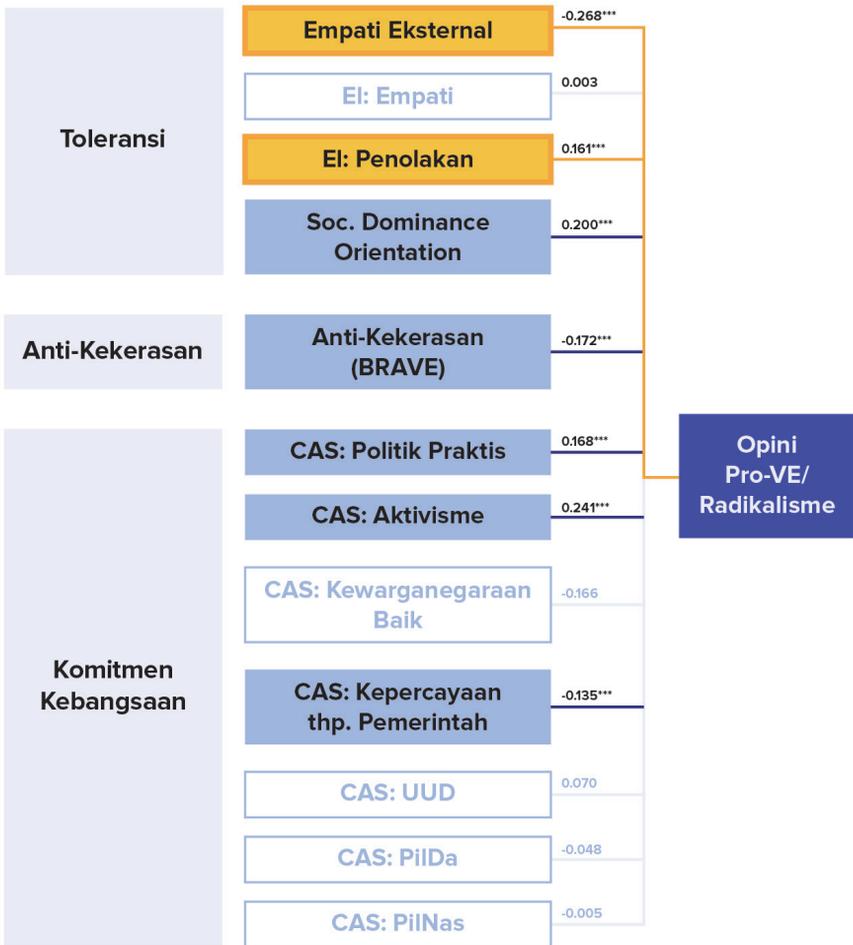
a. Kuantitatif

Setelah mengurangi sampel yang tidak lolos uji atensi menggunakan item *attention check* dan mengurangi jumlah pencilan statistik, total sampel yang kami gunakan dalam analisis adalah 846 orang mahasiswa, Usia rata-rata adalah 20.45 tahun. Sebanyak 48% dari partisipan adalah laki-laki.

Analisis *multilevel regression* menunjukkan hampir semua faktor dari variabel-variabel moderasi beragama memprediksi Opini Pro-Ve/Radikalisme, walau arah dari prediksinya tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal:

- Empati eksternal: lebih tinggi kecenderungan seseorang untuk berempati kepada umat agama lain, dalam hal ini spesifiknya penganut agama Kristen, lebih rendah kemungkinan ia akan menjustifikasi tindakan ekstrim untuk membela Islam atau mendirikan negara Islam.
- Penolakan Internal: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk apatis atau merasa gelisah dengan keberadaan penganut aliran lain di dalam Islam yang dianggap sesat, maka ia akan semakin setuju dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme.
- SDO: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menyukai hierarki dan ketidak-setaraan, semakin setuju pula ia dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme.
- Anti-Kekerasan: Semakin anti-kekerasan seseorang, semakin rendah kesetujuannya dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme
- Politik praktis dan aktivisme: Semakin seseorang menunjukkan intensi terlibat dalam politik praktis dan aktivisme, semakin besar pula kesetujuannya terhadap Opini Pro-Ve/Radikalisme
- Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan: Semakin besar kepercayaan seseorang terhadap sistem pemerintahan (mis. Sistem pemerintahan pusat, daerah, penegakkan hukum), semakin rendah kesetujuannya terhadap Opini Pro-Ve/Radikalisme.

Ringkasan hasil tersebut dapat dilihat di Gambar 1.



Gambar 1. Model hasil analisis. Angka menunjukkan koefisien regresi yang tidak terstandarisasi (lebih besar maka lebih besar pula kekuatan variabel tersebut dalam memprediksi Opini Pro-Ve/Radikalisme), dan bintang (*) menandakan hubungan yang signifikan secara statistik.

Selain dari hasil analisis regresi, kami juga melakukan analisis deskriptif untuk melihat variabel mana yang terindikasi rentan. Kami menemukan bahwa empati, baik eksternal dan internal merupakan variabel yang rentan. Skor untuk faktor pengambilan perspektif (kecenderungan seseorang untuk mencari tahu lebih dan berusaha menempatkan diri di posisi orang lain) untuk empati eksternal masih rendah ($M = 3.14$, $SD = .86$), dari skor maksimum (6). Empati secara umum untuk internal juga rendah ($M = 2.92$, $SD =$

.89), dan penolakan tinggi ($M = 3.67$, $SD = .97$). Hal ini menunjukkan baik empati eksternal dan internal dapat dijadikan target intervensi untuk ditingkatkan di ketiga PTKIN tersebut.

Dari temuan ini kami mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, hampir semua variabel moderasi beragama memprediksi Opini Pro-Ve/Radikalisme secara signifikan. Hal ini mendukung anggapan bahwa moderasi beragama, paling tidak dalam operasionalisasinya sebagai sebuah keterampilan sosial, memprediksi pandangan-pandangan ekstrim dalam memperjuangkan agama. Kedua, untuk kepentingan intervensi, kami menemukan bahwa empati adalah aspek moderasi beragama yang mungkin paling penting untuk dijadikan target.

b. Kualitatif

Dari hasil analisis kualitatif, pemahaman moderasi beragama yang sering muncul dalam diri mahasiswa adalah terkait toleransi, baik eksternal (toleransi antar pemeluk agama) dan internal (toleransi antar aliran dalam satu agama). Tema lain yang juga muncul adalah komitmen kebangsaan yang terejawantahkan dalam persetujuan jika Pancasila dan UUD 1945 sudah sesuai dengan ajaran/nilai dalam agama Islam dan juga rasa nasionalisme/cinta tanah air. Anti kekerasan tidak banyak disebut dalam diskusi, namun tema lain yang sering muncul adalah tidak ekstrim. Tidak ekstrem yang dimaksud di sini adalah terkait dengan tidak berada dalam posisi yang ekstrem kanan/kiri, tidak berlebihan dalam beribadah, atau tidak berlebihan memaksakan sesuatu paham ajaran agama tertentu. Indikator dan definisi yang dipakai dalam penelitian ini juga diterima oleh mayoritas Dosen dan Pejabat, namun masih butuh operasionalisasi perilaku moderasi beragama dengan *clear cut* yang jelas.

Menurut Peserta FGD, faktor-faktor yang dianggap memengaruhi moderasi beragama seseorang adalah wawasan keagamaan, latar belakang pengalaman individu untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda, eksposur dari media terkait dengan radikalisme dan ekstremisme kekerasan serta keikutsertaan individu dalam organisasi kemahasiswaan.

Dari hasil diskusi juga ditemukan, moderasi Beragama secara mendasar sudah menjadi agenda bagi PTKIN. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan peserta FGD yang telah memasukkan nilai atau materi

moderasi beragama tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran (disisipkan lewat materi mata kuliah di MKDU atau mata kuliah tertentu/metode pengajaran andragogi). Di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tema moderasi beragama telah didorong sebagai tema penelitian baik di kalangan mahasiswa atau dosen. Secara institusional, visi moderasi beragama juga dilibatkan ke dalam kegiatan kemahasiswaan baik yang dikelola kampus (PBAK dan webinar) atau juga yang dikelola langsung oleh mahasiswa. Di ketiga PTKIN pun telah dibentuk Organisasi Rumah Moderasi Beragama dan yang sejenis fungsinya dengan amanat Rumah Moderasi Beragama.

Namun hal ini tidak terlepas dari kekurangan, utamanya dari sisi pendidikan dan pengajaran yakni belum adanya standar integrasi nilai atau materi moderasi beragama dalam mata kuliah. Selain itu, masih ditemukan dosen yang saat mengajar kurang terbuka dengan perbedaan. Kekurangan juga terjadi pada regulasi terkait Rumah Moderasi Beragama. Sebagai unit kelembagaan, Rumah Moderasi Beragama yang belum menjadi bagian dari Organisasi Tata Kerja (Ortaker) berdampak pada keleluasaan pembiayaan dan penganggaran. Hal lainnya adalah operasionalisasi visi-misi PTKIN yang meski sudah dipersepsi mengandung nilai moderasi beragama, belum memiliki turunan regulasi praktik seperti monitoring dan evaluasi serta Standar Operasional Baku bagi dosen atau *civitas academica* dalam mencegah, menangani dan merespon radikal-ekstremisme kekerasan.

Protokol SMR dan Modul Pelatihan Moderasi Beragama sebagai social skills

Protokol SAPA - SALAM - RANGKUL atau yang disingkat menjadi SMR adalah sebuah tawaran pendekatan terintegratif *mainstreaming* moderasi beragama yang bisa dilakukan oleh PTKIN. Sesuai dengan kata dalam SAPA-SALAM-RANGKUL, terdapat tiga bagian besar dalam meningkatkan moderasi beragama di PTKIN yang dalam masing-masing huruf di kata tersebut merupakan akronim dari tahapan yang dilakukan, yaitu:

a. SAPA : Selidik - Asesmen - Pendampingan (Aspek Preventif)

Usaha membangun data kondisi empirik moderasi beragama di lingkungan mahasiswa dengan menyebarkan skala moderasi beragama pada mahasiswa. Dari hasil skala tersebut, dibuat interpre-

tasi dan *mapping* kondisi moderasi beragama serta menilai langkah yang perlu dilakukan untuk mahasiswa yang membutuhkan. Langkah ini diakhiri pendampingan pada mahasiswa yang dianggap nilai moderasi agamanya rendah.

b. SALAM: Sinergisasi - Asesmen - Latih - Monitoring dan Evaluasi (Aspek Promotif)

Sebuah pendekatan untuk bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan dalam memastikan aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan bisa bersinergi mengarusutamakan moderasi beragama, maka pengurus organisasi kemahasiswaan dibekali dengan *skill* moderasi beragama. Pendekatan ini melibatkan asesmen awal terkait kondisi moderasi beragama calon pengurus, lalu calon pengurus ini mengikuti pelatihan *social skills moderasi beragama* dan setelah pelatihan kondisi keterampilan moderasi beragama dipantau bahkan sampai dengan dia terpilih sebagai pengurus. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, para mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan dapat membuat program yang mempromosikan moderasi beragama di organisasinya.

c. RANGKUL : Respon - Analisis - Narasikan - Kaji Ulang - Rehabilitasi (Aspek Kuratif Rehabilitatif)

Aspek ini ditujukan kepada mahasiswa yang sudah tidak bisa ditangani dalam tahapan Pendampingan di SAPA karena makin menunjukkan kerentanan terhadap ekstremisme kekerasan. Dalam melakukan Analisis-Narasi-Gali dan Kaji Ulang, bisa melibatkan profesional seperti psikolog, internal PTKIN atau *stakeholder* lain. Setelah didiagnosis, mahasiswa dapat mengikuti proses rehabilitasi yang dianggap tepat.

Selain protokol, juga dibuat modul pelatihan moderasi beragama sebagai *social skills*. Modul tersebut dapat digunakan pada tahapan SALAM, yang bertujuan untuk membangun moderasi beragama dalam aspek kemampuan sosial seperti kemampuan fleksibilitas dalam menyadari identitas diri dan kelompok, menyadari bias pribadi terkait relasi dengan kelompok lain, meningkatkan kemampuan empati dan *perspective taking*, khususnya pada kelompok yang berbeda serta meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Modul ini terdiri dari 7 sesi utama dalam membangun *skills* yang dibutuhkan.

Kegiatan Capacity Building dan Technical Assistance

Kegiatan *Capacity Building* dilakukan dengan mengundang 38 Rumah Moderasi Beragama bersama dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Pendis) sebagai pengelola kebijakan moderasi beragama pada Kementerian Agama. Melalui format diseminasi hasil dan paparan mengenai modul dan protokol yang diakhiri dengan sesi diskusi, kegiatan *capacity building* menghasilkan hal-hal terkait dengan kebijakan terbaru Rumah Moderasi Beragama dari Dirjen Pendis dan usulan untuk membangun jejaring konsorsium antara Rumah Moderasi Beragama di PTKIN. Selain itu, untuk mengukur kebermanfaatannya *capacity building*, dibagikan kuesioner -yang disebar-kan pada durasi 20 menit sebelum acara berakhir- yang mengevaluasi hasil penelitian, protokol dan model pelatihan yang telah dipaparkan. Dari 25 data kuesioner yang masuk, dapat disimpulkan jika peserta *capacity building* menganggap relevan topik dan penelitian yang telah dilakukan, dan hasilnya akan mereka gunakan sebagai masukan dalam membangun program di masing-masing Rumah Moderasi Beragama. Peserta *capacity building* yang hadir juga memandang bahwa Protokol SMR dan tawaran modul pelatihan cukup sesuai dengan konteks PTKI serta berintensitas untuk menggunakan/mengadaptasi protokol dan modul tersebut.

Kegiatan *Technical Assistance* merupakan Kegiatan Semi Pelatihan dan Diskusi terkait implementasi Protokol SMR dan Modul Pelatihan Moderasi Beragama sebagai *social skills*. Kegiatan ini melibatkan Ketua/Direktur dan pengurus Rumah Moderasi Beragama di tiga UIN yang menjadi tempat penelitian. *Technical assistance* mengkombinasikan metode ceramah, diskusi dan latihan praktik dari protokol serta sesi-sesi yang ada dalam modul pelatihan. Hadir sembilan orang dalam kegiatan *technical assistance*, masing-masing Rumah Moderasi Beragama mengirimkan 3 orang perwakilan. Kegiatan diakhiri dengan pengisian kuesioner evaluasi *technical assistance*, yang diisi oleh tujuh orang partisipan, disimpulkan bahwa partisipan mengevaluasi positif terkait dengan relevansi dan kebermanfaatannya informasi protokol dan modul pelatihan. Peserta mempunyai intensitas untuk mengadaptasi protokol dan modul yang telah dibuat. Selain materi, peserta *technical assistance* merasa pelatihan berjalan cukup kondusif dan menyenangkan, juga puas terhadap cara fasilitator membawakan materi dan menjawab pertanyaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Indikator yang ditetapkan Kementerian Agama dalam konsep Moderasi Beragama berdasarkan temuan penelitian berorientasi secara signifikan dapat memprediksi Opini Pro-VE/Radikalisme. Dari empat indikator yang diuji kepada tiga populasi sampel; mahasiswa umum, mahasiswa rujukan, serta dosen dan pejabat fakultas, indikator toleransi yang dituangkan dalam variabel empati, baik eksternal dan internal merupakan variabel yang rentan. Ini menunjukkan bahwa empati adalah aspek moderasi beragama yang cukup penting untuk dijadikan target intervensi -setidaknya- di tiga PTKIN target penelitian.

Sebagai sebuah konsep, definisi moderasi beragama telah diterima, diakui dan dirasakan kebutuhannya oleh ketiga Perguruan Tinggi. Ketiga Perguruan Tinggi telah menggunakan term moderasi beragama dalam regulasi dan kebijakan. Amanat pendirian Rumah Moderasi Beragama sebagai agen moderasi beragama pun telah dipenuhi oleh ketiga Perguruan Tinggi. Namun demikian, operasionalisasi kerja serta implementasi atas kebijakan moderasi beragama utamanya dalam peran Tridharma Perguruan Tinggi masih memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis.

Dalam pendidikan dan pengajaran, moderasi beragama masih sebatas wacana, belum ada standar prosedur operasionalisasi baku baik pada materi kuliah, metodologi pengajaran dan sumber daya tenaga pengajar. Dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, moderasi beragama masih terbatas sebagai isu, belum menjadi instrumen praktis baik monitoring maupun evaluatif.

Rumah Moderasi Beragama sebagai unit agen pelaksana kebijakan pun belum beroperasi maksimal. Selain karena usia pendiriannya yang masih relatif muda, keterbatasan ruang pembiayaan karena bukan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan perguruan tinggi menjadi salah satu aspek hambatan. Fungsionalisasi Rumah Moderasi Beragama dipandang penting oleh tiga Perguruan Tinggi sebagai upaya mempersiapkan metodologi implementasi dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama di PTKI.

Untuk itu diperlukan beberapa langkah rekomendasi, pertama ditujukan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Agama sebagai pengampu otoritas kebijakan pada PTKIN, yakni:

1. Regulasi Struktur Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang jika dimungkinkan menjadi bagian terpadu dalam Organi-

sasi dan Tata Kerja (Ortaker) Perguruan Tinggi, jika tidak dimungkinkan mengingat agenda penyederhanaan birokrasi, mungkin dapat dibuat regulasi khusus advokasi struktur dimana program dan kegiatan turunan moderasi beragama dilembagakan ke dalam satu mata kuliah tertentu dan atau kegiatan pelatihan bersertifikat sebagai syarat kompetensi dalam SKPI;

2. Indeks pengukuran terpadu sebagai alat evaluasi moderasi beragama di PTKIN, hal ini dapat menjadi alat deteksi dini kerentanan dan ketahanan moderasi beragama di masing-masing perguruan tinggi, sehingga PTKIN sebagai simpul Islam wasathiyah dapat terus terjaga eksistensinya;
3. Panduan/SOP bagi rumah moderasi dalam menjelaskan cakupan tugas dan fungsinya, baik dalam PTKIN itu sendiri maupun ke dalam masyarakat.

Kedua, rekomendasi bagi PTKIN atau dalam hal ini Rumah atau Institusi moderasi beragama sebagai agen pelaksana moderasi beragama di PTKIN, sebagai berikut:

1. Pembuatan modul dasar bagi masing-masing Rumah Moderasi Beragama dalam mengembangkan bidang cakupannya yang terdiri dari
 - a. Modul Pendidikan dan Pelatihan; yang menjadi basis bagi para dosen dalam menyisipkan tema/nilai moderasi beragama dalam pembelajaran maupun pelatihan moderasi beragama di kalangan dosen atau mahasiswa
 - b. Model Kajian dan Penelitian yang menjadi panduan civitas academica dalam mengadakan penelitian mengenai moderasi beragama
 - c. Sosialisasi serta advokasi dan pendampingan masyarakat; yang menjadi panduan civitas academica untuk mensosialisasikan moderasi beragama di luar PTKIN.
2. Memasukkan agenda moderasi beragama dalam rencana kerja terintegrasi di PTKIN yang dikawal dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, baik ditujukan untuk mengetahui dan memantau performa civitas academica terkait moderasi beragama maupun untuk mengawasi jalannya mainstreaming moderasi beragama di PTKIN;

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Moderasi Beragama merupakan konsep yang diinisiasi Kementerian Agama sebagai upaya menjawab tantangan Negara Bangsa yang dalam dekade belakangan dihadapkan dengan gerakan ekstremisme beragama. Moderasi beragama secara konseptual adalah sikap beragama yang seimbang (moderat) antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan dalam praktik beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama (Moderasi Beragama, Kemenag, 2019)

Konsep moderasi beragama dipandang tepat untuk diterapkan dalam konteks beragama di Indonesia (Faiqah & Fransiska, 2018). Dalam satu dekade belakangan, moderasi beragama muncul dan semakin menguat sebagai antitesis terhadap perilaku keagamaan yang ekstrem dan radikal (Fahri & Zainuri, 2019, Faiqah & Fransiska, 2018). Ekstrem di sini dapat diartikan sebagai ketat dan kaku dalam memahami teks keagamaan dan memaksakan sudut pandang pandang tertentu, bahkan jika diperlukan dipergunakan kekerasan untuk mewujudkan sudut pandang tersebut (Faiqah & Fransiska, 2018). Moderasi beragama sendiri, sebagaimana dijelaskan buku *Moderasi Beragama* (Litbang Kemenag, 2019)—yang pada tingkat tertentu dapat disebut sebagai “buku referensi utama” dalam kon-

teks Indonesia belakangan karena sudah mengkompilasi pandangan para sarjana Muslim Indonesia—merupakan modus beragama yang berpihak pada “jalan tengah” dalam bersikap. Untuk kasus Islam, modus tersebut dikenal sebagai “*wasathiyah*”—literal: “jalan tengah”—yang memiliki akar dalam kitab suci al-Qur’an. Sedangkan untuk agama-agama lain akan menyesuaikan dengan doktrin dalam kitab suci masing-masing agama. Kementerian Agama memandang bahwa moderasi beragama merupakan terobosan dalam memperkuat kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang tengah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks.

Kementerian Agama merupakan kementerian yang secara langsung bekerja dalam bidang manajemen umat beragama di Indonesia, Kementerian Agama menjadi *leading sector* dalam mengembangkan konsep, implementasi, dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama ketika konsep moderasi beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dalam posisi sebagai *leading sector* tersebut, Kementerian Agama telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya terdapat butir-butir implementasi moderasi beragama dalam setiap program kerja yang dirancangnya; membentuk Satuan Tugas (Satgas) implementasi moderasi beragama; dan lebih dari itu adalah melibatkan PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri) untuk melakukan pengkajian, mengembangkan metode implementasi, sekaligus implementasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika.

Lebih lanjut, agenda moderasi beragama diaplikasikan ke dalam lingkungan PTKIN secara kelembagaan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Nomor B- 3663.1/Dj./BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama). Melalui Edaran Dirjen Pendis tersebut, pimpinan PTKIN diminta mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama di kampus masing-masing. Rumah Moderasi Beragama ini dimaksudkan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, dan penguatan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN. Melalui kebijakan tersebut, Kemenag tidak hanya melibatkan kampus, yang berisi kalangan terpelajar, untuk terlibat, tetapi juga menjadikannya sebagai garda terdepan dalam mengawal, mengembangkan, dan mengimplementasikan Moderasi Beragama.

Agenda moderasi beragama ini ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi Islam dengan mendirikan Rumah Moderasi Beragama, yang sampai Februari 2021 berjumlah 38 lembaga. Meskipun demikian, pada praktiknya sebagian besar institusi rumah moderasi beragama tersebut—sebagaimana layaknya lembaga baru—masih mencari bentuk dan peta jalan yang strategis dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan sivitas akademika (FGD, 2020). Sejumlah penelitian dengan moderasi beragama sebagai subjek juga mengalami peningkatan, tentu dengan berbagai variasi dan konteksnya, di kalangan sivitas akademika Perguruan Tinggi Islam (contoh: Mahyuddin, Pikhahulan, dan Fajar, 2020; Winata, Sudrajat, Yuniarsih & Zaqiah, 2020).

Sebagai lembaga yang masih muda, mayoritas Rumah Moderasi Beragama masih mencari bentuk dan model yang akan ditempuh, baik pada dimensi kelembagaan maupun dimensi program, terutama dalam merumuskan program-program *mainstreaming* moderasi beragama, yang tepat sasaran. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, belum ada model implementasi di PTKIN yang dipergunakan sebagai bentuk ketahanan (*resilience*) dari ekstremisme-kekerasan (*VE/Violent-Extremism*). Kedua, implementasi moderasi beragama akan lebih strategis jika sejalan dengan konteks budaya, sistem, dan tantangan spesifik yang dihadapi setiap PTKIN. Ketiga, kapasitas institusi—dalam hal ini institusi Rumah Moderasi Beragama—merupakan faktor strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam mengimplementasikan moderasi beragama di PTKIN.

Berdasarkan alasan tersebut, kegiatan penelitian dan penguatan institusi ini dilakukan dengan fokus pada konsep moderasi beragama, penguatan Rumah Moderasi Beragama, dengan menawarkan diagnosis terhadap realitas sivitas akademika melalui penelitian, dan langkah-langkah strategis serta modul yang dapat diterapkan untuk penguatan moderasi beragama. Pada aspek penelitian, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kondisi moderasi beragama di PTKIN serta mengidentifikasi di bagian moderasi beragama apa yang bisa menjadi fokus *capacity building* dalam meningkatkan moderasi beragama. Dengan tujuan sebagai *pilot project*, kegiatan ini hanya berlangsung di tiga PTKIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketiga PTKIN tersebut dipilih secara sengaja dengan argumen yang bersifat subjektif bahwa

ketiganya dapat dijadikan sebagai model bagi PTKIN lain dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan pada aspek penguatan kapasitas (*capacity building*), kegiatan ini akan memberikan strategi pelatihan dan modul kepada lembaga Rumah Moderasi Beragama.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selama ini dikenal sebagai salah satu pilar Islam moderat di Indonesia. Para alumni IAIN terserap dalam kerangka berpikir moderat dalam ideologi pembangunan dan modernisasi yang pada 1980-an merupakan ideologi dominan (Jabali dan Jamhari, 2002). Namun dalam beberapa tahun terakhir, thesis tersebut tampaknya dibantah dengan temuan beberapa penelitian tentang “radikalisme” di perguruan tinggi yang juga terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga penelitian seperti Setara Institute, CSRC, Litbang Kemenag melaporkan tentang gejala peningkatan radikalisme di kampus perguruan tinggi. Dalam fakta tersebut, menyandarkan wacana moderasi beragama kepada PTKI perlu dielaborasi dan ditelaah lebih lanjut. Parameter radikalisme yang antara lain (1) adanya paham dan ideologi transnasional yang bertujuan membangun negara Islam (*dawlah Islamiyah*) atau kekhalifahan (*khalifah*), (2) adanya sikap takfiri, mengkafirkan mereka yang seagama, tetapi berbeda paham dan praksis keagamaan dan (3) penghormatan sikap toleran dan bermuamalah secara baik (*mujamalah*) dengan penganut agama lain (Schmid, 2015), perlu dikonfirmasi dengan konsep moderasi beragama sebagai sebuah wacana resiliensi.

Penelitian Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim ini mencoba mengurai kapasitas institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai agen moderasi beragama, baik secara sumber daya, organisasi dan regulasi. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga terpenting dalam membangun kebajikan publik dalam menyiapkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan kuat. Untuk itu, kajian elaboratif pada perguruan tinggi mutlak dilakukan untuk memberikan kapasitas kelembagaan yang tidak hanya mampu menjadi sentra kebajikan tetapi juga pengarusutamaan kebajikan, utamanya dalam moderasi beragama.

Definisi dan Konsep

Kementerian Agama telah menetapkan empat indikator sikap moderasi beragama, yakni: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Buku Moderasi Beragama, 2019). Keempat indikator tersebut ditetapkan Kementerian Agama sebagai alat ukur untuk menilai tingkat moderasi beragama yang dipraktikkan seseorang dan seberapa kerentanan yang dimiliki. Dengan pengukuran indikator tersebut, pihak-pihak pengelola moderasi beragama dapat mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penguatan moderasi beragama.

Secara konseptual, keempat indikator tersebut telah memiliki landasan teori yang cukup kuat. Dalam komitmen kebangsaan, landasan nasionalisme dan Pancasila digunakan sebagai cara untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila (Ubaedillah, 2014)

Indikator toleransi merujuk kepada sikap dalam menghadapi perbedaan, yang dalam konteks relasi antar agama dideskripsikan melalui sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan relasi intra agama diilustrasikan oleh kemampuan menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama (Halili, 2018)

Pengukuran variabel anti kekerasan tidak dimulai dari sikap perlawanan, melainkan dimulai dari ideologi atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Ideologi dan paham bermuatan kekerasan ini hanya dapat menemukan akar pertumbuhannya jika disertai dengan persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang jika dikelola secara ideologis mampu mendorong seseorang untuk membenci dan melawan dengan kekerasan dan teror (Mirra, 2019).

Sikap akomodatif pada kebudayaan lokal merupakan item untuk melihat sejauh mana penganut agama mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi dalam perilaku keberagamaannya. Item ini didasarkan pada asumsi yang belum teruji bahwa seorang penganut

nut agama yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal. Meski demikian catatan Azyumardi Azra terkait *Islam Wasathiyah* dapat digunakan sebagai landasan teori, bahwa aktualisasi moderasi beragama tampak pada ormas Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, al-Washliyah, Persis dan sebagainya, yang telah berkembang secara akomodatif dengan budaya lokal sejak pertengahan abad ke-13 di Indonesia (Azra, 2020).

Karena 4 (empat) indikator tersebut sifatnya masih teoritik-konseptual, maka untuk kebutuhan pengukuran, penelitian ini menggunakan alat ukur yang secara konsep dan teori memiliki kedekatan definisi dan tujuan dengan moderasi beragama. Pada variabel indikator komitmen kebangsaan, menggunakan kata kunci “kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan”, digunakan kerangka pengukuran “Civic Attitudes” yang turunan item variabelnya terdiri dari (1) Support for democratic principles and practices (attitudes), (2) Support for democratic principles and practices (behavioural intentions), (3) Openness for diversity, and (4) Nationalism (Blasko, Costa dan Vera-Toscano, 2018).

Item variabel indikator toleransi dalam moderasi beragama mengisyaratkan sikap hormat, menerima perbedaan baik secara sosial maupun politik. Toleransi mempersyaratkan sikap memberi ruang, sedia berdialog dan mampu menyikapi kehadiran sekte minoritas. Untuk bisa mengelaborasi indikator ini, penelitian ini menggunakan item variabel “Intra dan Interreligion Empathy” yang diadaptasi dari “Ethnocultural Empathy” (Wang dkk., 2003).

Adapun variabel indikator toleransi meliputi (1) Empathy (Affective, Cognitive, Awareness) (2) Social Dominance Theory (3) Perception to Conservatism and Liberalism in Practicing Religion (4) Traditional (Local) Values. Adaptif terhadap kebudayaan lokal dimasukkan ke dalam indikator toleransi karena berakar pada kesediaan menerima perbedaan, bahkan mengadaptasi dan mengakomodasi tradisi lokal, yang sejalan dengan ide toleransi itu sendiri.

Anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama dipicu oleh radikalisme yang perwujudannya dimulai dari “ideologi transnasionalisme bersifat takfiri”. Item variabel sebagai konstruk psikologis penolakan penggunaan kekerasan menggunakan item BRAVE (Building Resilience Against Violent Extremism) (Grossman, et al, 2020).

Adapun pro-radikalisme dengan parameter transnasionalisme, takfiri dan khilafah dieksplorasi melalui item variabel “Riset Api dalam Sekam” (Halili, 2018). Item-item dalam “Riset Api dalam Sekam” telah digunakan oleh banyak penelitian dalam mengukur tingkat radikalisme seseorang. Dalam penelitian ini, item-item pro radikalisme berfungsi sebagai kriteria dengan variabel moderasi beragama sebagai predictor.

Sebagai studi kelembagaan, kajian pengukuran moderasi beragama yang secara kuantifikasi didasarkan pada 4 (empat) indikator dikonfirmasi ke dalam kualitas institusi perguruan tinggi secara regulatif, struktur dan administratif. Penilaian kualifikasi institusi menggunakan konsep “Measuring Capacities UNDP” yang mengelaborasi tiga komponen; (1) Kinerja (performance), (2) Kemampuan beradaptasi (adaptability), dan (2) Stabilitas (stability).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teoritis di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana gambaran “Moderasi Beragama” di lingkungan PT-KIN yang melingkupi
 - a. Sikap dan perilaku moderasi beragama *civitas academica* PTKIN
 - b. Implementasi Moderasi Beragama dalam Kebijakan Program di PTKIN
2. *Capacity Building* apa yang dibutuhkan PTKIN dalam meningkatkan moderasi beragama?
3. Sejauh mana *capacity building* yang dilakukan efektif dalam meningkatkan moderasi beragama di PTKIN?

1.3 Tujuan Kegiatan

Dalam menjawab pertanyaan di atas, maka tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Mengetahui kondisi moderasi beragama pada PTKIN Indonesia dengan menciptakan instrumen yang mengukur moderasi beragama dan mengukur kondisi moderasi beragama di PTKIN
2. Mendesain *capacity building* yang dapat meningkatkan moderasi beragama
3. Melakukan *capacity building* pada *key actors* yang ditentukan
4. Menguji efektivitas *capacity building* yang dilakukan dalam meningkatkan moderasi beragama
5. Dengan adanya moderasi beragama diharapkan *civitas academica* dapat mencegah paparan ekstremisme kekerasan yang masuk di lingkungan PTKIN

1.4 Program yang ditawarkan

Program yang ditawarkan adalah *Riset dan Capacity Building* pada Kapasitas Institusi PTKIN berfokus pada moderasi beragama. Riset sendiri ditujukan untuk mengecek kondisi awal PTKIN terkait moderasi beragama dan asesmen kebutuhan *capacity building* apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan moderasi beragama. Selain itu riset juga digunakan dalam menguji efektivitas *capacity building* yang dilakukan.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup PTKIN. PTKIN yang dipilih dianggap sebagai PTKIN yang dapat menjadi *role model* bagi PTKIN lain sehingga ketika *capacity building* dilakukan dan teruji efektivitasnya, dapat menjadi *best practice* yang dilakukan oleh PTKIN lain. Selain itu, faktor utama memilih PTKIN yang menjadi lokasi penelitian adalah faktor kemudahan dalam pelaksanaan penelitian tersebut di PTKIN mengingat rangkaian penelitian ini yang sangat panjang. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah

- a. UIN Syarif Hidayatullah, DKI Jakarta
- b. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- c. UIN Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta

BAB II

Landasan Teoritis (Studi Literatur)

2.1 Ekstremisme Kekerasan

a. Definisi

Ekstremisme Kekerasan merupakan *term* yang beberapa tahun ini digunakan dalam menggambarkan perilaku kekerasan yang mengandung ideologi tertentu. Beberapa *term* lain yang sering ditemukan terkait dengan ini juga ada radikalisme, radikalisasi, ekstremisme dan terorisme. Hal ini wajar karena dalam penanganan terhadap kasus ini juga sering digunakan bahasa seperti *counter-terrorism* dan deradikalisasi. Dalam penggunaannya, istilah-istilah ini saling menggantikan untuk menggambarkan fenomena yang ingin ditangkap dan menurut Botticher (2017) terkadang terjadi penyalahgunaan *term*. Dalam laporan ini, Peneliti menggunakan definisi ekstremisme kekerasan yang digunakan dalam Program EWERS 2019 yaitu Tindakan mendukung, mempromosikan dan melakukan aksi-aksi kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan politik, agama, ras, suku, ideologi dst. Lebih lanjut, perilaku ekstremisme kekerasan ditandai dengan tindakan kekerasan terorganisir melalui pelatihan dan persiapan yang matang, dan menggunakan kekerasan bahkan jika harus mengorbankan masyarakat sipil (Laporan EWERS, 2020). Penggunaan ekstremisme kekerasan dipilih dibandingkan radikalisme karena menurut *review* dari Botticher (2017), walau keduanya ada basis ideologi tertentu dalam melakukan suatu ‘gerakan’, ada perbedaan mendasar dari kedua hal ini seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Radikalisme dan Ekstremisme

Radikalisme	Ekstremisme
<ul style="list-style-type: none"> ● Menggunakan kekerasan dalam politis yang pragmatis dan selektif ● Radikalisme bertujuan untuk meraih masa depan yang lebih baik untuk semua ● Radikalisme lebih bersifat memberdayakan dan tidak secara total anti-demokratik. ● Radikalisme tidak menolak hak asasi manusia, bahkan radikalisme yang progresif mementingkan HAM di kelompok yang rentan ● Radikalisme, dalam gerakannya untuk mendobrak status quo, tidak menutup karakter komunitas yang terbuka dan beragam ● Radikalisme biasanya bersifat oposisi terhadap kemapanan ● Ketika dalam jumlah yang kecil, Radikalisme biasanya menarik diri dari komunitas yang lazim namun tetap bisa bersamaan berada dengan komunitas, tanpa ada perlawanan langsung ● Radikalisme mempunyai nilai moral yang <i>universal</i> ● Radikalisme lebih bersifat egalitarian dan kurang elit ● Radikalisme berakar pada gerakan di abad ke-18 yang menekankan pada ide kemajuan manusia dan kekuatan dari akal (<i>reason</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekstremisme selalu mempertimbangkan penggunaan kekerasan kepada musuhnya dan menganggap hal tersebut sebagai kredo ● Sifatnya anti-demokratik dan ingin menghancurkan konstitusi demokrasi dan hukumnya. Biasanya tidak bisa bergabung ke komunitas yang liberal-demokratik karena ideologinya cenderung intoleran ● Melawan adanya Hak Asasi Manusia universal dan institusi yang menggunakan hal tersebut ● Menolak adanya komunitas yang terbuka dan beragam ● Ekstremisme melawan semua hal yang tidak menganut ideologi yang kelompok ekstrimis punya ● Jika jumlahnya kecil, kelompok ekstrimis tetap akan melakukan kekerasan yang provokatif ● Kelompok ekstremis hanya mempunyai asas moral terhadap anggota kelompoknya ● Kelompok ekstremisme biasanya berhubungan dengan diktator otoriter dan totalitarianism. ● Ekstrimis berakar pada gerakan yang irasional, biasanya sistem keyakinan agama atau yang fanatis, yang mengklaim bahwa kebenaran hanya ada satu

Dari review Botticher di atas dapat dilihat bawah dalam konsep literatur, ekstrimisme sudah mengandung sifat ideologi yang menggunakan kekerasan. Beberapa lembaga yang fokus dalam isu ini seperti WANA Institute, UN dan lain banyak yang bersepakat menggunakan istilah ekstremisme kekerasan dalam menggambarkan fenomena ini.

b. Faktor yang mempengaruhi

Studi literatur menemukan bahwa untuk membuat seseorang menjadi berperilaku *ekstremisme* kekerasan yang biasa disebut

proses radikalisasi. Radikalisasi adalah proses dalam mengadopsi pandangan ekstrem, yang biasanya ditolak oleh masyarakat umum dan pandangan yang memperbolehkan penggunaan kekerasan dalam mengubah kondisi sosial dan politik (Havez & Mullins, 2015). Menurut Havez dan Mullins (2015), Proses radikalisasi ini biasanya (1) bersifat gradual yang biasanya melakukan sosialisasi terkait (2) sistem keyakinan ekstremis yang mempersiapkan tahapan (3) adopsi pandangan kekerasan yang menjadi hal yang tidak terhindarkan.

McCauley dan Moskalkenko (2008) menyatakan bahwa ada tiga tingkatan yang membuat individu dapat menganut paham ekstremisme kekerasan yaitu level individu, level kelompok dan level publik (*mass*). Menurut McCauley dan Moskalkenko (2008) di level individu, ada empat mekanisme yang mempengaruhi individu menganut paham ekstremisme kekerasan yaitu (1) *personal victimization* (2) *political grievance* (3) *joining a radical group-the slippery slope* dan (4) *joining radical group-the power of love*. *Personal victimization* adalah kondisi yang dimiliki seseorang dimana dirinya terlibat dalam perilaku *ekstremisme* kekerasan karena perasaan pernah menjadi korban dari kelompok lain sehingga dia melakukan aksi ekstremisme kekerasan sebagai alat untuk membalas dendam. *Political Grievance* adalah mekanisme dimana individu menjadi aktor ekstremisme kekerasan karena menjadi korban akibat keputusan politik dimana dia berada. Menurut McCauley dan Moskalkenko (2008) biasanya antara *personal* dan *political grievance* ini saling berhubungan. Sedangkan seseorang dapat menjadi pelaku teroris dalam kelompok ekstrimis yang *slippery rope* maksudnya adalah dengan sangat cepat dikarenakan adanya *self-justification* atau proses dimana seseorang meyakinkan dirinya bahwa perilaku kekerasan harus dilakukan (McCauley & Moskalkenko, 2008). Selain *self-justification*, juga dikarenakan adanya kepatuhan terhadap pihak yang dianggap otoritas atau dipercaya benar (McCauley & Moskalkenko, 2008). Yang terakhir adalah seseorang bisa bergabung dengan kelompok ekstrimis karena adanya relasi dirinya dengan orang lain seperti keluarga, pasangan atau teman yang sebelumnya bergabung dengan kelompok ekstrimis (*the power of love*). McCauley dan Moskalkenko (2008) juga menyatakan kelompok ekstrimis juga makin kuat karena adanya kesamaan tujuan dan ancaman yang dirasakan.

Dalam level kelompok, McCauley dan Moskalkenko (2008) juga menyatakan kelompok ekstrimis membuat individu menganut paham ekstremisme kekerasan karena adanya proses (1) *Like-minded groups*, pendapat seseorang yang awalnya cenderung rata-rata akan berubah dan cenderung mengikuti keputusan yang lebih ekstrem ketika berada dalam kelompok, karena individu merasa harus mengikuti keputusan kelompok tersebut. Selanjutnya adalah dengan proses (2) Isolasi dan ancaman, keterikatan kelompok akan menguat ketika kelompok merasa berada di bawah ancaman dan isolasi dari kelompok lain. Keterancaman ini membuat kelompok akan mengadopsi kekerasan untuk melindungi diri (McCauley & Moskalkenko, 2008). Selain itu McCauley dan Moskalkenko (2008) juga menyatakan bahwa konflik antar kelompok ini akan cenderung mendorong radikalisasi; (3) kompetisi dengan negara dimana anggota kelompok yang komitmennya lebih rendah sudah mundur (*condensation*), kompetisi mendapatkan dukungan dan sumberdaya yang sama (*outbidding*), dan (4) kompetisi dalam kelompok sendiri (*fissioning*).

Pada level massa publik, tindakan ekstremisme kekerasan dapat menimbulkan (1) efek jujitsu, ketika perilaku ekstrem justru digunakan oleh kelompok yang menjadi korban ekstremisme untuk meningkatkan kohesivitas kelompok. Selain itu, efek yang kedua di level massa publik adanya (2) kebencian antar kelompok dan (3) adanya *martyrdom*, yang biasanya muncul dalam kasus bom bunuh diri, yang membuat publik bertanya apakah gerakan ini seberharga itu sehingga seseorang mampu mengorbankan nyawanya.

c. Pengukuran

Dalam survei ini, kami mengukur seberapa seseorang menjustifikasi tindakan-tindakan ekstrim sebagai perwujudan dari ketaatan beragama. Tindakan-tindakan ekstrim tersebut mencakup tindakan yang dianggap membela agama Islam atau tindakan yang bertujuan mendirikan negara berbasis Islam. Perlu dicatat bahwa pengukuran ini tidak dapat dianggap sebagai ukuran terkait intensi seseorang melakukan suatu tindakan ekstrim, tapi merupakan ukuran sikap terhadap tindakan-tindakan tersebut. Dalam studi ini ekstremisme kekerasan diukur dengan menggunakan skala sikap dengan mengacu pada alat ukur survei yang digunakan PPIM UIN Jakarta dalam riset Api dalam Sekam (Saputra, 2018a) yang beberapa aitemnya dispesifikan merujuk kepada agama Islam. Bebe-

rapa aitem yang umum, dibuat lebih spesifik menekankan penggunaan kekerasan untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap hukum Islam dan pendirian negara Islam. Aitem dalam alat ukur ini disusun dalam 6 skala dari sangat setuju, setuju, agak setuju, agak tidak setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Contoh dari aitem variabel ini adalah “*Menyumbang uang atau barang untuk perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia*” dan “*Menggunakan kekerasan untuk melawan orang yang menyekutukan Allah swt*”.

2.2 Moderasi Beragama

a. Definisi

Moderasi Beragama merupakan *term* yang sudah lama ada namun kembali menjadi topik yang dipertimbangkan saat digaungkan kembali oleh Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah paparan ekstremisme kekerasan di masyarakat. Ada banyak definisi terkait moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki padanan dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Moderasi beragama yang dimaksud di sini sangat dekat dengan Islam Wasatiyyah. Kata-kata lain menurut para Mufassir dalam artikel berjudul *The Wassatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study Implementation in Malaysia* menerjemahkan *washata* sebagai *the chosen* (terpilih), *the best* (terbaik), *the fair* (yang adil), *most humble and being fair* (penuh kerendahan hati dan adil (Saidurrahman, 2019). Secara makna, Al-Razy (dalam Saidurrahman, 2019) menyatakan ada empat (4) makna dasar dari kata *wassatha* adalah (1) makna keadilan yang tidak mendukung dua pihak yang berlawanan, (2) Sesuatu yang terbaik, (3) yang paling rendah hati dan sempurna dan (4) tidak ekstrem dalam urusan keagamaan. Kamali (2019) menjelaskan bahwa Wasatiyyah adalah sikap yang direkomendasikan oleh orang yang memiliki akal sehat dan intelektual, yang dibedakan dengan keengganan terhadap ekstrimisme maupun sifat cuek.

Moderasi beragama berarti mengambil posisi tengah diantara dua ekstrem (Kamali, 2019). Pandangan di tengah juga ditekan oleh Yusuf Al-Qaradhawi yaitu sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang

berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang (Saidurrahman, 2019). Posisi dan sikap di tengah juga dipakai dalam buku Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, maka moderasi beragama adalah memiliki cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada (Kemenag, 2019).

Dari segi makna, Nizar (2019) juga menyatakan definisi lain dari moderat yaitu seseorang yang paham tentang ajaran Islam secara utuh (melihat Al-Qur'an secara integral dan komprehensif) dan terampu dalam pandangan hidup yang "imbang" dan tidak melampaui batas, sehingga dapat diartikan moderasi beragama berarti menjalani ajaran agama tanpa ditambah atau dikurangi. Nizar (2019) juga menambahkan keseimbangan ini bukan hanya urusan kesalahan vertikal (hubungan manusia-Tuhan) namun juga kesalahan horizontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Dari makna moderasi dari Nizar ini dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai moderasi beragama, tidak hanya dilihat dari bagaimana ketakwaan dirinya kepada Tuhan, tetapi bagaimana dirinya menjaga hubungan muamalah dan nilai-nilai kemanusiaan serta memahami bahwa paham keislaman adalah menjunjung tinggi kedamaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yusuf Al-Qadariah (dalam Abdillah, 2019) dalam 30 rambu-rambu moderasi beragama yaitu (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari'ah dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas.

Nilai kemanusiaan ini juga dikuatkan dengan misi agama Islam sendiri yaitu rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin, Q.S. Al Anbiya': 107). Abdillah (2019) menyatakan bahwa untuk mewujudkan agenda 'rahmat bagi semesta alam' ini, maka karakter agama Islam adalah agama yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah, Q.S. al-Rum: 30), berpihak pada kebenaran (hanif, Q.S Al-Rum: 30), menegakkan keadilan (Q.S al-Maidah:8) dan kebaikan agar menjadi umat terbaik (Q.S. Ali-Imran:110). Terkait dengan moderasi beragama, Abdillah (2019) yang menyatakan bahwa beberapa ciri-ciri agama yang moderat terkait kemanusiaan adalah: (1) terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran, (2) mendahulukan prasangka baik, dan (3) mendahulukan kepen-

tingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Al-Zuhayli (dalam Kamali 2019) menyatakan bahwa Wasatiyyah berarti moderasi dan keseimbangan dalam keyakinan, moral dan karakter dalam hal memperlakukan orang lain dan diterapkan dalam sistem aturan sosial-politik dan pemerintahan. Dalam praktiknya, Abdillah (2019) menyatakan bahwa moderasi ini biasanya dikaitkan dengan bagaimana sikap atau perilaku Islam untuk men-sifati Islam, maka bentuk moderasi pun bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya karena persoalan yang dihadapi umat di lokasi yang berbeda, tidaklah sama.

Dari reuiu literatur di atas, dapat disimpulkan bentuk moderasi beragama bisa berbeda, tergantung kepada kebutuhan dari umat Islam di suatu tempat. Selain itu, moderasi beragama, merupakan bentuk keberagamaan kepada Tuhan, sehingga selain urusan vertikal kepada Allah swt, moderasi beragama terkait juga dengan sejauh mana individu bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Moderasi beragama juga harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Kemenag, 2019). Definisi ini muncul mengingat tema moderasi beragama digunakan sebagai kontra dari sikap radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang menguat di Indonesia. Mengingat fenomena ini, maka Kementerian Agama (2019) berfokus kepada empat (4) indikator yang menunjukkan seseorang mempunyai moderasi beragama yaitu (1) Komitmen Kebangsaan, (2) Toleransi, (3) anti kekerasan dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Empat indikator ini dianggap sebagai indikasi bagi orang yang mempunyai moderasi beragama. Keempat hal ini menurut peneliti merupakan ejawantah dari pengertian ibadah secara horizontal kepada sesama hamba-Nya, yang merupakan ejawantah dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan dengan pretensi (niat) yang manusiawi dan bijak.

b. Indikator Moderasi Beragama

a) Komitmen Kebangsaan

- **Definisi.**

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kese-

tiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme (Kemnag, 2019). Termasuk di dalamnya adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip kebangsaan yang ada dalam UUD 1945. Dalam definisi ini terdapat beberapa hal yaitu bahwa dalam moderasi beragama seseorang harus menerima Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam UUD 1945 mempunyai rasa nasionalisme.

Banyak isu yang beredar, bahwa negara Islam yang bukan berdasarkan kekhalfahan, berarti merupakan negara kafir, sehingga isu yang digawangi beberapa kelompok yang berkepentingan dengan tujuan mengganti sistem Indonesia menjadi sistem kekhalfahan meningkat. Namun anggapan ini merupakan pemahaman yang salah. Pancasila dari sejarah dan nilai merupakan bentuk dari moderasi beragama sendiri. Dilihat dari bentuk negara Indonesia, yang bukan merupakan negara sekuler maupun negara agama, Pancasila merupakan bentuk yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang menempatkan agama sebagai *spirit* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini negara memberikan pengakuan atas keberadaan agama dan menjamin serta melindungi setiap pemeluk agama dalam menjalankan agamanya (Mukri, 2019).

Dari sejarah pembentukan Pancasila sendiri yang merupakan bukti dari sikap moderat organisasi Islam yang membuat pancasila sampai prinsip negara sebagai “umat”. Baidhawiy (Mukri, 2019) menyatakan bahwa negara Pancasila telah mengikuti prinsip-prinsip Syari’ah karena kata Ummah sendiri mengandung makna kesatuan, integrasi dan solidaritas, dan hal tersebut ada dalam Pancasila.

Dari segi nilai, Makri (2019) merangkum bahwa setiap sila di Pancasila sudah mengejawantahkan nilai-nilai Islam, yaitu:

- a. Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” yang berarti pengakuan adanya Ketuhanan yang maha segala. Sila ini

sesuai dengan ajaran agama Islam dimensi keimanan dan ketauhidan diserahkan pada individu, tidak ada paksaan di dalamnya. Sila ini juga merupakan jaminan bagi warga negara ketika menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.

- b. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menekankan pada kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani yang mengarah pada keadaban dan keadilan (yang merupakan intisari ajaran Islam) sehingga setiap orang hendaknya menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan
- c. Sila “Persatuan Indonesia” yang berarti persatuan kebangsaan Indonesia atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi di Indonesia. Sila ini mendukung kefitrahan jika memang individu bisa berbeda, namun tetap bisa bersatu.
- d. Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang berarti semangat untuk bermusyawarah mencapai mufakat dalam perwakilan. Hal ini juga berarti prinsip dan asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan pesan dari *syuro* dalam Islam yang ditegakkan dalam unsur pembentuk demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.
- e. Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti prinsip persamaan, emansipasi dan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia bukan hanya politik, tetapi juga sosial dan ekonomi yang diterapkan secara adil. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, dimana adil dianggap sebagai manifestasi sosial pertama dari ketauhidan.

Prinsip-prinsip Pancasila ini juga turun dalam beberapa pasal UUD 1945 yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga dapat dikatakan menjaga kesatuan Indo-

nesia, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu ejawantah dalam moderasi beragama.

- **Pengukuran**

Pengukuran komitmen kebangsaan dalam penelitian ini mengadaptasi aitem dari alat ukur *Civic attitude and behavioural intentions* (Blasko, et al., 2018). Secara umum alat ukur ini meneroka dua aspek yaitu, *openness for diversity* dan *support for democratic principles and practices*.

Openness for diversity adalah sikap persetujuan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara. Dalam penelitian ini, aitem-aitem asli disesuaikan dengan konteks Indonesia, dengan meminjam konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam UUD 1945, seperti hak beragama, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, dan kewajiban membela tanah air. Aspek *support for democratic principles and practices* mencakup (a) *perception of the importance of conventional citizenship*; (b) *perception of the importance of social-movement-related citizenship*; (c) *perception of the importance of personal responsibility for citizenship*; (d) *trust in civic institutions*; (e) *expected electoral participation*; dan (f) *expected active political participation*. Dua yang terakhir secara spesifik termasuk ke dalam sub dimensi intensi, sementara yang lain termasuk ke dalam sikap.

Contoh-contoh aitem yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah:

“Setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya sesuai aturan hukum yang berlaku.”

“Berpartisipasi dalam protes damai untuk menolak undang-undang yang dipercaya tidak adil.”

“Terlepas dari apakah pemerintahan pusat pada periode sekarang itu baik atau buruk, saya yakin tidak ada alasan untuk mengubah sistem pemerintahan di Indonesia.”

b) Toleransi dan Akomodasi Budaya Lokal

- **Definisi.**

Indikator ini merujuk kepada indikator kedua dan keempat yang dinyatakan dalam buku moderasi beragama dari Kemenag (2019). Menurut buku itu, Toleransi yang dimaksud merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, meski hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini (Kemenag, 2019). Sedangkan akomodatif terhadap budaya lokal digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan individu untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi (Kemenag, 2019).

Secara singkat, toleransi adalah sebuah situasi dimana individu bagaimana individu dapat bersabar dan bertahan dengan cara berpikir dan berperilaku seseorang, walau cara berpikir dan berperilaku tersebut berbeda dengan dirinya (Broer & Munyck, 2019). Salah satu konsep yang banyak disepakati para ahli adalah bahwa toleransi bukanlah sikap menjadi “tidak berbeda”, netral, atau sebuah antonim dari prasangka. Lebih jauh, dalam Psikologi Sosial, toleransi didefinisikan sebagai sikap tidak cepat menilai sesuatu (*non-judgmental*), terbuka, menghargai perbedaan, atau secara umum disebut sebagai sikap positif terhadap kelompok lain yang berbeda. Verkuyten dan Yogeenswaran (2017) merumuskan komponen toleransi sebagai perasaan keberatan atau *objection* (kondisi afeksi ketidaksukaan atas kelompok lain secara umum), penerimaan atau *acceptance* (menghindari pernyataan yang negatif), dan penolakan atau *rejection* (berbentuk perilaku misalnya diskriminasi). Broer dan Munyck (2019) menambahkan bahwa toleransi terjadi ketika adanya perbedaan, juga adanya rasa hormat kepada orang lain terhadap hak asasi manusia dan harga dirinya serta adanya empati kepada orang lain. Dari dua definisi di atas dapat dilihat bahwa toleransi beragama, merujuk kepada bagaimana individu bersikap dan berperilaku terhadap perbedaan kelompok agama maupun perbedaan praktik agama yang menganut budaya dan tradisi lokal.

Dalam usahanya menerangkan sikap dan perilaku manusia menghadapi perbedaan dan kelompok lain, Bennet (2017) membangun sebuah teori yang disebut dengan *the Development Model of Intercultural Sensitivity* (DMIS) atau Model Pengembangan Sensitivitas antar Budaya. Menurut Benner (2017), sensitivitas antar budaya merupakan suatu hal yang dapat dikonstruksi berdasarkan paparan budaya yang seragam maupun beragam yang ada di sekitar individu dan bagaimana individu mempersepsikan paparan tersebut. Kunci dalam DMIS adalah bagaimana kompetensi berkomunikasi seseorang bisa berpindah dari yang awalnya dalam budaya sendiri menjadi kompetensi berkomunikasi dengan baik antar budaya (Bennet, 2017). Bennet (2017) mendefinisikan tahap perkembangan seseorang terbagi ke dalam 6 tahapan/tingkat yaitu:

1. *Denial* yang dicirikan dengan kegagalan untuk mempersepsi adanya eksistensi atau relevansi dari kelompok budaya yang berbeda. Pada tahap ini orang cenderung punya bias bahwa budaya sendiri lebih kompleks dibanding budaya lain dan melihat budaya lain sebagai hal asing atau minoritas. Orang pada level ini menunjukkan ketidaktertarikan bahkan tidak menanggapi secara agresif perbedaan budaya.
2. *Defense* yang dicirikan bahwa individu sudah mengenal adanya perbedaan budaya namun punya pandangan bias terhadap kelompok budaya yang berbeda. Pada tahap ini, individu mempersepsikan perbedaan kelompok sebagai “kita” versus “mereka” dan cenderung kritis dan menyalahkan perbedaan budaya sebagai kekurangan dari masyarakat. Lawan dari *defense* namun masih dalam tahap yang sama adalah *reversal*, dimana individu cenderung menganggap budaya lain lebih superior dan dibanding budaya kelompok sendiri. Adanya bias ke kelompok yang berbeda ini bisa saja menimbulkan ancaman ke kelompok budaya yang berbeda, adanya eksklusifitas bahkan segregasi.
3. *Minimization*, pada tahap ini orang dicirikan meminimalisasi perbedaan kelompok yang ada dengan mencari persamaan yang penting antara kelompoknya dan kelompok lain. Orang pada tahap ini percaya bahwa

ada nilai-nilai universal yang dialami oleh semua budaya/kelompok. Namun orang dalam tahap ini akan tetap nyaman berada dalam *privilege* yang menguntungkan kelompok yang dominan.

4. *Acceptance* merupakan tahapan dimana individu dapat mengenal bahwa perbedaan budaya merupakan hal yang sangat kompleks, sama seperti budaya yang di-anut oleh individu. Orang dalam tahap ini tidak selalu setuju, dia tetap dapat menilai suatu budaya negatif dan penilaian terhadap suatu budaya tidak etnosentris dalam hal tidak otomatis berdasarkan perbedaan dari posisi budaya seseorang. Orang dalam tahap ini mempunyai keingintahuan mempelajari budaya lain.
5. *Adaptation*. Orang dalam tahap ini sudah mampu menggunakan *perspective taking* dan empati dalam melihat sudut pandang orang lain. Orang dalam tahap ini dapat dengan mudah berpartisipasi dan menyatakan perasaannya secara tepat, berperilaku dengan sesuai dan dipersepsikan secara autentik dalam budaya yang berbeda.
6. *Integration*. Orang dalam tahap ini mulai bisa melihat bermacam budaya sebagai sesuatu yang dapat diintegrasikan dalam diri seseorang. Orang tersebut tidak membatasi dalam satu budaya namun pengembangan diri individu dilihat dari bagaimana nilai-nilai berbagai macam budaya masuk dan diadopsi serta diintegrasikan dalam diri individu.

Berdasarkan tahap Bennet (2017) di atas dapat dilihat bahwa jika seseorang mempunyai toleransi dan akomodatif terhadap praktik keagamaan yang menganut budaya lokal, ia dipersepsikan sudah mencapai tahap 4 yaitu *acceptance* atau tahap 5 yaitu *adaptation*. Lebih jauh, orang yang berperilaku toleran karena mempunyai moderasi agama yang kuat, ia tidak hanya sekedar menerima perbedaan dalam beragama maupun praktik beragama, tapi punya dasar dalam menerima berdasarkan suatu keutamaan tertentu. Dalam moderasi beragama, suatu individu dituntut untuk mempunyai kesediaan berdialog dan melihat dari sudut pandang orang lain serta

berempati terhadap orang yang berbeda agama atau aliran agamanya. Maka dari itu, Peneliti cenderung membuat tahap 5 sebagai patokan level bagi orang yang dianggap mempunyai moderasi beragama. Seperti yang disebutkan di atas, Empati merupakan hal yang sangat penting dalam tahap *Adaptation* (Bennet, 2017) sehingga dapat menjadi pendekatan pengukuran bagi toleransi dalam moderasi beragama. Empati juga dinilai penting dalam hal toleransi beragama menurut Broer dan Munyck (2019), karena saat seseorang berhadapan dengan pikiran atau perilaku umat beragama lain yang menurutnya tidak sesuai, seseorang harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kepentingan umat beragama lain itu. Maka dari itu diperlukan empati, sebagai kemampuan untuk memahami apa yang mendorong pikiran dan perilaku orang lain sehingga individu dapat memberikan respon yang sesuai (Broer & Munyc, 2019).

Empati.

Rogers (1980 dalam Elliot, Bohart, Watson & Greenberg, 2011) mendefinisikan empati sebagai kemampuan dan kemauan untuk memahami pikiran, perasaan dan perjuangan seseorang dari sudut pandangnya. Dalam banyak literatur, Empati secara garis besar dibagi menjadi dua komponen yaitu 1) komponen afektif, dimana dirinya mampu berada/berbagi pengalaman emosional yang dirasakan orang lain dan 2) komponen kognitif yaitu memahami pengalaman orang lain (Decety & Jackson, 2004). Decety dan Jackson (2004) menyatakan bahwa walau mampu berada di perasaan orang lain, orang yang mempunyai empati tetap mampu meregulasi emosinya, menyadari emosi sebenarnya diri sendiri dan orang lain. Wang dkk (2003) menyatakan bahwa empati, sebagai hal yang bisa ditingkatkan, dan penting sebagai anteseden dari perilaku prososial dan keadilan.

Wang dkk (2003) juga menyatakan di tengah hubungan antar budaya yang makin meningkat, perlu memasukkan konteks budaya dalam melihat empati disebut dengan *ethnocultural empathy* yaitu empati yang ditujukan kepada orang-orang yang berbeda kelompok dalam hal ras

dan latar belakang dengan diri individu. Wang dkk (2003) menyatakan hal ini berbeda dengan empati pada umumnya yang melihat hubungan interpersonal dalam situasi yang umum atau profesional, sehingga konteks budaya tidak terlalu dirasakan. Wang dkk (2003) menyatakan ada 3 dimensi dalam *ethnocultural empathy* yaitu *Intellectual Empathy*, *Empathic Emotion* dan *Communicative Empathy*. *Intellectual Empathy* dalam kemampuan untuk memahami pikiran atau perasaan dari orang yang berbeda suku, budaya atau rasnya. Dengan *Intellectual Empathy*, seorang individu mampu melihat dari sudut pandang budaya/etnis yang dianut orang tersebut (Wang dkk, 2003). *Empathic Emotion* merupakan perhatian kepada situasi emosi/perasaan seseorang dimana individu mampu merasakan apa yang orang tersebut rasakan dari sudut pandang etnis/budayanya (Wang dkk, 2003). Yang terakhir adalah *communicative empathy* dimana orang tersebut mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, secara pantas dan tepat ke orang yang berbeda latar belakang etnis/budayanya. Peneliti melihat bahwa *Intellectual Empathy* bisa disamakan dengan komponen kognitif dari empati sedangkan *empathic emotion* bisa disamakan dengan komponen afektif.

Mengacu kepada *ethnocultural empathy* dari Wang dkk (2003), Peneliti merasa perlu memasukkan konteks beragama dalam empati. Mungkin saja konteks beragama dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain atau pemeluk aliran lain memengaruhi kemampuan empati seseorang saat berinteraksi. Maka dari itu, konteks empati yang diukur dari penelitian ini memasukkan konteks hubungan antar pemeluk agama dan pemeluk aliran dalam satu agama yang sama.

Social Dominance Orientation.

Selain empati, salah satu yang dianggap penting dalam toleransi adalah bagaimana melihat orientasi dominansi individu terhadap kelompok yang berbeda atau biasa yang disebut dengan *social dominance orientation* (SDO). Menurut Ho, Sidanius, Kteily, Dan Stewart (2015), SDO adalah sikap dan kecenderungan seseorang untuk

mempertahankan adanya ketidaksetaraan (*inequality*) antar kelompok dalam tataran sosial maupun institusi yang akhirnya memproduksi ketidaksetaraan sosial. SDO telah terbukti menjadi prediksi dari prasangka akan orang dari kelompok yang dianggap rendah seperti masyarakat miskin, minoritas, perempuan dan lainnya (Ho dkk, 2015). SDO juga berhubungan dengan persetujuan seseorang menyetujui kebijakan yang mendukung adanya status-quo terkait struktur hierarkis seperti adanya perang, hukuman mati dan penyiksaan dan melawan adanya praktik humanitarian, kesejahteraan sosial dan kebijakan afirmatif (Ho dkk, 2015). Pratto dkk (1994) juga menemukan bahwa orang yang punya kecenderungan orientasi dominansi sosial yang tinggi akan lebih setuju kepada kebijakan atau aturan yang mempertahankan hierarki dan juga menolak kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan kelompok minoritas.

Secara logis, orang yang mempunyai SDO akan cenderung sulit untuk dapat menunjukkan sikap toleransi karena dia akan melihat kelompok agama minoritas sebagai sesuatu yang berada 'di bawah' kelompoknya, karena agama yang dianut dianggap lebih baik dibanding agama yang lain. Maka dia juga cenderung akan menolak hak yang sama bagi umat agama lain atau kelompok aliran yang dianggap berbeda, termasuk di dalamnya cara beribadah dan juga praktik-praktik sosial kemasyarakatan lainnya. Berkebalikan dengan toleransi beragama, saat seseorang menganggap kelompok agama lain itu setara dan punya hak kemanusiaan dan harga diri yang sama, mereka akan melihat bahwa setiap individu punya hak dan cara yang unik dalam mencari kebenaran sesuai dengan dirinya (Broer & Munyck, 2019). Individu juga akan cenderung memperlakukan umat beragama lain secara setara, dalam hal kebijakan sosial maupun keadilan, karena umat beragama lain merupakan bagian dari komunitas yang juga berkontribusi menciptakan nilai setara di komunitas). Maka dari itu, SDO juga diambil sebagai indikator diskriminasi dalam mengukur toleransi beragama.

Dalam mengukur *social dominance orientation*, ada dua komponen yang diukur yaitu 1) dominansi, kecende-

rungan seseorang mendukung hierarki antar kelompok yang mendorong tindakan opresi ke kelompok yang dianggap subordinat dan (2) anti-egalitarianisme yaitu perlawanan terhadap adanya kesetaraan antar kelompok yang ditunjukkan dengan dorongan akan adanya *mindset* hierarki dalam kebijakan sosial (Hoddk, 2015). Komponen dominansi biasanya berhubungan dengan kecenderungan orang untuk beraksi secara aktif bahkan agresif dalam mempertahankan agar kelompok yang di bawah tetap di bawah sedangkan anti-egalitarianisme berhubungan dengan kecenderungan untuk menjadi konservatif dan mendukung kebijakan yang mempertahankan status quo mengenai *inequality*. Biasanya aksi orang yang anti-egalitarianisme ini lebih *subtle* dibanding komponen dominansi.

- **Pengukuran.**

Pengukuran toleransi dalam psikologi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai sikap hingga perilaku. Dalam studi ini intoleransi diukur dengan menggunakan skala sikap dengan mengacu pada alat ukur survei yang digunakan PPIM UIN Jakarta dalam riset Api dalam Sekam (Saputra, 2018a). Alat ukur survei PPIM ini menggunakan dua dimensi dalam mengukur toleransi yaitu opini dan intensi. Toleransi opini adalah opini partisipan terkait penganut agama/aliran agama lain sedangkan Toleransi intensi adalah intensi melakukan tindakan toleran terhadap orang penganut agama lain atau aliran lain di dalam agama Islam. Selain itu, di alat ukur ini juga memisahkan toleransi terhadap internal (individu dari kelompok agama yang sama namun berbeda aliran) dan toleransi terhadap eksternal (individu dari kelompok agama yang berbeda). Dalam menanyakan toleransi internal, Peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada individu mengenai kelompok aliran agama yang dianggap menyimpang. Dalam menanyakan toleransi, Peneliti meminta partisipan membayangkan dirinya berinteraksi dengan individu dari aliran agama yang dianggap menyimpang tersebut. Setiap aitem diberikan pilihan jawaban 4 skala dari sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Contoh *item* untuk toleransi opini terhadap eksternal adalah, “Indonesia akan

menjadi negara yang lebih baik jika semua penduduknya mempunyai agama yang sama dengan yang dianut oleh Bapak/Ibu”, sedangkan untuk internal adalah, “*“Pengikut kelompok keagamaan yang menyimpang tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi pejabat publik di daerah Ibu/Bapak tinggal.”* Contoh item toleransi intensi terhadap kelompok eksternal adalah *“Mengajak orang lain untuk tidak memberikan ucapan hari raya bagi pemeluk agama lain (seperti Selamat Idul Fitri, Selamat Natal atau Selamat Waisak) kepada orang berbeda agama.”*, sedangkan yang ditujukan untuk internal adalah *“Menandatangani petisi menolak dosen PNS pengikut kelompok yang dianggap menyimpang.”*

Dalam mengukur empati, Peneliti mengadaptasi alat ukur *socioethnocultural empathy* dari Wang dkk (2003) dengan memasukkan konteks hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Mengacu pada penelitian Api dalam Sekam (Saputra, 2018a) konteks eksternal dan internal cukup penting sehingga adaptasi *societhnocultural empathy* juga mengacu pada hal ini. Dalam mengadaptasi empati untuk eksternal, kelompok agama lain yang dipakai adalah pemeluk agama kristen, mengingat sejarah panjang Indonesia, untuk konflik dan hubungan antar pemeluk agama, biasanya melibatkan agama Kristen. Sedangkan untuk empati kepada kelompok internal, Peneliti menanyakan kelompok aliran agama Islam yang dianggap partisipan paling sesat untuk memicu konteks hubungan dirinya dengan pemeluk aliran tersebut dalam menjawab pertanyaan empati ini. Kelompok aliran agama yang ditanyakan adalah kelompok agama yang dinilai menyimpang atau dinilai kontroversial di masyarakat secara umum. Kelompok agama tersebut adalah Ahmadiyah, Syiah, Wahabbi/Salafi, Islam Liberal, Islam Nusantara, NII. Kelompok ini dimunculkan berdasarkan hasil diskusi dengan dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah. Untuk mengakomodir kelompok lainnya juga ditambahkan pilihan lainnya yang dijawab secara *open-ended*.

Sesuai dengan teori empati, peneliti mengambil komponen kognitif yang disebut *perspective taking* dan komponen empathic emotion atau afektif dalam penelitian ini.

Salah satu contoh aitem afektif eksternal dalam penelitian ini adalah *“Ketika saya mendengar orang memperolok agama Kristen, saya merasa tersinggung”* sedangkan untuk internal adalah *“Ketika saya mendengar orang memperolok aliran _____, saya merasa tersinggung”*. Contoh aitem untuk *perspective taking* untuk eksternal, *“Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai pemeluk agama Kristen di Indonesia”* dan untuk internal adalah *“Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai seseorang yang merupakan anggota aliran Ahmadiyah”*

Dalam mengukur *social dominance orientation*, Peneliti mengadaptasi skala *Social Dominance Orientation* ke-7 dari Ho dkk (2015). Dalam mengukur dominansi dan anti-egalitarianisme. Dalam membuat alat ukur ini, Ho dkk (2015) membuat aitem yang pro/searah dengan komponen yang diukur dan juga membuat aitem yang kontra dengan yang diukur (aitem *reverse*). Contoh aitem pro-dominansi adalah *“Beberapa kelompok seharusnya tetap berada pada status sosial mereka masing-masing, yang berstatus tinggi tetap tinggi dan yang rendah tetap rendah”*, sedangkan aitem kontra-dominansi adalah *“Kelompok yang status sosialnya rendah memiliki hak yang setara dengan kelompok yang status sosialnya tinggi.”* Untuk yang pro-anti egalitarianisme, contoh aitemnya adalah *“Kita seharusnya tidak mendukung terciptanya kesetaraan antar kelompok.”*, sedangkan untuk kontra-anti egalitarianisme adalah *“Kita harus berusaha memberikan kesempatan yang setara pada semua kelompok di masyarakat dalam meraih keberhasilan.”*

c) **Anti-Kekerasan**

- **Definisi.**

Indikator ini muncul dari fenomena adanya radikalisme dan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Di dalam studi-studi psikologi, kekerasan umumnya dikaitkan dengan perilaku dan sifat-sifat psikopatologis (Walker, 2005). Dalam kata lain, kaca mata yang paling umum dalam melihat bagaimana seseorang menggunakan, menjustifikasi, dan mendorong untuk melakukan kekerasan adalah kacamata

klinis yang melihat kekerasan sebagai sebuah ‘penyakit’ psikologis. Di dalam kerangka pencegahan ekstremisme berkekerasan, kekerasan tidak bisa dilihat sebagai suatu fenomena psikopatologis, tapi sebagai sebuah perilaku yang bisa dilakukan secara umum dan terdorong oleh motivasi ideologis. Pendekatan ini digunakan di dalam pengembangan model faktor-faktor resiko ideologi ekstremisme kekerasan, di antaranya yang digunakan dalam mengembangkan model BRAVE (Mirahmadi, 2016). Di dalam model tersebut, terdapat lima faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi resiko terpapar dan radikalisasi oleh ideologi ekstrimisme berkekerasan adalah: ideologi, kekecewaan politik (*political grievances*), ekonomi, dorongan sosiologis, dan faktor-faktor psikologis. Di dalam model ini sikap terkait kekerasan adalah aspek ideologis; bagaimana seseorang menjustifikasi kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, di dalam konteks radikalisme dan ekstremisme berkekerasan, dan moderasi beragama sebagai faktor resiliensi terhadap keduanya, konsep kekerasan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang digunakan di dalam model di atas, yaitu kekerasan sebagai bentuk upaya dalam bentuk verbal, fisik atau pikiran dalam rangka mencapai tujuan tertentu, utamanya perubahan sosial dan sistem politik. Maka dari itu, indikator yang merepresentasikan anti-kekerasan sebagai komponen dari moderasi beragama adalah keyakinan (*belief*) anti dalam penggunaan kekerasan dalam penyelesaian suatu masalah.

- **Pengukuran.**

Untuk mengukur *belief* anti-kekerasan kami menggunakan adaptasi dari alat ukur BRAVE (Grossman, et al., 2020). Alat ukur ini dikembangkan untuk menjadi instrumen asesmen resiliensi terhadap radikalisme dan ekstrimisme kekerasan dalam pendekatan BRAVE. Alat ukur ini terdiri dari 5 dimensi: *cultural identity and connectedness*, *bridging capital*, *linking capital*, *violence-related behaviors*, dan *violence-related beliefs*. Skala ini ditemukan berkorelasi dengan berbagai alat ukur lain terkait dengan perilaku problematik, resiliensi, dan, yang paling relevan dalam studi ini, sikap tentang kekerasan, yang diukur menggu-

nakan MVQ (Grossman, et al., 2020). Kami mengadaptasi dua dimensi terakhir, *violence-related behaviors* dan *violence-related beliefs*. Contoh aitem dari *violence-related behavior* adalah “Saya bersedia bersuara secara terbuka untuk menentang kekerasan yang terjadi komunitas saya”, dan contoh *violence-related beliefs* “Orang-orang terdekat saya menganggap wajar anak muda yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah”.

2.3 Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi

Kondisi moderasi beragama *civitas academica*, tidak lepas dari bagaimana institusi Perguruan Tinggi dalam hal ini PTKIN mengarusutamakan moderasi beragama. Kapasitas PTKIN itu sendiri yang akan memengaruhi bagaimana *mainstreaming* moderasi beragama dan menelaah kapasitas itu yang difokuskan untuk mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan. Kapasitas Institusi PTKIN dapat diartikan sebagai sejauh mana kompetensi yang dipunya PTKIN dalam hal tertentu.

Kapasitas Perguruan Tinggi (PT) tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh pengukuran kapasitas atau kompetensi Perguruan Tinggi adalah dengan menggunakan SERVQUAL yang mendeteksi *gap* antara persepsi terhadap layanan yang diberikan PT dengan ekspektasi untuk layanan tersebut (Donlagic & Fazlic, 2015). Aspek yang diukur adalah (1)*Tangibility* (evaluasi terhadap hal yang nyata), (2)Reliabilitas (servis yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan), (3) Responsibility (Staf PT merespon jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan), (4) *Assurance* (kredibilitas dari staf) dan (5) *Empathy* (menghormati dan menghargai mahasiswa). Dalam menghadapi isu multikultural, Pope & Reynolds (1997) mengidentifikasi 7 kompetensi inti yang harus dipunya PT dalam menghadapi isu multikultural yaitu (1) Kemampuan Administrasi dan Manajemen (2)Kesadaran, Kemampuan dan Pengetahuan Multikultural, (3)Menolong dan Hubungan Interpersonal, (4) Asesmen dan Evaluasi, (5)Mengajar dan Pelatihan, (6)Pengalaman Etika dan Legal dan (7) Teori dan Menerjemahkannya. Pendekatan asesmen lain dalam pengukuran kapasitas perguruan tinggi adalah *Institutional Capacity Assessment Tool* (ICAT) yang membantu

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk ditingkatkan dalam tujuh area yaitu (1) Pengajaran dan Pembelajaran, (2) *Engagement* dan Komunikasi, (3) Strategi dan Perencanaan, (4) Kebijakan dan Praktik, (5) Kepemimpinan dan Visi, (6) Data dan Teknologi, dan (7) Kesetaraan (Manning, 2016).

Di Indonesia, dalam menjaga kualitas PT, merujuk pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat tiga jenis Standar Nasional yang harus dimiliki oleh Pendidikan Tinggi yaitu (1) Standar Nasional Pendidikan, (2) Standar Penelitian dan (3) Standar Pengabdian Masyarakat. Merujuk kepada ICAT, maka sebagai organisasi, perlu juga diidentifikasi aspek strategi dan perencanaan, kebijakan serta aspek visi dan kepemimpinan dalam PTKIN untuk *mainstreaming* moderasi beragama (Manning, 2016). Semua aspek ini dilihat dalam bingkai Budaya Organisasi. Yang terakhir, selain PTKIN sebagai organisasi, PTKIN juga merupakan ekosistem tempat dimana mahasiswa beraktivitas, bukan hanya belajar tetapi juga mengikuti organisasi/aktivitas kemahasiswaan. Hal-hal inilah yang menurut tim peneliti perlu dieksplorasi dalam mengetahui praktik yang sudah dilakukan PTKIN dalam *mainstreaming* moderasi beragama.

Dalam Pendidikan dan Pengajaran. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam hal pendidikan dan pengajaran menurut Saidurrahman (2019). Pembaharuan kurikulum haruslah menelaah *skills* apa yang relevan dimiliki oleh lulusan PTKIN. Pembaharuan kurikulum haruslah turun ke dalam mata kuliah dan metode pembelajaran (Saidurrahman, 2019). Adapun Saidurrahman (2019) merasa perlu adanya mata kuliah pendekatan dalam pengkajian Islam yang menekankan pendekatan Ijtihad. Dosen dan Pengajar juga merupakan faktor penting dalam Topik Pendidikan dan Pengajaran. Mujahidin (2019) menyatakan pentingnya pemetaan bagi dosen dan pengajar yang menyebarkan *hate speech* karena dikhawatirkan nilai-nilai tersebut menjadi tersosialisasi di kalangan mahasiswa. Kompetensi dosen dalam mengajar juga menjadi penting. Mujahidin (2019) proses belajar yang menekankan pada dialog, komunikasi dan berargumentasi dalam kelas juga sangat penting bagi mahasiswa melatih validitas pengetahuan dan melatih landasan berpikir. Suharto (2019) juga menyatakan dalam mempelajari Hukum atau Fiqih Islam, dosen juga tidak berfokus pada teks, tetapi menekankan analisis pada teks pada

realitas di masyarakat. Yang terakhir, pendidikan dan pengajaran hendaknya tidak hanya membangun pengetahuan tetapi juga *soft-skill* mahasiswa dengan meningkatkan kepedulian terhadap isu sosial (Saidurrahman, 2019)

Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pope & Reynolds (1997) menyatakan jika PT, khususnya urusan kemahasiswaan, sudah berkomitmen pada nilai multikultural, maka penelitian dalam topik ini haruslah sejalan dengan tema tersebut, khususnya untuk mengidentifikasi apakah pelatihan atau program efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam topik multikultural. Sehubungan dengan topik moderasi beragama, maka perlu diidentifikasi apakah PT sudah menginvestasikan topik penelitian terhadap topik moderasi beragama. Mujahidin (2019), penelitian, terutama di PT itu sendiri menjadi penting untuk mengetahui secara objektif kondisi moderasi beragama, apa yang menjadi kekuatan dan tantangan untuk merancang program berikutnya. PT juga bisa menargetkan objek lain untuk diteliti yang memang penting dalam sosialisasi moderasi beragama seperti pesantren dan madrasah (Mujahidin, 2019). Dalam hal pengabdian masyarakat, perlu diketahui bahwa *civitas academica* dalam hal ini mahasiswa memegang peranan penting dalam mensosialisasikan mengenai moderasi beragama. Mujahidin (2019) menyatakan bahwa mahasiswa bisa mulai mempromosikan moderasi lewat aktivitas di media sosial. Dengan meningkatkan kepedulian sosial, *civitas academica* juga diharapkan bisa mengarahkan pengabdian masyarakat yang mengarahkan kepada kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera (Saidurrahman, 2019).

Dalam Budaya Organisasi PTKIN. Sebagai sebuah lembaga, setiap PTKIN mempunyai visi dan misi yang ingin diwujudkan. Pemahaman apakah visi dan misi yang ada sudah mendukung moderasi beragama bisa menjadi hal yang bisa dieksplorasi. Selain, Visi dan misi, sesuai indikator ICAT, kita juga bisa menelaah strategi dan perencanaan, termasuk di dalamnya anggaran dalam PTKIN untuk mendukung moderasi beragama serta kebijakan dan praktis lain yang relevan (Manning, 2016). Selain itu, bisa diidentifikasi pula siapa *leader* yang potensial dalam mendukung *mainstreaming* moderasi beragama. Untuk memastikan berjalannya moderasi beragama, perlu dikaji lebih jauh apakah struktural yang mendukung hal ini. Berdirinya rumah moderasi beragama di PTKIN bisa dimasukkan ke dalam bagian dari dukungan di bidang struktur karena

Rumah Moderasi Beragama merupakan lembaga yang ditunjuk untuk membawa agenda moderasi di PTKIN. Evaluasi efektivitas jalannya rumah moderasi beragama ini juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas institusi dalam *mainstreaming* moderasi beragama.

Dalam Kegiatan Kemahasiswaan. Selain belajar di dalam kelas, PTKIN juga dipenuhi oleh kegiatan akademik dan non-akademik lain yang dapat diikuti oleh *civitas academica*, baik yang diadakan oleh lembaga PTKIN atau organisasi kemahasiswaan lain. Ketika mahasiswa masuk jenjang PT, lazim untuk mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Mujahidin (2019) menyatakan pengenalan moderasi beragama di PTKIN bisa dimulai dari tahap ini dengan pengenalan nilai kampus yang moderat. Kegiatan kemahasiswaan lain bisa juga berupa seminar, webinar dan konferensi yang mengusung tema moderasi beragama. Selain di institusi PT, mahasiswa juga berinteraksi secara sosial dan adanya pembentukan nilai yang tidak lepas dari pengaruh organisasi mahasiswa. Mujahidin (2019) juga menyatakan pentingnya penataan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan, dimana harusnya diorientasikan pada penguatan moderasi, agar iklim organisasi kemahasiswaan bisa selaras dengan PTKIN yang mendukung dan memfasilitasi tumbuhnya pemahaman dan kultur budaya moderat dan damai.

BAB III

Studi Baseline

3.1 Pelaksanaan Persiapan Penelitian dan Instrumen Alat Ukur

Workshop

Workshop dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli 2020 yang dibagi ke dalam 4 sesi. *Workshop* diadakan dengan tujuan (1) mendiskusikan alat ukur yang telah dibuat dan awal mula desain rencana intervensi dan (2) pendekatan awalan dan izin terhadap pihak rektorat UIN yang menjadi tempat penelitian. Maka dari itu dalam *workshop* ini narasumber yang diundang selain narasumber yang sifatnya ekspertis, diundang juga Rektor dari ke-3 UIN yang menjadi target penelitian. Selain meminta izin pelaksanaan penelitian, seperti kasus di UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Sunan Kalijaga dimana tim peneliti tidak mempunyai pengetahuan akan kondisi lapangan, maka tim peneliti juga meminta Rektor untuk menugaskan pihak yang dapat menjadi tim peneliti PTKIN, yang akan membantu proses penelitian secara teknis.

Selain pihak rektorat, narasumber lain yang diundang adalah (1) Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag., Direktur Pendidikan Tinggi Islam (yang pada waktu itu menjabat), (2) Burhanuddin Muhtadi, Ph.D, yang akan memberikan masukan mengenai mengenai Desain dan Instrumen Penelitian dan (3) Dr. Ichsan Malik, M.Si, Dosen Fakultas Psikologi UI, yang akan memberikan masukan mengenai *capacity building* dan *technical assistance*. Selain tim peneliti, *workshop* juga dihadiri oleh pihak PMU Convey.

Dari *workshop* diperoleh gambaran awal terkait dengan kondisi awalan di tiap UIN. UIN Syarif Hidayatullah lebih menekankan kepada integrasi ilmu sedangkan UIN Sunan Kalijaga lebih menekankan kepada *diversity*. Terkait dengan adanya rumah moderasi beragama, pada waktu *workshop* diadakan, baru UIN Sunan Gunung Djati yang secara formal membentuk Rumah Moderasi Beragama yang dilengkapi dengan fasilitas gedung serta modul yang sedang disusun.

Dari segi desain penelitian, ada masukan juga mengenai randomisasi yang dilakukan bukan rata di tiga jenis fakultas, tetapi *proporsinya* sesuai dengan jumlah populasi. Selain itu, jaga-jaga jika target partisipan *key actors* akan didominasi laki-laki, maka harus ada afirmasi dengan adanya kuota untuk gender perempuan. Di akhir pengambilan data juga akan dilakukan proses *debriefing*.

Ada juga diskusi mengenai pendekatan definisi moderasi beragama yang dipakai. Karena moderasi beragama secara harfiah berarti di tengah, maka ada masukan terkait identifikasi ekstrem yang kanan dan kiri. Ada masukan juga terkait dengan mengukur *ushul fiqih* individu. Walau setelah didiskusikan, akhirnya pendekatan yang dipakai adalah mengukur moderasi beragama dalam lingkup hubungan sosial dan dari indikator Kementerian Agama, mengidentifikasi turunan perilaku yang dianggap menggambarkan sikap dan perilaku di tengah. Ada masukan lain terkait instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pelaksanaan *capacity building* dan *technical assistance*. Setelah *workshop* selesai, masukan tersebut didiskusikan oleh tim peneliti, dan masukan yang diterima segera diaplikasikan dengan revisi di instrumen kuantitatif dan kualitatif. Berikut rangkuman dari masukan dan respon dari tim peneliti:

Tabel 2. Rangkuman Masukan dari Workshop dan Tindak Lanjut

Hal	Tema	Masukan	Tindak Lanjut Tim Peneliti
Instrumen Kuantitatif	Uji Keterbacaan	Instrumen memerlukan uji keterbacaan sebelum ambil data	Uji Keterbacaan akan dilakukan
	Indikator Komitmen Kebangsaan	Definisinya bisa diperluas dengan “Mengukur penerimaan konsensus negara à jika ada hal yang tidak puas, tetap berperilaku dalam koridor yang telah dilakukan”	Diterima, aitem akan direvisi sebelum uji keterbacaan
		Aitem dimensi trust: <ul style="list-style-type: none"> • Ditambah <i>vignette</i> dan <i>framing</i> konteks cerita (misal institusi kepolisian: orang grebek diskotek karena nggak sesuai ajaran agama, atau seberapa setuju Anda dengan perilaku tsb?) • Bisa diukur dengan demokrasi sebagai sistem dan <i>democracy satisfaction</i> 	
		Aitem dimensi <i>expected political participation</i>: <ul style="list-style-type: none"> • Mungkin ditambah term ‘masa depan’ untuk memperjelas periode waktu. • Berpartisipasi aktif di dalam partai politik: • Bisa dikasih contoh partisipasi aktifnya atau • Yang partai politik dihapus dan pada aitem yang bergerak di isu politik akan diberikan contoh dalam kurung (partai politik, LSM, dll) 	Diterima, aitem akan direvisi sebelum uji keterbacaan
		Memasukkan konteks Pemira:	Konteks pemira tidak bisa dimasukkan agar aitem bisa juga bisa dipakai oleh pihak yang bukan mahasiswa. Usul lain adalah dapat dijadikan kontrol dan diarahkan keaktifan di lembaga kemahasiswaan à ada skala yang mengukur keaktifan tersebut

	Variabel Opini terhadap Ekstremisme Kekerasan	Revisi aitem: Menangani orang yang melenceng dari agama Bapak/Ibu dengan menggunakan kekerasan	Diterima, aitem akan direvisi sebelum uji keterbacaan
	<i>Diversity</i>	Bisa dimasukkan di demografi, apakah punya teman dari agama lain	Diterima, aitem akan ditambahkan
	<i>Gender</i>	Memasukkan aitem yang mengukur persepsi terkait <i>gender</i>	Diterima, aitem akan ditambahkan
Instrumen Kualitatif	Aitem Instrumen	Wawasan Keislaman di PTKIN: Eksplorasi wawasan keislaman à dekat dengan konservatif, liberal atau moderat	Agak sulit mengukur hal ini, apalagi jika FGD dilakukan secara daring dengan waktu yang terbatas
		<i>Gender</i> : Menggali peran-peran perempuan dalam moderasi beragama	Diterima, aitem ini akan dimasukkan
	Fasilitator FGD	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan fasilitator yang kredibel dan berpengalaman à membuat partisipan mau berbicara. • Dari peneliti PPIM Jakarta mungkin bisa mendampingi saat proses FGD yang dilakukan penlok • Perlu adanya briefing untuk fasilitator sebelum mengadakan FGD 	Diterima, akan dimasukkan ke dalam manual pelaksanaan FGD
<i>Capacity Building dan Technical Assistance</i>	Target Intervensi	Usulan: Intervensi di UIN fokus dosen, kurikulum dan kapasitasnya yang ada dalam institusinya	Usulan akan dipertimbangkan dalam rencana intervensi dan <i>capacity building</i>
	Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan moderasi beragama sebagai visi sehingga dapat dijadikan <i>value</i> yang dipunya kegiatan intervensi 	

	Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya tahapan refleksi (<i>monitoring</i> dan evaluasi) • Libatkan karakter yang beragam dalam program intervensi • Melibatkan kembali perempuan sebagai <i>key actor</i> • Menjaga <i>sustainability</i> dengan mengajak partisipasi aktif dari target intervensi. 	
--	----------------------	---	--

3.2 Uji Keterbacaan

a. Metode Uji Keterbacaan

Masukan dari pelaksanaan *Workshop* adalah melaksanakan uji keterbacaan pada aitem-aitem yang telah disusun, terutama pada jenis partisipan mahasiswa. Uji keterbacaan biasanya dilakukan dengan wawancara ke partisipan dalam menelaah pemahaman partisipan tentang aitem-aitem dalam alat ukur. Karena situasi Covid-19 yang membatasi interaksi secara tatap muka, dan dikhawatirkan jika wawancara secara daring akan membuat lelah partisipan uji keterbacaan, maka dalam penelitian ini, alternatif yang dilakukan adalah melakukan uji keterbacaan dengan menggunakan metode Response Process Evaluation (RPE) dari Wolf, Elliot, Maul dan Taves (2019). Dalam metode RPE, setiap aitem divalidasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan *open-ended* untuk mengetahui pemahaman partisipan atau bagaimana partisipan menginterpretasi aitem tersebut. Pertanyaan itu disebut Meta Questions. Jawaban dari Meta Questions ini akan menjelaskan bagaimana proses dari respon yang diberikan partisipan ketika mereka membaca dan mengerjakan aitem. Contoh dari Meta Questions yang diberikan adalah (Wolf dkk, 2019):

- a. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan _____ (tanyakan kata atau frasa yang mungkin sulit dimengerti oleh partisipan yang ada dalam aitem tersebut)?
- b. Menurut Anda, apa maksud dari aitem ini secara keseluruhan?
- c. Berdasarkan pemahaman Anda terhadap aitem tersebut, mohon berikan contoh pengalaman apakah Anda pernah mengalami kondisi/situasi tersebut atau tidak?

- d. Bagaimana Anda merespon aitem tersebut?
- e. (merujuk ke pilihan jawaban yang tersedia) Jika ini adalah respon pilihan jawaban yang ada, mana yang akan Anda pilih?

Dari respon yang diberikan oleh partisipan uji keterbacaan, peneliti akan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian apakah respon partisipan sudah memahami dan mengerjakan aitem sesuai tujuan dari aitem tersebut. Proses dari menanyakan dan mengevaluasi dapat dilakukan beberapa kali sebanyak yang diperlukan.

Uji keterbacaan ini dilakukan secara daring. Proses interview diganti dengan membuat peserta menjawab *meta questions* secara tertulis. Karena jumlah aitem yang sangat banyak dan dikhawatirkan ada faktor kelelahan dalam mengisi aitem sehingga memengaruhi kualitas jawaban, maka Peneliti membagi alat ukur yang ada menjadi ke beberapa versi sebagai berikut:

Tabel 3. Rancangan Uji Keterbacaan

No	Versi	Pengukuran	Jumlah Aitem	Jumlah Partisipan
1.	Versi A	Komitmen Kebangsaan bagian I Demografi	23 aitem 12 aitem	3 mahasiswa
2.	Versi B	Komitmen Kebangsaan bagian II Demografi	20 aitem 12 aitem	3 mahasiswa
3.	Versi C	Toleransi - Empati bagian I Demografi	22 aitem 12 aitem	3 mahasiswa
4.	Versi D	Toleransi-Empati bagian II Demografi	25 aitem 12 aitem	3 mahasiswa
5.	Versi E	Rujukan Toleransi - <i>Social Dominance Orientation</i> Demografi	10 aitem 17 aitem 12 aitem	3 mahasiswa

6.	Versi F	Anti Kekerasan - BRAVE Opini terhadap Radikalisme Demografi	5 aitem 14 aitem 12 aitem	3 mahasiswa
7.	Versi G	Seluruh instrumen	120 aitem	2 mahasiswa 2 dosen

Untuk versi A sampai versi F dibuat untuk menanyakan pemahaman partisipan mahasiswa terkait aitem sedangkan Versi G dilaksanakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen dalam menyelesaikan satu instrumen tersebut. Pelaksanaan dalam satu sesi disepakati hanya dilakukan 2 versi agar tidak terjadi kebingungan dalam membagikan versi dan perbedaan jumlah aitem tidak terlihat jauh. Meta Questions yang ada tidak semua ditanya, namun dipilih dengan detail sebagai berikut:

- a. Menurut Anda, apa sebenarnya yang ditanyakan oleh pertanyaan ini?
- b. Bagaimana respon Anda dalam menjawab pertanyaan ini?
- c. Jika Anda diminta untuk memilih jawaban [Sangat Tidak Setuju/Tidak Setuju/Setuju/Sangat Setuju]*, jawaban mana yang akan Anda pilih?
- d. Jika Anda tidak memahami item ini, mohon jelaskan bagian mana yang sulit untuk Anda pahami dan berikan saran perbaikan.
- e. Ditanyakan khusus untuk aitem bagian rujukan: Menurut Anda, apa tujuan peneliti menanyakan pertanyaan ini?

Secara total dibutuhkan 20 partisipan mahasiswa dan 2 partisipan dosen. Setiap jenis partisipan akan dibagi secara rata 50:50 untuk kuota perempuan dan laki-laki. Partisipan untuk uji keterbacaan ini masuk ke dalam *non-probability sampling* yaitu *incidental sampling*. Partisipan diundang ke dalam *zoom-meeting* lalu di *briefing* mengenai bagaimana cara mengisi pertanyaan tersebut. Setelah mendapat penjelasan (*briefing*), partisipan lalu diberikan link *limesurvey* sesuai dengan pembagian versi di atas. Lalu setelah partisipan selesai, akan dilakukan *debriefing* mengenai tujuan dari survei ini.

b. Pelaksanaan Uji Keterbacaan

Uji Keterbacaan dilaksanakan dua hari berturut-turut terdiri dari 3 sesi pertama di hari pertama dan 2 sesi di hari kedua. Jadwal pelaksanaan uji keterbacaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jadwal Uji Keterbacaan

No	Hari, Tgl.	Jam Pelaksanaan	Versi	Jumlah Partisipan
1.	Kamis, 6 Agustus 2020	Versi A dan Versi B	10.00-12.00	6 partisipan
2.	Kamis, 6 Agustus 2020	Versi C dan Versi D	13.00-15.00	5 partisipan
3.	Kamis, 6 Agustus 2020	Versi E dan Versi F	15.00-17.00	7 partisipan
4.	Jumat, 7 Agustus 2020	Versi B, Versi C, dan Versi G	09.30-11.30	5 partisipan
5.	Jumat, 7 Agustus 2020	Versi G	13.30-15.30	2 partisipan

Dalam pelaksanaannya, ada tambahan 1 partisipan laki-laki dan 1 partisipan perempuan pada sesi jam 09.30-11.30 di Jumat, 7 Agustus 2020 untuk menggantikan partisipan satu partisipan pada versi B dan versi C di sesi sebelumnya yang dinilai tidak memberikan respon yang serius dalam menjawab pertanyaan. Pada pengerjaan versi G, untuk mahasiswa periode pengerjaannya antara 35-47 menit sedangkan pada dosen, waktu pengerjaannya antara 40 menit-120 menit. Untuk partisipan dosen yang sampai 120 menit memang ada kendala di individu dosen yang memang kesulitan membaca menggunakan gawai dan juga pengerjaan dilakukan sambil melakukan kegiatan lain.

c. Revisi dari Hasil Uji Keterbacaan

Hasil dari respon peserta dibagikan ke 3 orang peneliti untuk dinilai apakah peserta memahami atau tidak maksud dari aitem tersebut. Dua partisipan yang dianggap tidak merespon dengan baik pada masing-masing versi B dan versi C, jawabannya tidak diikuti dalam analisis. Mayoritas aitem yang nilainya 100% dianggap dimengerti oleh responden dan tidak mengalami revisi, namun beberapa aitem direvisi sebagai penguatan dan penajaman konteks maksud dari aitem tersebut. Untuk aitem yang nilainya 67% ke bawah, didiskusikan kembali

di internal peneliti untuk direvisi agar lebih dimengerti. Adapun beberapa revisi yang diajukan adalah sebagai berikut

Tabel 5. Revisi Pasca Uji Keterbacaan

No	Indikator	Aitem Lama	% Paham	Aitem Revisi
1.	Komitmen Kebangsaan	Berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas untuk mempromosikan hak asasi manusia	67%	Berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas untuk menyuarkan hak asasi manusia
2.		Terlepas dari performa pemerintahan saat ini, saya yakin bahwa sistem pemerintahan pusat di Indonesia harus tetap dipertahankan	67%	Terlepas dari apakah pemerintahan pusat pada periode sekarang itu baik atau buruk, saya yakin tidak ada alasan untuk mengubah sistem pemerintahan di Indonesia
3.		Terlepas dari performa pemerintah daerah di tempat saya tinggal, saya yakin bahwa keberadaan pemerintah daerah di tempat saya tinggal harus tetap dipertahankan	67%	Biarpun pemerintah daerah di tempat saya tinggal yang sekarang bukan pemerintahan yang terbaik, saya yakin keberadaan pemerintah daerah di tempat saya tinggal harus tetap dipertahankan
4.		Walau ada oknum-oknum yang menggunakan partai politik untuk kepentingan pribadi, partai politik tetap adalah lembaga yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia	33%	Partai politik adalah lembaga yang penting bagi demokrasi di Indonesia, walaupun tidak bisa dipungkiri banyak oknum yang menyalahgunakan posisinya di partai politik
5.		Walau ada anggota DPR yang menjalankan perannya dengan buruk, keberadaan DPR sebagai lembaga negara penting untuk dipertahankan	67%	Saya tetap percaya bahwa sistem perwakilan dalam bentuk DPR sangat penting bagi rakyat Indonesia, terlepas dari adanya anggota-anggota DPR yang menggunakan lembaga ini untuk kepentingan pribadi

6.		Berpartisipasi aktif di dalam serikat pekerja	67%	Mendaftar dan berpartisipasi aktif dalam organisasi serikat/ perhimpunan/persatuan pekerja di tempat Anda nanti bekerja
7.		Setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya sesuai aturan hukum yang berlaku	67%	Setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya sesuai aturan hukum yang berlaku
8.	Komitmen Kebangsaan	Saya merasa marah ketika pemeluk agama lain mengalami tindakan kriminal karena kebencian terhadap agama mereka	67%	Saya merasa marah ketika pemeluk agama lain menjadi korban kekerasan karena kebencian terhadap agama mereka
9.		Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai pemeluk agama lain	67%	Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai pemeluk agama minoritas di Indonesia
10.		Sulit bagi saya untuk merasa terhubung dengan kisah diskriminasi yang dialami pemeluk agama lain	67%	Ketika membaca mengenai diskriminasi yang dialami pemeluk agama lain, saya merasa terhubung dengan kisah-kisah mereka
11.		Sulit bagi saya untuk bisa menempatkan diri saya pada posisi pemeluk agama lain	67%	Sulit bagi saya untuk bisa melihat dari sudut pandang seorang pemeluk agama lain
12.		Kira-kira kelompok mana dari pilihan-pilihan ini yang sesuai dengan deskripsi di atas?	67%	Kira-kira kelompok atau aliran mana di antara pilihan ini yang Anda anggap memiliki ajaran yang menyimpang/ berbeda praktiknya dengan apa yang biasa Anda lakukan?
13.		Jika Anda tahu, mohon sebutkan praktik apa saja yang termasuk di dalam definisi di atas	67%	Jika Anda tahu, mohon sebutkan praktik atau ritual yang merupakan akomodasi dari budaya lokal dengan Islam
14.		Ketika saya mendengar orang memperolok kelompok aliran/paham tersebut, saya merasa tersinggung t	67%	Saya tidak peduli jika orang mengeluarkan pernyataan yang akan menyinggung kelompok/aliran tersebut

15.		Saya jarang berpikir mengenai dampak dari lelucon yang mengolok kelompok aliran/paham tersebut kepada pemeluknya	67%	Saya jarang berpikir mengenai dampak dari lelucon yang mengolok kelompok/aliran tersebut kepada pemeluknya
16.		Saya bisa merasakan frustrasi pemeluk aliran/paham tersebut yang berjuang melawan diskriminasi	67%	Saya bisa merasakan frustrasi pemeluk/aliran tersebut yang berjuang melawan diskriminasi
17.		Ketika ada kelompok pemeluk aliran/paham tersebut yang didiskriminasi, saya merasa harus mendukung mereka	67%	Ketika ada kelompok/aliran tersebut yang didiskriminasi, saya merasa harus mendukung mereka
18.		Saya merasa marah ketika ada pemeluk aliran/paham tersebut yang menerima ketidak-adilan karena agama yang dianut	67%	Saya merasa marah ketika ada anggota kelompok/aliran tersebut yang menerima ketidak-adilan karena agama yang dianut
19.		Saya merasa marah ketika pemeluk aliran/paham tersebut mengalami tindakan kriminal karena kebencian terhadap agama mereka	67%	Saya merasa marah ketika anggota kelompok/aliran tersebut menjadi korban kekerasan karena kebencian terhadap agama mereka
20.		Kita seharusnya tidak mengusahakan agar semua kelompok memiliki kualitas hidup yang sama.	100%	Kita seharusnya tidak melakukan usaha apapun yang bertujuan agar semua kelompok memiliki kualitas hidup yang sama
21.	Radikalisme Opini	Mendoakan orang yang meninggal karena ikut berperang untuk mendirikan negara berdasarkan agama yang Ibu/Bapak anut.	0%	Mendoakan orang yang meninggal dalam perjuangan untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia
22.		Menyumbang uang atau barang untuk perjuangan mendirikan negara berdasarkan agama yang Ibu/Bapak anut.	0%	Menyumbang uang atau barang untuk perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia
23.		Menganjurkan orang lain agar ikut berperang untuk mewujudkan negara berdasarkan agama yang Ibu/Bapak anut.	33%	Mengajak orang lain agar ikut berjuang untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia.

24.	Menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara berdasarkan agama yang Ibu/Bapak anut.	100%	Menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam.
25.	Menyebarkan pesan melalui media cetak, media sosial, atau media apapun yang mengajak orang untuk bergerak melawan musuh-musuh agama, termasuk dengan kekerasan	100%	Menyebarkan pesan melalui media cetak, media sosial, atau media apapun yang mengajak orang untuk bergerak melawan-orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam , termasuk dengan kekerasan
26.	Melawan musuh-musuh agama dengan kekerasan	100%	Melawan orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam dengan kekerasan
27.	Menangani orang yang melenceng dari agama Bapak/Ibu melalui kekerasan	100%	Menangani orang yang melenceng dari agama Islam melalui kekerasan
28.	Berlatih fisik untuk persiapan berjuang melawan musuh-musuh agama	67%	Berlatih fisik untuk persiapan berjuang melawan orang-orang yang melecehkan ajaran Islam

Konsolidasi Akhir Instrumen Kuantitatif

Untuk menentukan item-item final di dalam alat ukur yang akan dimasukkan ke analisis, kami melakukan *exploratory* dan *confirmatory factor analysis*. Analisis faktor dapat menguji dan memberikan gambaran faktor-faktor yang ada di dalam suatu skala. Faktor-faktor ini lah yang menjadi basis dalam penghitungan nilai untuk analisis model. Di dalam bagian ini akan dijelaskan faktor-faktor yang ditemukan melalui faktor analisis. Faktor analisis dilakukan dengan menggunakan data dari sampel utama, yaitu mahasiswa umum (N = 897), sebelum dilakukan pembersihan data untuk model regresi dalam analisis. Setelah penjelasan untuk masing-masing alat ukur, akan dijabarkan item-item yang masuk di setiap skala dan faktor.

Skala Empati Eksternal dan Internal

Hasil dari *exploratory factor analysis* menemukan bahwa empati eksternal terdiri dari dua faktor; empati afektif dan pengambil-

an perspektif. Empati afektif adalah faktor yang terdiri dari item-item terkait dengan respons afektif (mis. marah, sedih) terhadap diskriminasi yang dialami oleh penganut agama lain. Pengambilan perspektif merepresentasikan upaya individu untuk memahami pengalaman dan perasaan penganut agama lain. Karena kedua faktor ini memiliki korelasi yang tinggi ($r = .754$), diputuskan untuk menggabungkan keduanya menjadi faktor empati eksternal secara umum.

Tabel 6. Skala Empati Eksternal

Faktor	Kode	Item
Empati Afektif Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .911</i> <i>McDonald's Omega = .916</i>	EESxAff1	Ketika saya mendengar orang memperolok agama Kristen, saya merasa tersinggung
	EESxAff4	Saya bisa merasakan frustrasi pemeluk agama Kristen yang berjuang melawan diskriminasi
	EESxAff5	Ketika ada kelompok pemeluk agama Kristen yang didiskriminasi, saya merasa harus mendukung mereka
	EESxAff6	Saya merasa marah ketika ada pemeluk agama Kristen yang menerima ketidak-adilan karena agama yang dianut
	EESxAff7	Saya merasa marah ketika pemeluk agama Kristen menjadi korban kekerasan karena kebencian terhadap agama mereka
	EESxAff8	Ketika ada teman saya yang didiskriminasi karena agama dia Kristen, saya akan membela mereka
	EESxAff9	Saya merasa terganggu ketika pemeluk agama Kristen mengalami diskriminasi
	EESxAff10	Saya merasa tersentuh ketika menonton atau membaca tentang diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Kristen
	EESxAff12	Kemungkinan besar, saya akan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan hak untuk setiap pemeluk agama, termasuk agama minoritas seperti agama Kristen
	EESxAff14	Saya menghargai praktik keberagamaan yang dilakukan oleh umat Kristen
EESxAff15	Saya menunjukkan kepedulian ketika ada diskriminasi yang diterima oleh orang-orang Kristen	

Pengambilan Perspektif Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .841</i> <i>McDonald's Omega = .846</i>	EESxPer1	Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai pemeluk agama Kristen di Indonesia
	EESxPer2	Ketika membaca mengenai diskriminasi yang dialami orang-orang Kristen, saya merasa terhubung dengan kisah-kisah mereka
	EESxPer4	Saya tahu bagaimana rasanya menjadi satu-satunya pemeluk Kristen dalam komunitas agama mayoritas yg berbeda
	EESxPer5	Saya merasa terhubung dengan perasaan frustrasi pemeluk agama Kristen akibat diskriminasi yang mereka alami
	EESxPer7	Saya mengikuti informasi terbaru mengenai isu-isu sosial yang dialami oleh pemeluk agama Kristen

Skala empati internal ditemukan terdiri dari dua faktor. Pertama, empati umum adalah empati secara umum kepada penganut aliran yang dianggap sesat. Faktor ini pada dasarnya adalah faktor yang mencakup hampir semua item-item yang setara dengan empati afektif dan pengambilan perspektif di empati eksternal. Kedua, penolakan, adalah faktor yang menggambarkan sikap abai atau tidak nyaman terhadap penganut aliran lain dan diskriminasi yang mereka alami.

Tabel 7. Skala Empati Internal

Faktor	Kode	Item
Empati Umum Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .954</i> <i>McDonald's Omega = .955</i>	EESiAff10	Ketika saya mendengar orang memperolok agama Kristen, saya merasa tersinggung
	EESiAff40	Saya bisa merasakan frustrasi anggota kelompok/aliran tersebut yang berjuang melawan diskriminasi terhadap mereka
	EESiAff50	Ketika ada kelompok/aliran tersebut yang didiskriminasi, saya merasa harus memberi dukungan kepada mereka
	EESiAff60	Saya merasa marah ketika ada anggota kelompok/aliran tersebut yang menerima ketidak-adilan karena ajaran yang dianut
	EESiAff70	Saya merasa marah ketika anggota kelompok/aliran tersebut menjadi korban kekerasan karena kebencian terhadap aliran mereka

EESiAff80	Ketika ada teman saya yang didiskriminasi karena agama dia Kristen, saya akan membela mereka
EESiAff90	Saya merasa terganggu ketika anggota kelompok/aliran tersebut mengalami diskriminasi
EESiAff100	Saya merasa tersentuh ketika menonton atau membaca tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok/aliran tersebut
EESiAff110	Ketika saya melihat anggota kelompok/aliran tersebut menjadi pejabat publik, saya akan ikut merasa senang
EESiAff120	Kemungkinan besar, saya akan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan hak untuk setiap pemeluk agama, termasuk hak anggota kelompok tersebut
EESiAff130	Saya senang berbincang dengan anggota kelompok/aliran tersebut tentang ajaran yang mereka anut
EESiAff140	Saya menghargai praktik-praktik agama yang dilakukan oleh kelompok/aliran tersebut
EESiAff150	Saya menunjukkan kepedulian ketika ada diskriminasi yang diterima oleh anggota kelompok/aliran tersebut
EESiPer10	Mudah bagi saya untuk memahami bagaimana rasanya hidup sebagai seseorang yang merupakan anggota kelompok/aliran tersebut
EESiPer20	Ketika membaca mengenai diskriminasi yang dialami anggota kelompok/aliran tersebut, saya merasa terhubung dengan kisah-kisah mereka
EESiPer40	Saya tahu bagaimana rasanya menjadi satu-satunya orang yang berbeda kelompok/aliran dalam satu komunitas yang homogen kelompok/aliran agamanya
EESiPer50	Saya merasa terhubung dengan perasaan frustrasi anggota kelompok/aliran tersebut akibat diskriminasi yang mereka alami
EESiPer70	Saya mengikuti informasi terbaru mengenai isu-isu sosial yang dialami oleh anggota kelompok/aliran tersebut

Penolakan	EESiAff2O	Saya tidak peduli jika orang mengeluarkan pernyataan yang akan menyinggung kelompok/aliran tersebut
Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .617</i> <i>McDonald's Omega = .646</i>	EESiAff3O	Saya jarang berpikir mengenai dampak dari lelucon yang mengolok kelompok/aliran tersebut kepada anggotanya
	EESiPer6O	Saya merasa gelisah ketika berada di kerumunan orang-orang yang berbeda kelompok/aliran di dalam agama saya

Adaptasi SDO-7

Hasil dari *confirmatory factor analysis* dari SDO-7 yang telah diadaptasi menunjukkan nilai yang mendekati baik, dengan model faktor yang signifikan ($p < .001$), dan nilai fit index lain yang mendekati nilai rekomendasi (RMSEA = .145, CFI = .617, dan TLI = .554). Kedua faktor tidak berubah dari SDO-7 yang belum diadaptasi, namun di dalam kasus penelitian ini dibuat konsisten secara valensi: dominasi dan anti-egalitarianisme. Dominasi adalah faktor terkait justifikasi terhadap dominasi dari kelompok yang berstatus lebih tinggi ke yang lebih rendah, sedangkan anti-egalitarianisme merepresentasikan sikap anti-kesetaraan.

Tabel 8. Skala SDO

Faktor	Kode	Item
Dominasi Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .71</i> <i>McDonald's Omega = .69</i>	SDOTraDom1	Beberapa kelompok seharusnya tetap berada pada status sosial mereka masing-masing, yang berstatus tinggi tetap tinggi dan yang rendah tetap rendah
	SDOTraDom2	Mungkin merupakan hal yang baik jika terdapat kelompok tertentu yang berstatus sosial tinggi dan kelompok lainnya memiliki status sosial rendah.
	SDOTraDom3	Masyarakat yang ideal terdiri atas beberapa kelompok yang berstatus sosial lebih tinggi dan kelompok lain berstatus sosial lebih rendah.
	SDOTraDom4	Beberapa kelompok memiliki status sosial yang lebih rendah daripada kelompok-kelompok lainnya.
	SDOTraDom5	Kelompok yang status sosialnya rendah memiliki hak yang setara dengan kelompok yang status sosialnya tinggi.

	SDOTraDom6	Seharusnya tidak ada satu pun kelompok yang dominan dalam masyarakat.
	SDOTraDom7	Seharusnya, kelompok-kelompok dengan status sosial yang rendah boleh meningkatkan statusnya atau memperbaiki kondisinya
	SDOTraDom8	Dominasi suatu kelompok atas kelompok lain adalah sebuah prinsip yang buruk.
Anti-egalitarianisme	SDOAnEg1	Kita seharusnya tidak mendukung terciptanya kesetaraan antar kelompok.
Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .79</i> <i>McDonald's Omega = .73</i>	SDOAnEg2	Kita seharusnya tidak melakukan usaha apapun yang bertujuan agar semua kelompok memiliki kualitas hidup yang sama
	SDOAnEg3	Merupakan sebuah ketidakadilan membuat setiap kelompok menjadi setara.
	SDOAnEg4	Kesetaraan status antar kelompok tidak seharusnya menjadi tujuan utama kita.
	SDOAnEg5	Kita harus berusaha memberikan kesempatan yang setara pada semua kelompok di masyarakat dalam meraih keberhasilan.
	SDOAnEg6	Kita harus melakukan apapun yang kita mampu untuk menciptakan kesetaran antar kelompok
	SDOAnEg7	Sebesar apapun upaya yang dibutuhkan, kita harus berusaha memastikan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam hidup
	SDOAnEg8	Kesetaraan antar kelompok seharusnya menjadi cita-cita kita

Adaptasi BRAVE untuk Mengukur Anti-Kekerasan

Karena jumlah alat ukurnya yang sedikit, kami menggabungkan kelima item-item sikap anti-kekerasan BRAVE yang asalnya terdiri dari dua faktor (*violence-related behavior* dan *violence-related beliefs*) menjadi satu skala: anti-kekerasan.

Tabel 9. Skala Anti-Kekerasan

Faktor	Kode	Item
Anti-Kekerasan Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .617</i> <i>McDonald's Omega = .646</i>	BRABehav1	Saya bersedia bersuara secara terbuka untuk menentang kekerasan yang terjadi komunitas saya
	BRABehav2	Saya akan menentang secara langsung tindakan kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekat saya
	BRABelief1	Melakukan tindak kekerasan membantu saya menunjukkan betapa kuatnya diri saya
	BRABelief2	Melakukan tindak kekerasan membuat saya dihormati orang lain
	BRABelief3	Orang-orang terdekat saya menganggap wajar anak muda yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah

Adaptasi Civic Attitude and Behavior Scale untuk Mengukur Komitmen Kebangsaan

Skala *Civic Attitude and Behavior Scale* yang telah diadaptasi ditemukan memiliki beberapa faktor melalui *exploratory factor analysis*. Pertama, dinamakan faktor politik praktis, merepresentasikan seberapa penting seseorang menilai partisipasi aktif di dalam politik, misalnya dengan menjadi kandidat pejabat publik. Kedua, faktor yang dinamakan aktivisme, adalah faktor yang menggambarkan sikap atau intensi untuk berpartisipasi di dalam gerakan-gerakan aktivisme atau menjadi relawan gerakan sosial. Ketiga, kewarganegaraan baik, menggambarkan tanggung jawab individual sebagai warga negara, seperti tanggung jawab kepada keluarga atau etika dalam berhubungan dengan sesama warga negara. Keempat, faktor kepercayaan kepada institusi pemerintahan. Faktor ini menunjukkan seberapa percaya seseorang terhadap sistem atau institusi pemerintahan. Kelima dan keenam, item-item terkait keinginan untuk ikut memberikan suara di pemilu daerah dan nasional. Terakhir, item-item baru mengenai seberapa setuju partisipan dengan konsep-konsep hak asasi manusia yang dijawantahkan di Undang-Undang Dasar.

Tabel 10. Adaptasi Civic Attitude and Behavior Scale

Faktor	Kode	Item
Politik Praktis Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .866</i> <i>McDonald's Omega = .873</i>	CASImpCC2	Bergabung dengan partai politik
	CASActiPP1	Membantu kampanye kandidat atau partai yang berpartisipasi dalam pemilu
	CASActiPP2	Berpartisipasi aktif di dalam partai politik
	CASActiPP3	Mendaftar dan berpartisipasi aktif dalam organisasi serikat pekerja
	CASActiPP4	Berpartisipasi sebagai kandidat dalam pemilihan umum daerah
	CASActiPP5	Berpartisipasi aktif di dalam organisasi yang bergerak di isu politik atau sosial
Aktivisme Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .761</i> <i>McDonald's Omega = .761</i>	CASImpCC6	Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi politik
	CASImpSM1	Berpartisipasi dalam protes damai untuk menolak undang-undang yang dipercaya tidak adil
	CASImpSM2	Berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial untuk membantu orang-orang di lingkungan saya
	CASImpSM3	Berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas untuk menyuarakan hak asasi manusia
	CASImpSM4	Berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas untuk melestarikan alam
Kewarganegaraan Baik Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .714</i> <i>McDonald's Omega = .719</i>	CASImpPR2	Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
	CASImpPR3	Memastikan keluarga Anda mapan secara ekonomi
	CASImpPR4	Berupaya secara pribadi untuk melindungi alam (misalnya melalui menghemat air dan melakukan daur ulang sampah)
	CASImpPR5	Menghormati hak-hak orang lain untuk memiliki opininya masing-masing
	CASImpPR6	Membantu orang-orang yang kurang beruntung dari Anda
	CASImpPR7	Terlibat dalam kegiatan yang menolong komunitas marjinal

Kewarganegaraan Baik Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .714</i> <i>McDonald's Omega = .719</i>	CASTrustPI1	Terlepas dari apakah pemerintahan pusat pada periode sekarang itu baik atau buruk, saya yakin tidak ada alasan untuk mengubah sistem pemerintahan di Indonesia
	CASTrustPI2	Biarpun pemerintah daerah di tempat saya tinggal yang sekarang bukan pemerintahan yang terbaik, saya yakin keberadaan pemerintah daerah di tempat saya tinggal harus tetap dipertahankan
	CASTrustPI3	Walaupun ada oknum yang mencoreng kinerja lembaga peradilan, keberadaan lembaga peradilan di Indonesia harus dipertahankan
	CASTrustPI4	Lembaga kepolisian adalah lembaga yang harus dipertahankan, walau ada oknum yang tidak baik
	CASTrustPI5	Partai politik adalah lembaga yang penting bagi demokrasi di Indonesia, walaupun tidak bisa dipungkiri banyak oknum yang menyalahgunakan posisinya di partai politik
	CASTrustPI6	Saya tetap percaya bahwa sistem perwakilan dalam bentuk DPR sangat penting bagi rakyat Indonesia, terlepas dari adanya anggota-anggota DPR yang menggunakan lembaga ini untuk kepentingan pribadi
Pemilu Daerah	CASElecP1	Menggunakan hak pilih dalam pemilu daerah
Pemilu Nasional	CASElecP2	Menggunakan hak pilih dalam pemilu nasional
UUD Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .622</i> <i>McDonald's Omega = .63</i>	CASAttER1	Setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya sesuai aturan hukum yang berlaku
	CASAttER2	Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak
	CASAttER4	Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan wajib mematuhi hukum
	CASAttER5	Setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya, sebatas dalam aturan hukum yang berlaku
	CASAttER6	Setiap warga negara berhak untuk beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut

Skala Opini Pro-Ekstremisme Kekerasan

Skala opini pro-ekstremisme kekerasan yang telah ditambahkan beberapa item ditemukan memiliki dua faktor: menegakkan syariat Islam dengan kekerasan dan pendirian negara Islam. Faktor per-

tama merepresentasikan sikap menjustifikasi cara-cara ekstrim atau berkekerasan dalam membela syariat Islam atau agama Islam itu sendiri, dan faktor kedua adalah item-item terkait dengan pendirian negara Islam melalui cara-cara ekstrim. Kedua faktor ini memiliki korelasi yang tinggi ($r = .757$) dan digabungkan di dalam analisis.

Tabel 11. *Opini Pro Ekstremisme Kekerasan*

Faktor	Kode	Item
Menegakkan Syariat Islam dengan Kekerasan Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .889</i> <i>McDonald's Omega = .888</i>	OpRad8	Menyebarkan pesan melalui media cetak, media sosial, atau media apapun yang mengajak orang untuk bergerak melawan-orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam , termasuk dengan kekerasan
	OpRad9	Melawan orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam dengan kekerasan
	OpRad10	Menggunakan kekerasan untuk melawan orang yang menyekutukan Allah swt.
	OpRad11	Berpartisipasi dalam aksi razia/sweeping tempat-tempat yang melanggar ajaran agama, seperti diskotek
	OpRad12	Memutuskan hubungan dengan anggota keluarga yang sudah tidak taat pada agama
	OpRad14	Berlatih fisik untuk persiapan berjuang melawan orang-orang yang melecehkan ajaran Islam
	OpRad21add	Menyerang aparat yang menghambat perlawanan terhadap orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam
	OpRad22add	Mengucilkan orang-orang yang tidak mau secara bersama-sama melawan orang-orang yang sudah melecehkan ajaran agama Islam
	OpRad23add	Memutuskan hubungan dengan rekan, handai tolan yang tidak mendukung penegakan Syariat Islam
Pendirian Negara Islam Reliabilitas <i>Chronbach's Alpha = .901</i> <i>McDonald's Omega = .901</i>	OpRad1	Mendoakan orang yang meninggal dalam perjuangan untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia
	OpRad2	Menyumbang uang atau barang untuk perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia
	OpRad3	Mengajak orang lain agar ikut berjuang untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia.

OpRad4	Menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam.
OpRad5	Melawan kebijakan negara yang melarang berdirinya negara Islam di Indonesia
OpRad6	Melawan kebijakan negara yang melarang berdirinya negara Islam di negara lain
OpRad17add	Menggunakan simbol dan atau slogan yang mendorong terbentuknya Negara Islam di Indonesia, seperti menggunakan bendera berlafadzkan Laa Ilaha Illallah

Alat Ukur Lainnya

Selain skala-skala di atas, terdapat beberapa alat ukur lain yang tidak digunakan di dalam analisis utama, dan item-item demografis serta *attention check*. Skala-skala lain termasuk adaptasi *ambivalent sexism scale* (Glick & Fiske, 1996), skala toleransi (API DALAM SEKAM/RANGKUL), dan adaptasi dari *social desirability scale* versi pendek (Strahan & Gerbasi, 1972). Beberapa pertanyaan terbuka juga digunakan di dalam kuesioner, sebagian untuk mengetahui opini terkait dengan konsep-konsep Islam dan kenegaraan (mis. UUD 1945, Khilafah), dan khusus untuk mahasiswa umum, diberikan pertanyaan mengenai mahasiswa dan dosen mana saja yang dijadikan rujukan terkait opini politik dan agama, serta teman-teman beda agama yang menjadi teman mereka berdiskusi. Untuk *attention check*, kami membuat tiga item berdasarkan *instructional attention check* (Oppenheimer, Meyvis & Davidenko, 2009).

3.3 Metode Penelitian Baseline

Penelitian *baseline* menggunakan *mixed-methodology* antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian *baseline* akan terdiri dari survei dan *focus group discussion*. Penelitian *baseline* memiliki tiga luaran. Luaran pertama adalah untuk melihat apa saja variabel yang memprediksi opini terkait ekstremisme berkekerasan di mahasiswa. Dengan melihat tingkat kekuatan prediksi variabel-variabel di dalam moderasi beragama dan kapasitas institusi untuk memastikan moderasi beragama menjadi karakteristik civitas akademik di PTKIN, program pembangunan kapasitas dapat disesuaikan untuk menysasar variabel yang paling penting untuk disasar. Luaran kedua adalah untuk mendapatkan gambaran konteks dari PTKIN

yang dijadikan target program. Penyusunan program pembangunan kapasitas perlu mempertimbangkan konteks lokal dari setiap PTKIN yang menjadi target agar program. Luaran ketiga adalah untuk melihat kondisi baseline dari variabel-variabel moderasi beragama di aktor kunci dan seberapa besar peran mereka dalam mempengaruhi moderasi beragama pada mahasiswa secara umum. yang menjadi subjek dari intervensi pembangunan kapasitas, dan seberapa besar peran mereka dalam mempengaruhi moderasi beragama pada mahasiswa secara umum. Mengetahui aspek ini akan membantu dalam tahap penyusunan dan evaluasi program.

3.3.1 Metode Kuantitatif

Partisipan

Survei *baseline* akan dilakukan kepada populasi mahasiswa dan non-mahasiswa, yang meliputi dosen, tenaga pendidik, dan pejabat dekanat. Kedua populasi ini akan diambil dari setiap fakultas di masing-masing PTKIN. Populasi partisipan mahasiswa dibagi menjadi dua, yaitu mahasiswa umum dan mahasiswa *key actor*. Pengambilan sampel untuk populasi mahasiswa umum dilakukan dengan metode *stratified random sampling*, mahasiswa akan secara acak diambil dari sub-kelompok fakultas dan tingkat (tahun ke-1 hingga tahun ke-3). Kuota sampel per fakultas ditentukan secara proporsional, mengikuti jumlah populasi di fakultas dibandingkan jumlah total mahasiswa di PTKIN tersebut. Mahasiswa *key actor* direkrut dengan merujuk ke jawaban mahasiswa umum mengenai nama-nama teman-temannya yang dianggap berpengaruh terhadap opini terkait politik dan wawasan agama. Mahasiswa *key actor* yang direkrut menjadi sampel dipilih berdasarkan urutan yang paling banyak dirujuk. Bagi populasi non-mahasiswa, pengambilan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan target partisipan yang dianggap relevan, seperti pejabat bidang akademik dan kemahasiswaan.

Untuk membuat estimasi jumlah sampel yang diperlukan, peneliti membuat kalkulasi menggunakan G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). Berdasarkan perhitungan *power* untuk analisis *linear multiple regression* dengan 4 prediktor, mengikuti jumlah komponen moderasi beragama, dan prediksi *effect size* kecil ($f^2 = .02$), dan *power* = .95, dibutuhkan total sampel 934 orang

untuk mendeteksi adanya efek. Berdasarkan perhitungan ini kami merencanakan untuk mengambil data sebanyak 1080 orang mahasiswa dan 180 orang non-mahasiswa. Jumlah sampel mahasiswa diperbanyak untuk mengantisipasi *effect size* actual yang lebih kecil, sedangkan jumlah sampel dari populasi non-mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah non-mahasiswa yang secara aktual kemungkinan tidak banyak. Jumlah ini dibagi ke tiga PTKIN target secara merata. Jumlah sampel yang direncanakan bisa dilihat di Tabel 1.

Tabel 12. Deskripsi dan jumlah sampel survei baseline

Jenis Populasi	Sub-Populasi	Deskripsi Populasi	Kuota N per PTKIN	Kuota N total
Mahasiswa (Kuota N = 1080)	Mahasiswa Non-Key Actors	Mahasiswa tahun ke-1 hingga tahun ke-3, meliputi mahasiswa yang dipilih namanya lewat daftar data yang disediakan PTKIN	318	954
	Mahasiswa Key Actors	Merupakan nama mahasiswa aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	42	126
Non-mahasiswa (Kuota N = 180)	Dosen Key Actors	Merupakan nama dosen yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	30	90
	Dosen PKN dan Studi Islam	Dosen yang mengajar mata kuliah PKN dan Studi Islam	12	36
	Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pejabat fakultas yang berwenang mengeluarkan kebijakan strategis terkait Akademik dan Kemahasiswaan	18	54

Prosedur Survei

Survei dilakukan secara daring menggunakan platform Limesurvey dan dipandu oleh asisten peneliti lokal atau peneliti melalui Zoom. Setelah partisipan ditentukan, asisten peneliti lokal mengontak masing-masing partisipan dan mengundang mereka untuk mengikuti survei melalui Zoom. Satu sesi pengambilan data hanya diikuti oleh salah satu jenis populasi. Untuk mahasiswa, pengambilan data dilakukan secara berkelompok. Partisipan non-mahasiswa memiliki jadwal yang lebih fleksibel. Mereka diminta untuk mengi-

kuti pengambilan data secara daring dengan jadwal yang paling memungkinkan bagi tiap partisipan, atau jika tidak bisa, akan diberikan kertas kuesioner secara langsung.

Prosedur di dalam proses pengisian survei sama untuk semua jenis populasi. Di dalam satu sesi pengambilan data, peserta dipandu oleh dua orang peneliti pendamping. Peran peneliti pendamping dapat diambil oleh peneliti lokal, asisten peneliti lokal, atau peneliti utama. Pertama, setelah peserta hadir di dalam telepon Zoom, tiap peserta dibacakan informasi penelitian dan lembar persetujuan penelitian oleh salah satu peneliti pendamping. Partisipan diberikan kesempatan bertanya, dan jika partisipan ingin mengundurkan diri dari penelitian, maka ia bisa langsung berbicara ke peneliti pendamping. Setelah partisipan mengisi lembar persetujuan penelitian, peneliti memberikan partisipan nomor token yang digunakan untuk masuk ke dalam survei. Partisipan lalu diminta untuk mengerjakan survei masing-masing, dan peneliti pendamping akan membantu jika ada pertanyaan teknis mengenai survei, menggunakan fitur *breakout room* di Zoom. Fitur *breakout room* dapat menempatkan peserta telepon Zoom ke ruang-ruang terpisah, yang akan berguna untuk memberi pendampingan individu terhadap peserta yang memiliki kesulitan. Setelah selesai, partisipan mengabari peneliti pendamping, dan salah satu peneliti pendamping memeriksa jawaban partisipan di Limesurvey, untuk memastikan partisipan tersebut telah benar-benar selesai.

3.3.2. Metode Kualitatif

Pengambilan data kualitatif dilakukan melalui menyebarkan dokumen *form open-ended* dan *focus group discussion* (FGD), walau yang *open-ended* hanya dilakukan kepada beberapa jenis partisipan. Tahap ini dilakukan setelah proses survei kuantitatif selesai. luaran yang diharapkan dari proses ini adalah (1) mengeksplorasi pemahaman dan penerimaan mengenai moderasi beragama di *civitas akademika*, terutama *key actors* di PTKIN (2) mengidentifikasi kapasitas dari PTKIN dalam mempromosikan moderasi beragama.

Ada dua cara pemilihan partisipan dalam metode kualitatif ini dipilih secara *purposive* dan *snowballing*. *Purposive* dilakukan karena partisipan memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sedangkan *snowballing* diambil untuk mengidentifikasi partisipan yang diketahui mahasiswa berperan sebagai *key actors* di PTKIN. Terkait jenis partisipan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Dosen PKN/Studi Islam
2. Pejabat fakultas bidang kemahasiswaan
3. Mahasiswa Ketua BEM/Organisasi Kemahasiswaan Ekstra dan Intra Kampus
 - a. Ketua BEM fakultas dan universitas 3 dari perwakilan rumpun fakultas 1 dari universitas
 - b. Organisasi ekstra tingkat fakultas/universitas. Ini bersifat tentatif jika tidak cocok dengan konteks PTKIN
 - c. UKM yang gerak di moderasi beragama
4. Mahasiswa tingkat Awal (tingkat 1)
5. Ketua/Direktur Lembaga/Pusat yang bergerak di isu moderasi beragama di PTKIN tersebut

Tabel 13. Deskripsi dan jumlah sampel FGD baseline

Jenis Populasi	Sub-Populasi	Deskripsi Populasi	Kuota N per rumpun fakultas	Kuota N per PTKIN	Kuota N total	Jumlah Sesi/PTKIN
Mahasiswa (Kuota N = 48)	Mahasiswa Non-Key Actors	Mahasiswa tahun ke-1	2	6	18	1
	Mahasiswa Key Actors	Merupakan nama mahasiswa aktif yang memegang jabatan tertentu dan juga namanya dirujuk dari hasil survei Ketua BEM Fakultas: 3 orang Ketua BEM Univ: 1 orang Ketua Organisasi Ekstra: 3 orang Rujukan: 3 orang	1 perwakilan BEM Fakultas dan 1 nama rujukan	10	30	1
Non-mahasiswa (Kuota N = 60)	Dosen Key Actors	Merupakan nama dosen aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	1	3	9	1
	Dosen PKN dan Studi Islam	Dosen yang mengajar mata kuliah PKN dan Studi Islam	2	6	18	

Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pejabat fakultas yang berwenang mengeluarkan kebijakan strategis terkait Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas: 2 Universitas: 2	2	8	24	1
Ketua Direktur Lembaga/Pusat	Ketua/Direktur Lembaga/Pusat yang mempunyai program moderasi beragama di PTKIN Dosen yang mempunyai concern yang tinggi pada topik moderasi beragama		3	9	1 per orang/ FGD: 1

Prosedur Pelaksanaan

Pemilihan partisipan dilakukan oleh peneliti dengan berkonsultasi kepada Peneliti PTKIN. Bagi partisipan dosen, Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Ketua Direktur Lembaga/Pusat, akan diawali oleh pengisian *form open-ended* yang menggali pemahaman mengenai moderasi beragama dan praktik moderasi beragama dalam kurikulum, kegiatan belajar-mengajar, regulasi dan kebijakan PTKIN. Pada partisipan mahasiswa, hal ini tidak dilakukan. Pembagian *form open-ended* bertujuan mengantisipasi jika mendadak partisipan tidak hadir. Diasumsikan untuk partisipan mahasiswa, mayoritas akan hadir dan ada kekhawatiran mereka juga akan mengisi secara asal, maka pengisian *form open-ended* tidak dilakukan.

FGD akan dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas *zoom*. Untuk mengundang partisipan FGD, akan ditugaskan enumerator yang mengontak peserta dan menanyakan kesediaannya mengikuti FGD sesuai waktu yang telah ditentukan. Tiap sesi FGD hanya diikuti satu jenis partisipan. Dalam menjalankan FGD, minimal harus dijalankan oleh fasilitator dan *co-fasilitator*. FGD berjalan kurang lebih antara 120-200 menit.

Instrumen FGD

Dalam menggali pemahaman moderasi beragama dan implementasinya, dengan mempertimbangkan jenis partisipan yang berbeda, tentu saja diperlukan instrumen pertanyaan yang berbeda. Instrumen pertanyaan disesuaikan dengan jenis partisipan dengan penekanan yang berbeda antara satu dan lainnya, walau ada juga

aspek-aspek yang sama di tiap jenis partisipan. Adapun indikator yang ingin ditanyakan di tiap jenis partisipan bisa dilihat pada Tabel di bawah

Tabel 14. Indikator Instrumen FGD berdasarkan jenis partisipan

		Mahasiswa Tingkat II	Mahasiswa Key Actors	Dosen	Pejabat dan Ketua Pusat/Lembaga
1	Pemahaman dan Penerimaan Definisi dan Indikator Moderasi Beragama dari Kemenag	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Faktor yang memengaruhi moderasi beragama	Ya	Ya	-	-
3	Gambaran Moderasi Beragama pada Civitas Akademika	Ya	Ya	-	-
4	Implementasi Moderasi Beragama di Kegiatan Belajar-Mengajar	Ya	Ya	Ya	-
5	Implementasi Moderasi Beragama di Kurikulum	-	-	Ya	-
6	Implementasi Moderasi Beragama di Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	-	-	Ya	-
7	Implementasi Moderasi Beragama dalam Regulasi/ Kebijakan PTKIN	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Implementasi Moderasi Beragama di Kegiatan Kemahasiswaan	Ya	Ya	-	-
9	Key Actors moderasi Beragama	Ya	Ya	-	-
10	Kebutuhan untuk meningkatkan moderasi beragama	-	Ya	Ya	Ya

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pengambilan data kuantitatif

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dari bulan Agustus untuk UIN Syarif Hidayatullah dan mulai dari pertengahan minggu ke-3 Oktober untuk UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Sunan Kalijaga untuk data mahasiswa *random*. Jeda mulai yang lama dari UIN Syarif Hidayatullah ke UIN lainnya, karena pengambilan data sempat terhenti dua kali di bulan Agustus, kemudian September karena masalah administrasi. Pengambilan data mahasiswa *random* dilakukan sampai minggu ke-2 Bulan November. Untuk pengambilan data mahasiswa *random* dilakukan secara *online terfasilitasi* lewat *zoom meeting* dengan minimal dua enumerator yang bertugas.

Ada perbandingan *response rate* dan juga jumlah partisipan dari ke-tiga UIN ini dimana partisipan di tiap sesi UIN Syarif Hidayatullah jumlahnya rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Sunan Kalijaga.

Hal tersebut mungkin terjadi karena jenis enumerator yang berbeda di UIN Syarif Hidayatullah dengan di UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Sunan Kalijaga. Di UIN Syarif Hidayatullah, enam orang enumerator merupakan mahasiswa dan tiga orang merupakan tenaga pendidikan dan dosen. Yang melakukan rekrutmen adalah mahasiswa, hal ini yang mungkin menyebabkan perekrutan kurang berjalan optimal karena banyaknya target partisipan yang menolak berpartisipasi dari awal atau saat sudah menyatakan bersedia, di waktu pengambilan data tidak muncul. Di UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Sunan Kalijaga partisipan merupakan dosen sehingga mungkin ada validasi mengenai pentingnya berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga rata-rata jumlah partisipan yang ikut dalam satu sesi antara 20-30 orang.

Dari jawaban yang diberikan oleh mahasiswa *random* dalam kuesioner, diperoleh nama-nama mahasiswa dan dosen rujukan. Selain itu peneliti juga melakukan randomisasi untuk menentukan dosen yang mengajar PKN dan Studi Islam serta Wakil Dekan/Rektor yang diminta untuk berpartisipasi. Pengambilan data untuk mahasiswa rujukan, dosen rujukan, dosen *random* dan pejabat Fakultas dilakukan dari tanggal 1-20 Desember 2020. Jumlah partisipan

yang didapatkan untuk setiap PTKIN dan populasi dapat dilihat di Tabel x.

Tabel 15. Jumlah Partisipan Survei

Populasi	Target Sampel	Sampel yang Didapat	Laki-laki	Perempuan
Mahasiswa Umum <i>(stratified random sampling)</i>	954 (318 per PTKIN)	949 SGD: 313 SUKA: 318 SH: 318	464 SGD: 155 SUKA: 151 SH: 158	485 SGD: 158 SUKA: 167 SH: 160
Mahasiswa Rujukan <i>(purposive sampling)</i>	126 (42 per PTKIN)	117 SGD: 37 SUKA: 42 SH: 38	66 SGD: 19 SUKA: 22 SH: 25	51 SGD: 18 SUKA: 20 SH: 13
Dosen dan Pejabat <i>(stratified random sampling & purposive sampling)</i>	180 (60 per PTKIN)	125 SGD: 45 SUKA: 51 SH: 29	76 SGD: 28 SUKA: 31 SH: 17	49 SGD: 17 SUKA: 20 SH: 12

3.4.2 Pengambilan Data Kualitatif

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan koordinasi dengan peneliti PTKIN. Koordinasi mengenai FGD dilakukan dari tanggal 14 Desember dalam menyiapkan rekrutmen peserta FGD. Kami meminta rekomendasi peneliti PTKIN dan enumerator mengenai nama-nama yang diundang dalam FGD. Untuk jenis partisipan mahasiswa dilakukan di tanggal 21-23 Desember 2020 sedangkan untuk dosen dan pejabat dilakukan pada tanggal 28-30 Desember 2020. Untuk dosen dan pejabat, didahului oleh pengisian *form open-ended* yang sudah dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 dan *form*-nya dikumpulkan dimulai dari H pelaksanaan FGD sampai tanggal 10 Januari 2020.

Pada pelaksanaannya, FGD berjalan kira-kira selama 120-180 menit. Di tiap harinya, FGD dilaksanakan di satu PTKIN di dua jenis partisipan secara paralel. Berikut detail pelaksanaan jadwal dan jumlah peserta FGD di masing-masing jenis partisipan.

Tabel 16. Jumlah Partisipan Mengikuti FGD

PTKIN	Jenis Partisipan	Tanggal Pelaksanaan FGD	P	L	TOTAL
UIN Syarif Hidayatullah	Mahasiswa Key Actors	22 Desember 2020	2	8	10
	Mahasiswa Tingkat 2		3	3	6
	Rektorat, Dekanat, Pusat/Lembaga	29 Desember 2020	4	6	10
	Dosen		1	2	3
UIN Sunan Gunung Djati	Mahasiswa Key Actors	21 Desember 2020	2	8	10
	Mahasiswa Tingkat 2		2	3	5
	Rektorat, Dekanat, Pusat/Lembaga	28 Desember 2020	1	6	7
	Dosen		3	6	9
UIN Sunan Kalijaga	Mahasiswa Key Actors	23 Desember 2020	3	5	8
	Mahasiswa Tingkat 2		4	2	6
	Rektorat, Dekanat, Pusat/Lembaga	30 Desember 2020	4	3	7
	Dosen		4	5	9
	TOTAL		33	57	90

Ketidakhadiran peserta (sebanyak 1-2 orang), menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan FGD, walau tidak terjadi di semua kelompok. Peserta yang tidak hadir paling banyak ada pada kelompok FGD dosen di UIN Syarif Hidayatullah dengan hanya 3 dari 10 orang yang hadir dalam FGD dan semuanya adalah dosen PPKN. Ketidakhadiran dari dosen lain dan keterwakilan mungkin saja memengaruhi respon jawaban dari FGD yang mengandalkan *knowledge* dan ekspertis dari peserta FGD.

Selanjutnya, yang kedua adalah dari partisipan dosen, sangat terasa dinamika antara dosen yang senior (sudah lama tahun pengajarannya) dan juga junior (rata-rata baru 1-2 tahun mengajar). Dosen yang lebih senior lebih banyak memberikan informasi pengalaman mengajar dan pengalaman saat diskusi sedangkan

dosen yang junior lebih banyak mendengarkan, walau mereka, ketika diminta, juga dapat memberikan jawaban, walau informasi yang diberikan tidak banyak.

3.5 Analisis data

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dilakukan dalam beberapa tahap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sebelum analisis tersebut, dilakukan asesmen psikometrik untuk melihat faktor-faktor dari alat ukur. Spesifiknya, kami melakukan *exploratory factor analysis* untuk menemukan struktur dari alat-alat yang baru diadaptasi atau diubah item-itemnya: adaptasi skala *Ethnocultural Empathy* untuk mengukur empati lintas agama (eksternal dan internal), adaptasi alat ukur BRAVE, adaptasi *Civic Attitude & Behavior Scale*, skala seksisme ASI, serta skala OpRad. Untuk skala yang sudah pernah diadaptasi sebelumnya dan tidak diubah lagi, yaitu skala SDO, kami melakukan analisis *confirmatory factor analysis*. Kami menguji reliabilitas dari setiap faktor dengan menggunakan analisis Cronbach's Alpha dan McDonald's Omega.

Pertama, analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat apa saja variabel moderasi beragama yang menjadi faktor resiliensi terhadap radikalisme dan ideologi ekstremisme kekerasan, untuk menentukan variabel yang menjadi prioritas intervensi. Untuk menemukan hal ini, dilakukan *multilevel regression*. Teknik *multilevel regression* dapat meningkatkan keakuratan model yang memiliki struktur data yang berjenjang atau bersarang (Field, Miles, & Field, 2012). Karena di dalam studi ini data survei bersarang di dalam tingkat PTKIN, maka teknik analisis ini dapat meningkatkan keakuratan model yang diestimasi. Prediktor di dalam model ini adalah variabel-variabel moderasi beragama: empati eksternal, empati internal (terdiri dari faktor empati umum dan penolakan), SDO, sikap anti kekerasan, dan *Civic Attitude & Behavior Scale* (terdiri dari faktor politik praktis, aktivisme, kewarganegaraan baik, kepercayaan terhadap pemerintah, sikap terhadap undang-undang dasar, serta keinginan untuk memberikan suara di pemilu daerah dan nasional). Variabel-variabel demografis digunakan sebagai kontrol.

Kedua, untuk semakin mengerucutkan prioritas intervensi, analisis deskriptif dilakukan untuk memeriksa variabel moderasi

beragama yang paling rentan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata di masing-masing variabel, dan melihat apakah nilai tersebut tinggi atau rendah, lalu membuat kesimpulan berdasarkan arah hubungan variabel tersebut dengan variabel kesetujuan terhadap opini pro-ekstremisme kekerasan atau radikalisme. Misalnya, jika pada variabel tertentu nilai rata-rata yang dimiliki tinggi (misal 4 dari nilai maksimum 6), sedangkan variabel tersebut memiliki hubungan yang positif atau sejalan dengan kesetujuan terhadap opini pro-ekstremisme kekerasan atau radikalisme, maka akan disimpulkan bahwa variabel tersebut rentan. Hal ini karena dengan asosiasi yang positif, maka lebih tinggi variabel tersebut lebih tinggi juga kemungkinan nilai pada variabel kesetujuan terhadap opini pro-ekstremisme kekerasan dan radikalisme. Karena nilainya tinggi, maka hal tersebut menjadi faktor resiko, karena ada kemungkinan kesetujuannya terhadap opini pro-ekstremisme kekerasan dan radikalisme juga akan tinggi.

Terakhir, untuk melihat apa saja yang memprediksi variabel-variabel moderasi beragama, dilakukan analisis regresi. Di dalam analisis ini, variabel yang menjadi prediktor adalah variabel-variabel demografis dan pengaruh sosial. Pengaruh sosial dioperasionalkan sebagai nilai mean dari variabel moderasi yang sama dari mahasiswa *key actor* dan dosen/pejabat dari PTKIN yang sama dengan masing-masing mahasiswa.

3.5.2 Analisis Data Kualitatif

Hasil rekaman FGD dibuat verbatimnya oleh penulis verbatim. Selama menuliskan verbatim, penulis juga diminta untuk menebalkan *keyword* yang muncul dalam proses diskusi. Hasil verbatim kemudian dibaca oleh peneliti. Pemberian *koding* dilakukan secara *grounded*, yaitu peneliti memberikan kode dari pernyataan yang ada. Satu kode disematkan ke satu pernyataan yang diucapkan satu orang pada satu waktu. Kode-kode ini kemudian dihitung frekuensinya. Makin banyak frekuensi satu kode, berarti makin sering pula kode tersebut muncul dalam FGD lain. Kode-kode yang ada kemudian dikategorikan berdasarkan menjadi beberapa kategori besar. Kategori ini yang kemudian disatukan untuk menjadi sub-sub tema yang muncul dalam hasil FGD.

3.6 Hasil Penelitian Baseline

3.6.1 Hasil Survei

Di dalam analisis *multilevel regression* yang dilakukan, terdapat varians yang signifikan dalam *intercept* di tingkatan PTKIN. Hal ini diketahui dengan membandingkan model random intercept dengan fixed intercept, dan perbandingan tersebut menunjukkan menggunakan random intercept di level PTKIN meningkatkan fitness model secara signifikan, $2(1) = 55.53$, $p < .0001$. Karena itu model ini menggunakan *random intercept* untuk setiap PTKIN.

Hampir semua faktor dari variabel-variabel moderasi beragama memprediksi Opini Pro-Ve/Radikalisme, walau arah dari prediksinya tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal.

- Empati eksternal: lebih tinggi kecenderungan seseorang untuk berempati kepada umat agama lain, dalam hal ini spesifiknya penganut agama Kristen, lebih rendah, kemungkinan ia akan menjustifikasi tindakan ekstrim untuk membelah Islam atau mendirikan negara Islam, $b = -.27$, $t(821) = -5.59$, $p < .0001$.
- Penolakan Internal: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk apatis atau merasa gelisah dengan keberadaan penganut aliran lain di dalam Islam yang dianggap sesat, maka semakin ia akan semakin setuju dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme, $b = .16$, $t(821) = 4.80$, $p < .0001$.
- SDO: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menyukai hierarki dan ketidak-setaraan, semakin setuju pula ia dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme, $b = .20$, $t(821) = 3.71$, $p = .0002$.
- Anti-Kekerasan: Semakin anti-kekerasan seseorang, semakin rendah kesetujuannya dengan Opini Pro-Ve/Radikalisme. $b = -.17$, $t(821) = -3.62$, $p = .0003$
- Politik praktis dan aktivisme: Semakin seseorang menunjukkan intensi terlibat dalam politik praktis, $b = .17$, $t(821) = 4.97$, $p < .0001$, dan aktivisme, $b = .24$, $t(821) = 3.48$, $p = .0005$, semakin besar pula kesetujuannya terhadap Opini Pro-Ve/Radikalisme. Hasil ini merupakan temuan yang paling tidak terduga, karena tidak sesuai dengan literatur mengenai fak-

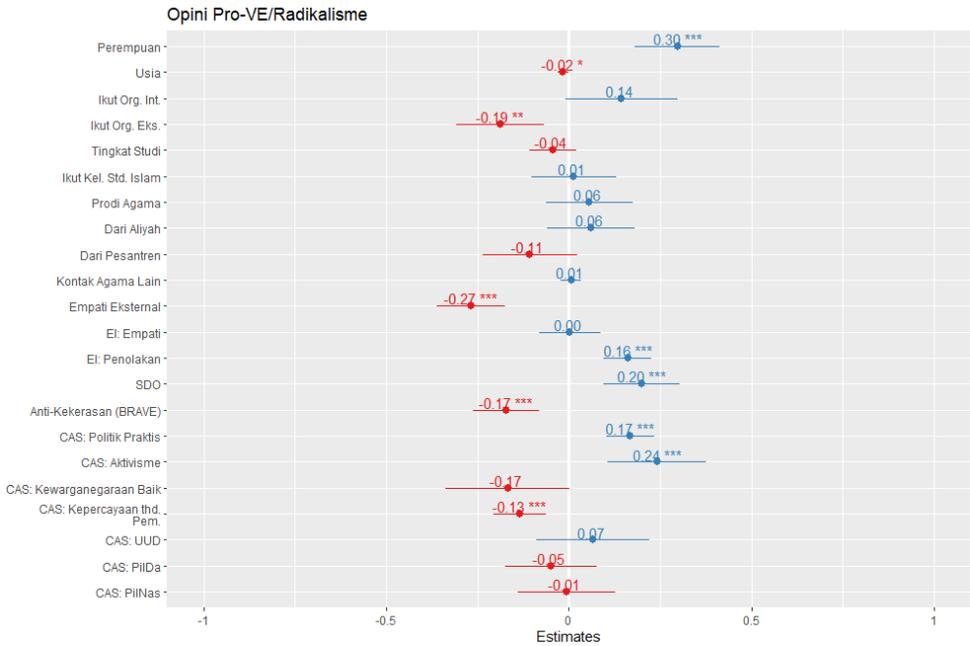
tor tarik dan dorong dalam radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

- Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan: Semakin besar kepercayaan seseorang terhadap sistem pemerintahan (mis. Sistem pemerintahan pusat, daerah, penegakkan hukum), semakin rendah kesetujuannya terhadap Opini Pro-VE/Radikalisme, $b = -.13$, $t(821) = -3.56$, $p = .0004$.

Tabel 17 Model Multilevel Regression

Predictors	Opini Pro-VE/Radikalisme	
	Estimates	CI
(Intercept)	3.47 ***	2.14 – 4.79
Perempuan	0.30 ***	0.18 – 0.41
Usia	-0.02 *	-0.03 – -0.00
Ikut Org. Int.	0.14	-0.01 – 0.30
Ikut Org. Eks.	-0.19 **	-0.31 – -0.07
Tingkat Studi	-0.04	-0.11 – 0.02
Ikut Kel. Std. Islam	0.01	-0.10 – 0.13
Prodi Agama	0.06	-0.06 – 0.18
Dari Aliyah	0.06	-0.06 – 0.18
Dari Pesantren	-0.11	-0.24 – 0.02
Kontak Agama Lain	0.01	-0.02 – 0.03
Empati Eksternal	-0.27 ***	-0.36 – -0.18
El: Empati	0	-0.08 – 0.09
El: Penolakan	0.16 ***	0.10 – 0.23
SDO	0.20 ***	0.10 – 0.30
Anti-Kekerasan (BRAVE)	-0.17 ***	-0.26 – -0.08
CAS: Politik Praktis	0.17 ***	0.10 – 0.23
CAS: Aktivisme	0.24 ***	0.11 – 0.38
CAS: Kewarganegaraan Baik	-0.17	-0.34 – 0.00
CAS: Kepercayaan thd. Pem.	-0.13 ***	-0.21 – -0.06
CAS: UUD	0.07	-0.09 – 0.22
CAS: PiIDa	-0.05	-0.17 – 0.08
CAS: PiINas	-0.01	-0.14 – 0.13
Random Effects		
σ^2	0.65	
$\tau00$ DemPTKIN	0.03	
ICC	0.04	
N DemPTKIN	3	
Observations	846	
Marginal R2 / Conditional R2	0.251 / 0.280	

* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$



Gambar 2. Forest Plot dari Model Multilevel Regression

Analisis Deskriptif Kerentanan Variabel Moderasi Beragama

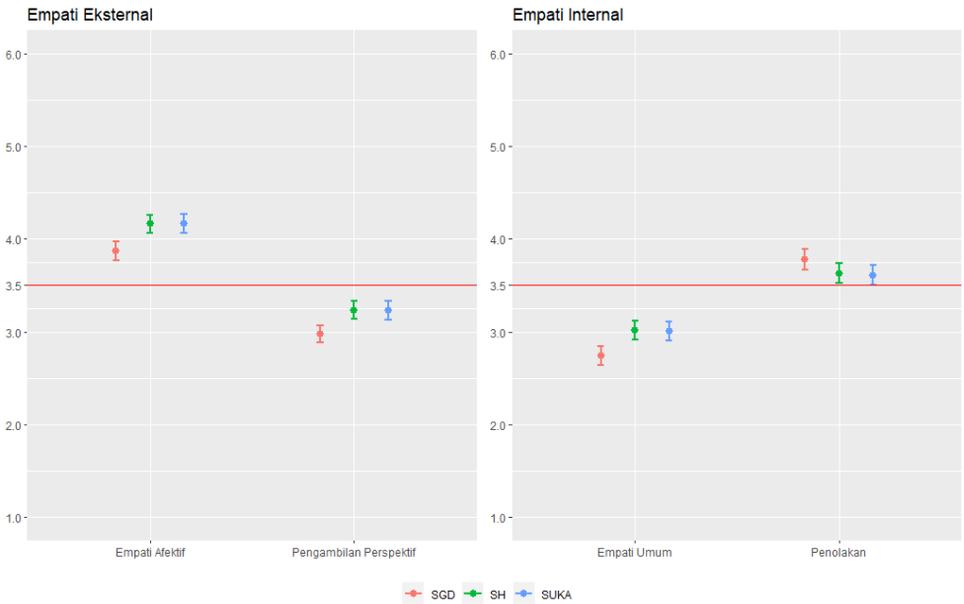
Selanjutnya, untuk mempertajam target dari intervensi, dilakukan analisis melalui statistik deskriptif untuk menentukan variabel moderasi beragama yang paling rentan. Cara untuk menentukan kerentanan adalah dengan melihat apakah idealnya variabel tersebut tinggi atau rendah, berdasarkan arah dari prediksi variabel tersebut kepada opini pro ekstremisme kekerasan. Selanjutnya tinggi atau rendahnya variabel tersebut dilihat dari apakah mean dan rentang confidence interval (95%) dari skor variabel tersebut di atas atau di bawah titik median alat ukur (3.5, dari alat ukur dengan 6 titik pilihan), dan dibandingkan dengan nilai maksimum atau minimum.

Statistik deskriptif dari setiap variabel moderasi beragama dapat dilihat di Tabel 3.5.x2. Dari semua variabel moderasi beragama, khususnya yang merupakan faktor resiliensi dan signifikan memprediksi opini pro ekstremisme kekerasan, ditemukan bahwa dua variabel, yaitu empati eksternal dan empati internal (Gambar 3.5.x2). Pada empati eksternal, kerentanan spesifiknya ditemukan di faktor pengambilan perspektif (M = 3.14, SD = .86, CI = 3.09 -

3.20), dan pada empati internal ditemukan di faktor penolakan ($M = 3.67$, $SD = .97$, $CI = 3.61 - 3.74$), walaupun empati umum, yang tidak signifikan memprediksi opini pro ekstremisme kekerasan, juga rentan ($M = 2.92$, $SD = .89$, $CI = 2.86 - 2.98$). Variabel-variabel dari Civic Attitude & Behavior Scale seperti politik praktis dan aktivisme politik diputuskan untuk tidak dijadikan tolak ukur kerentanan karena hasilnya yang tidak sesuai dengan asumsi awal terkait dengan faktor tarik dan dorong dalam radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Tabel 18. Gambaran Variabel Moderasi beragama

	Variabel	N	Mean	SD	CI	Arah	Signifikan	Kerentanan
Empati Eksternal	Empati Afektif	897	4.06	0.88	4.01 - 4.12	-	Ya	Tidak
	Pengambilan Perspektif	897	3.14	0.86	3.09 - 3.20	-	Ya	Rentan
Empati Internal	Empati Umum	897	2.92	0.89	2.86 - 2.98	-	Tidak	Rentan
	Penolakan	897	3.67	0.97	3.61 - 3.74	+	Ya	Rentan
SDO	Dominasi	897	2.45	0.69	2.40 - 2.49	+	Ya	Tidak
	Anti-egalitarianisme	897	2.35	0.78	2.30 - 2.40	+	Ya	Tidak
	Anti-Kekerasan (BRAVE)	897	5.01	0.72	4.96 - 5.05	+	Ya	Tidak
Civic Attitude & Behavior	Politik Praktis	897	3.62	0.97	3.55 - 3.68	+	Ya	Tidak
	Aktivisme Politik	897	5.29	0.53	5.25 - 5.32	+	Ya	Tidak
	Kewarganegaraan Baik	897	5.45	0.42	5.42 - 5.48	-	Tidak	Tidak
	Kepercayaan terhadap Pemerintah	897	4.46	0.85	4.41 - 4.52	-	Ya	Tidak
	Partisipasi Pemilu Daerah	897	5.43	0.84	5.37 - 5.48	-	Tidak	Tidak
	Partisipasi Pemilu Nasional	897	5.54	0.79	5.49 - 5.59	-	Tidak	Tidak
	HAM berdasarkan UUD	897	5.63	0.40	5.61 - 5.66	+	Tidak	Tidak



Gambar 3. Empati Eksternal dan Internal

Analisis Prediktor Variabel-Variabel Moderasi Beragama

Untuk memahami lebih lanjut mengenai variabel-variabel moderasi beragama, dilakukan analisis *multiple regression*, dengan variabel demografis dan pengaruh sosial sebagai prediktor. Analisis ini dilakukan untuk setiap variabel moderasi beragama yang memprediksi opini terkait ekstremisme kekerasan. Hasil dari analisis *multiple regression* dapat dilihat di Tabel 3.5.x3.

- Empati eksternal diprediksi oleh jenis kelamin ($b = -.19$, $t(833) = -3.79$, $p = .0002$), perempuan menunjukkan skor empati eksternal yang lebih rendah, tingkat perkuliahan ($b = .06$, $t(833) = 2.08$, $p = .04$), partisipan yang lebih lama berkuliah lebih tinggi skor empati eksternalnya, dan kontak dengan agama lain, yang juga memprediksi secara positif skor empati eksternal ($b = .03$, $t(833) = 2.38$, $p = .02$). Skor empati eksternal dari mahasiswa rujukan di PTKIN yang sama dengan partisipan memprediksi skor empati eksternal partisipan ($b = .52$, $t(833) = 3.21$, $p = .001$).
- Empati internal dalam bentuk penolakan ditemukan diprediksi oleh kontak dengan penganut agama lain ($b = -.04$, $t(833) = -2.22$, $p = .03$). Lebih banyak teman beragama

lain yang dimiliki partisipan, lebih rendah kemungkinan ia menolak penganut aliran lain di dalam Islam.

- SDO lebih tinggi di partisipan yang berasal dari sekolah berbasis pesantren ($b = .14$, $t(833) = 2.82$, $p = .005$).
- Anti-kekerasan hanya diprediksi oleh jenis kelamin ($b = .14$, $t(833) = 2.76$, $p = .006$), dengan partisipan yang perempuan menunjukkan skor yang lebih tinggi.
- Sikap terkait keterlibatan di dalam politik praktis diprediksi secara positif oleh keterlibatan di organisasi internal kampus ($b = .29$, $t(833) = 3.34$, $p = .0009$) dan organisasi eksternal kampus ($b = .39$, $t(833) = 5.88$, $p < .0001$). Selain itu, variabel ini juga diprediksi oleh apakah partisipan mengikuti kelompok studi Islam ($b = .22$, $t(833) = 3.28$, $p = .001$).
- Sikap terkait aktivisme diprediksi secara positif oleh apakah partisipan mengikuti organisasi luar kampus ($b = .09$, $t(833) = 2.56$, $p = .01$), kelompok studi Islam ($b = .14$, $t(833) = 4.22$, $p < .0001$), dan berasal dari sekolah aliyah ($b = .08$, $t(833) = 2.10$, $p = .04$). Sikap terkait aktivisme yang ditunjukkan oleh mahasiswa rujukan ($b = -1.57$, $t(833) = -3.54$, $p = .0004$) dan dosen serta pejabat fakultas ($b = -.26$, $t(833) = -2.17$, $p = .03$) di tempat PTKIN partisipan ditemukan memiliki hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi mahasiswa rujukan atau para dosen dari PTKIN yang sama dengan partisipan menganggap penting aktivisme, semakin partisipan mahasiswa dari PTKIN tersebut akan memiliki sikap yang berkebalikan.
- Kepercayaan terhadap institusi pemerintahan hanya diprediksi oleh apakah partisipan mengikuti kelompok studi Islam ($b = .14$, $t(833) = 2.48$, $p = .01$).

Tabel 19. Regresi Variabel Moderasi Beragama

	E. Eks	E. Int. Penolakan	SDO	Anti Kekerasan	Pol. Praktis	Aktivisme	Kepercayaan thd. Ind. Pem.
Perempuan	-0.194*** (0.051)	-0.019 (0.065)	-0.068 (0.043)	0.136** (0.049)	-0.002 (0.064)	0.031 (0.033)	0.042 (0.056)
Usia	-0.005 (0.007)	0.0001 (0.009)	-0.001 (0.006)	-0.002 (0.007)	0.006 (0.009)	-0.005 (0.004)	0.007 (0.008)
Organisasi Int.	0.001 (0.070)	0.019 (0.089)	0.100 (0.059)	0.006 (0.068)	0.292*** (0.087)	0.063 (0.046)	-0.064 (0.077)
Organisasi Eks.	0.056 (0.054)	-0.066 (0.069)	0.076 (0.046)	-0.071 (0.052)	0.392*** (0.067)	0.090* (0.035)	0.008 (0.059)
Tingkat Kuliah	0.062* (0.030)	-0.057 (0.038)	-0.007 (0.025)	0.017 (0.029)	-0.048 (0.036)	-0.024 (0.019)	0.011 (0.033)
Ikut KSI	0.002 (0.053)	0.024 (0.067)	0.014 (0.045)	0.097 (0.051)	0.216** (0.066)	0.145*** (0.034)	0.143* (0.058)
Prodi St. Agama	0.094 (0.055)	0.026 (0.069)	-0.033 (0.046)	-0.039 (0.052)	0.108 (0.068)	-0.010 (0.035)	0.0003 (0.059)
Dari Aliyah	-0.061 (0.056)	-0.065 (0.071)	-0.031 (0.047)	-0.020 (0.053)	0.119 (0.069)	0.076* (0.036)	-0.096 (0.061)
Dari Pesantren	-0.012 (0.060)	0.072 (0.076)	0.142** (0.050)	-0.078 (0.057)	0.013 (0.074)	-0.048 (0.039)	0.018 (0.065)
Kontak Agama Lain	0.031* (0.013)	-0.037* (0.017)	-0.004 (0.011)	-0.001 (0.013)	0.022 (0.016)	0.015 (0.008)	-0.002 (0.014)
Mhs. Rujukan	0.522** (0.162)	-0.056 (0.352)	0.180 (0.293)	-0.141 (0.189)	-0.069 (0.139)	-1.571*** (0.443)	0.002 (0.157)
DosJab	0.489 (0.254)	0.482 (0.472)	0.218 (0.397)	0.086 (0.305)		-0.263* (0.121)	0.229 (0.220)
Observations	846	846	846	846	846	846	846
R ²	0.064	0.021	0.025	0.02	0.089	0.061	0.014
Adjusted R ²	0.051	0.007	0.011	0.006	0.077	0.047	-0.0004
Residual Std. Error	0.736 (df = 833)	0.932 (df = 833)	0.620 (df = 833)	0.705 (df = 833)	0.914 (df = 834)	0.476 (df = 833)	0.801 (df = 833)
F Statistic	4.766*** (df = 12; 833)	1.511 (df = 12; 833)	1.755 (df = 12; 833)	1.451 (df = 12; 833)	7.394*** (df = 11; 834)	4.487*** (df = 12; 833)	0.971 (df = 12; 833)

3.6.2 Hasil FGD

Pemahaman dan Penerimaan terkait definisi moderasi beragama

Untuk mengukur pemahaman, Peneliti menganalisis apakah tema diskusi mengenai pemahaman moderasi beragama sesuai dengan empat indikator moderasi beragama yang ditawarkan oleh Kementerian Agama. Pemahaman moderasi beragama di kalangan mahasiswa cukup beragam. Mayoritas

tema yang paling dominan disebut pada mahasiswa terkait moderasi beragama adalah toleransi eksternal, yaitu toleransi antar pemeluk agama yang berbeda (n=39). Tema ini banyak disebut pada diskusi dan dikaitkan dengan moderasi beragama.

Di Al-Qur'an sudah dijelaskan, lakum diinukum waliyadain. Bagimu agama-mamu dan bagiku agamaku. Nah, itu sudah sangat jelas ya, kita tuh disuruh oleh Allah subhanallu wata'ala. Buat [ee]...bisa...tenggang rasa, bertoleransi antar umat beragama, gitu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Berdasarkan hasil diskusi, orang yang mempunyai moderasi beragama harus mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain ditunjukkan dengan bersikap hormat terhadap agama lain, tidak menghina, saling bersilaturahmi kepada kenalan yang merayakan hari besar agama yang berbeda, bersikap terbuka dalam menerima perbedaan keyakinan orang lain dan tidak ikut campur dalam praktik keagamaan agama lain (FGD, 2020). Selain itu juga, dalam hubungan sosial, muslim yang mempunyai toleransi eksternal harus mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang berbeda (FGD, 2020)

Selain toleransi eksternal, juga muncul tema toleransi internal yaitu toleransi antar aliran atau golongan dalam agama Islam itu sendiri dalam mempraktikkan moderasi beragama. Toleransi internal ini dapat berupa menahan *judgement* terhadap praktik keagamaan Islam yang dilakukan orang lain yang berbeda dengan dirinya atau menghormati praktik keagamaan dari mazhab atau aliran yang berbeda.

Dan juga disampingnya itu ada berbeda fiqih lah, ada yang menganut mazhab fiqih yah itu lah dan ketika kita sholat jumat, mereka tidak mempermasalahkan antara memakai celana yang pendek, yang..ada kan fiqih yang mana dia memakai celana pendek sampai di [ee] celana pendek lah celana pendek..ada yang juga memakai celana panjang, tapi pada saat kita kalau jumat dan saat itu mereka tidak mempermasalahkan kita..kita tidak mempermasalahkan bahwa sahnya ah itu aneh, ah itu kurang pantas, ah itu ini, tapi saya melihat bahwa sahnya kita apa ya walaupun kita berbeda, berbeda fiqih disitu, dan juga berbeda keyakinan tapi mereka tuh saling apa ya saling memahami

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Kalau menurut saya aliran, jadi ketika seseorang, konteks agama begitu, yang menyinggung aliran, itu selama aliran itu tidak dikatakan menyimpang dari syariat Islam, itu kita toleran gitu, jadi kan mungkin, mungkin yang terjadi di kira di Indonesia ini, ada beberapa golongan ya, ada Muhammadiyah, Nahdathul Ulama, ada Salafi, HTI, dan lain sebagainya itu, nah ketika..dari golongan golongan mereka itu tidak ada menyimpang dari ajaran syariat itu, kita wajib toleran.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Selain mazhab, toleransi internal (n=7) juga dilakukan terhadap sesama muslim yang latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda atau juga dengan pemeluk aliran agama Islam yang dianggap menyimpang seperti Syi'ah (FGD, 2020). Adanya penerimaan dan mau diskusi dalam membahas perbedaan ini menjadi perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang mempunyai moderasi beragama.

Itunya tetapi ini juga jangan terus menjudge kalo misalnya ni orang ini syiah, terus kita menghindari atau pun mengucilkan itu nggak, tapi kita ya kita diskusi bareng-bareng aja disitu dan ketika bersikeras dengan pendapatnya masing-masing ya sudah, karena emang dibawa dengan berdasarkan ini yang berbeda, dasar yang berbeda gitu.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Sedikit teringat dengan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasannya ketika kalian mengatakan bahwasannya Syiah itu adalah golongan orang-orang yang mencintai ahlul bait maka saya pun Syiah. [ee] dari situ melihat bahwasannya kadang kita terlalu berkuat dengan perbedaan dan lupa bahwasannya ada beberapa persamaan kita dengan yang lainnya. Marilah kita mencari persamaan-persamaan itu, ini lebih enak didiskusikan dan enak untuk bagaimana caranya kita bersosial.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Selain toleransi, tema komitmen kebangsaan juga sering muncul dalam diskusi di kalangan mahasiswa. Tema komitmen kebangsaan ini terdiri dari dua kode yaitu Mendukung Pancasila dan UUD 1945 (n=16) dan mempunyai rasa nasionalisme dan cinta tanah air (n=9). Dukungan terhadap Pancasila dan UUD 1945 ini muncul karena Pancasila dan UUD 1945 dianggap sudah mengejawantahkan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Selain itu, terkait komitmen kebangsaan, orang yang mempunyai moderasi beragama yang baik adalah orang yang mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, nasionalisme yang tinggi dan menjaga keutuhan NKRI.

Kita bisa mengetahui bahwa negara Indonesia ini negara yang berketuhanan, dengan mengamalkannya saya bisa, bisa apa itu namanya bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi maka yang dikatakan Kak MHS04 ada Pancasila disana, ada ideologi, kalo kita amati ideologi Pancasila tidak ada maksudnya ideologi Pancasila tidak ada hal yang melenceng (melewati batas) dari nilai-nilai, aspek-aspek keagamaan, dia berjalan beriringan. Jadi ketika kita memiliki moderasi, kita akan menunjang lah itu, jadinya hidupnya apa outputnya, outputnya kita bisa hidup rukun, tapi ketika orang hak orang (suara tidak jelas selama 4 detik) yang moderasi dia bakal wah Pancasila ini bertentangan dengan agama padahal nyatanya tidak sama sekali Kak.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Mencintai [ee] negaranya,,bangsanya

Mahasiswa Non-Key Actors

Untuk yang masalahnya itu, bagaimana sikap hal yang baik [e] untuk menyelesaikan permasalahan [ee] yang pembentukan negara baru atau yang pelepasan itu...itu perlu adanya diskusi, yang lebih rinci lagi, sehingga...dipersetujui oleh yang pro dan kontra itu di tengahnya dimana. Soalnya itu kan yang mendirikan khilafah sendiri itu kan juga kalo dikaitkan dengan hukum di Indonesia...mungkin ada yang namanya kalo di Islam itu...apa itu ya namanya, (?butgho?), itu yang pemberontak. Nah itu kan kalo... Bughot. Kalo dalam pemerintah, dalam agama Islam itu kan kalo bughot itu, hukumnya wajib...kita perangi.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Indikator keempat adalah terkait dengan anti-kekerasan (n=3), namun tema ini hanya sedikit muncul dalam diskusi.

Menurut saya tentang moderasi beragama ini muncul akibat dari dominasi dari agama-agama tertentu semisal kita ya tau sendiri beberapa kaum-kaum konservatif ini menggalakkan [eee] sebuah Islam yang ekstrem kurang lebih begitu yang merasa bahwasannya [eee] agama mayoritas adalah agama penguasa kurang lebih begitu nah karena hal itu maka moderasi agama ini hadir gitu untuk nantinya menghindari kekerasan dalam beragama.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Walau anti kekerasan jarang muncul, tema lain yang sering muncul dalam FGD adalah Tidak Eskrem (n=19). Tidak eskrem di sini diartikan sebagai tidak berada dalam posisi ideologi yang ekstrem (seperti liberal atau komunis), tidak berlebihan dalam mempraktikkan ajaran agama (sesuai proporsinya) atau tidak berlebihan dalam menyampaikan ajaran agama (FGD, 2020).

Analisis terkait dengan penerimaan definisi dan indikator moderasi beragama difokuskan kepada diskusi di antara dosen dan pejabat PTKIN. Hasil analisis menemukan bahwa mayoritas dosen dan pejabat menerima definisi dan indikator yang diberikan, hanya mereka menemukan bahwa masih ada masalah terkait dengan operasionalisasi perilaku dari indikator yang ditawarkan (n=22) dan juga *clear cut* mengenai batas bagi individu yang dianggap mempunyai moderasi beragama dan yang tidak (n=7). Kedua tema ini muncul dalam diskusi di tiga PTKIN yang menjadi target penelitian.

Saja yang mereka paham dalam berkomitmen terhadap bangsa mereka gitu ya, pengakuan terhadap [ee] apa namanyaa [ee] integritas bangsa dan lain sebagainya gitu ya . nah tetapi [e]e harapannya kan bukan hanya di tataran komitmen saja gitu ya tetapi mereka bisa menghayati dan mengamalkan gitu ya. Jadi karena yang paling penting sebetulnya kalau dilihat dari [ee] aspek perilaku, aspek perilaku kan yang paling penting.

Pejabat PTKIN, 2020

Kesejahteraan sosial, saya menggaris bawahi yang di indikator itu memang itu definisi operasionalnya sangat luas belum bisa diukur [ee] secara apa ya, secara jelas itu cut out nya atau clear cut Bahasa PJB02 tadi itu, misalnya kalau saya membandingkan kalo berdasarkan background Pendidikan saya jelas sekali, misalkan mengukur kemiskinan, orang miskin itu diukur misalkan dari sisi penghasilan kalo du, pertimbangan di dunia misalnya penghasilannya dua dolar di bawah dua itu udah miskin clear cut off nya udah itu jelas..... sehingga nanti akan muncul nanti itu yang mana orang yang disebut punya komitmen kebangsaan moderat itu akan kelihatan walaupun nanti itu sudah ada definisi operasional yang betul-betul bisa di [ee] di di ukur.

Pejabat PTKIN, 2020

Selain yang setuju, ada juga dosen dan pejabat yang menyampaikan pendapatnya untuk merevisi indikator yang ada. Revisi yang diajukan adalah mengadaptasi 12 nilai moderasi beragama (n=6) dan menambahkan komitmen keagamaan sebagai salah satu indikator dari moderasi beragama (n=6). Nilai-nilai moderasi beragama, menurut salah satu peserta, merupakan hasil konferensi moderasi beragama yang pernah diadakan, di dalamnya mengandung nilai. Sedangkan komitmen keagamaan adalah komitmen dalam menjalankan agama dengan baik.

Nilai wasatiyyah ada, ya mungkin rinciannya aja ya. Ada tasamuh, ada tawasuth, ada tawadzun, ada musalwa, ada i'tidal, syuro, aulawiyah, i'ti-

kar, kemudian tathowur. Muwathonah aja di sana ada, abrur, dan seterusnya. Nah ini menurut saya [ee] apakah itu menjadi rincian? Atau [eee] di sana, nilai-nilai itu sudah ada di dalam [ee] empat [ee] poin nilai tadi. Kalo misalnya belum, mungkin bisa pake ditambahkan di poin yang lain.

Dosen, 2020

lya jadi komitmen keagamaan ini betul ya, jadi ini menghindari yang namanya sekularisasi ya. Sekularisasi dalam kehidupan berbangsa, karena beda moderasi dengan sekularisasi, gitu ya. [ee] karena ya kita bukan negara sekuler. Juga bukan negara agama. Oleh karena itu, tetap kita komitmen dengan kepancasilaan. Ketuhanan yang berkebudayaan dalam bahasanya pak Ir. Soekarno begitu, Jadi ada [ee] kita juga tidak bisa [ee] misalnya moderasi, moderasi beragama kemudian berdampingan dengan orang-orang yang mengaku orang Indonesia gitu ya, kalo kita berkebangsaan ya, tapi dia tidak bertuhan. Nah itu juga harus di..pertanyakan, makanya ya karena kita pancasila ya kita harus bertuhan itu

Dosen, 2020

Faktor yang memengaruhi moderasi beragama

Dari hasil FGD, ditemukan empat faktor yang paling sering disebut memengaruhi moderasi beragama suatu individu. Keempat faktor tersebut adalah pengetahuan mengenai agama dan wawasan keislaman (n=13), Interaksi terhadap keberagaman (n=11), Eksposur terhadap informasi di media (n=11) dan pengalaman mengikuti organisasi kemahasiswaan (n=10). Wawasan yang mendalam mengenai ajaran agama Islam dirasa penting karena pengetahuan mengenai agama Islam menjadi dasar bagi kita untuk melakukan moderasi beragama itu sendiri, baik memahami jika memang agama Islam mendorong untuk moderasi beragama baik juga dalam memahami bahwa dalam implementasi ajaran agama Islam juga diperlukan pertimbangan konteks, bukan hanya teks (FGD, 2020)

guyonnya saya di jurusan saya ketika memang kalian tidak bisa bertoleransi dan menghargai beberapa agama dengan beberapa ajarannya, kalian mungkin belum paham agama adalah pengetahuan kita dimana kita tahu tentang ajaran-ajaran bagaimana moderasi agama tercipta sedangkan kita tidak tahu tentang ajaran agama yang lain. Makanya kenapa di jurusan studi agama-agama itu selain kita belajar tentang identitas kita juga belajar tentang ritual-ritual keagamaan agama lain karena ini [ee] awal dasar dari bagaimana moderasi beragama itu tercipta. Untuk pengetahuan terlebih dahulu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

atu bisa menghargai perbedaan. Nah saat ini kenapa banyak yang radikal di ekspresi keagamaannya? Ya karena melihat rasulullah dari sisi apa teksnya, tekstualnya sementara konteksnya itu agak diabaikan.

Dosen, 2020

Selain wawasan keislaman, juga ada interaksi terhadap keberagaman. Interaksi ini meliputi sejauh mana pengalaman individu di masa lalu berinteraksi dengan keberagaman (keluarga, sekolah, dan lingkungan dimana individu berada) dan juga keberagaman interaksi individu saat ini. Menurut hasil FGD, semakin individu terpapar dengan interaksi dari orang yang berbeda latar belakang keagamaan (baik intra maupun ekstra), akan berpengaruh secara positif terhadap moderasi beragama individu (FGD, 2020).

Saya me-, berdasarkan pengalaman saya saja dulu, sebelum ku-, sebelum [eee] jadi dosen gitu. Saya dulu [e] SD sampai SMA, di lingkungan yang [e] bisa dikatakan homogen gitu, Sekolahnya di...di lingkungan yang Islam terus. Jadi saya mungkin pas...saat itu saya merasakan bahwa, [oh] [e] istilahnya agak, apa ya? Bimbang? Kadang tuh kalo kita berada di lingkungan homogen tuh, bertemu dengan orang yang berbeda golongan atau berbeda agama, itu kan agak, mungkin...agak sensitif. Kadang [e] "ah, nanti gimana, terus takut apa, atau mungkin nanti pemahamannya jadi seperti apa", gitu. Nah kemudian, [ee] pas kuliah, kebetulan saya [e] kuliah di salah satu PTN yang sangat-sangat heterogeny gitu. Kampus saya tuh di FISIPOL UGM. Itu kan di sana [e] sangat-sangat heterogen. Dengan [e] apa, karakter agama yang... ..orangnya macem-macam..... terus, orang-orangnya juga dari yang percaya Tuhan, sampe yang tidak percaya Tuhan juga ada gitu. Dan itu [ee] ya, setelah saya kuliah di sana juga, [ee] saya tau gitu.....[e] bahwa [e] apa namanya [eee] ya kita, bi-, apa, dalam bergaul itu ternyata kalo...dalam suatu pergaulan kita hanya, satu homogen aja Terkadang menimbulkan [e] stigma-stigma tertentu gitu. Terus, begitu kita mengenal [e] ternyata, "oh ya, ternyata kita bisa hidup berdampingan, dan mereka tuh kadang tidak seperti yang kita bayangkan" gitu.

Dosen, 2020

Dengan siapa kita berinteraksi dan dengan siapa kita banyak bergaul mau apapun itu[ee] organisasi mau apapun itu ormas islam, mau apapun itu mazhabnya dan mau apapun itu agamanya. Itu yang akan membentuk kita. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang lain atau semakin banyak kita bergaul dengan orang lain maka semakin..semakin banyak pemahaman kita dan pengetahuan-pengetahuan kita akan perbedaan

Mahasiswa Key Actors, 2020

Faktor lain yang memengaruhi sekarang ini adalah media. Menurut hasil FGD, banyak sekali konten dalam media yang memengaruhi pola pikir keagamaan seseorang. Orang bisa saja terpengaruh paparan radikalisme sehingga menjadi tidak moderat jika terus-menerus terekspos hal tersebut. Ditambah lagi, jika seseorang tidak mempunyai sikap kritis dalam memilah informasi atau pengetahuan yang cukup dalam menilai informasi yang diterima.

Apalagi sekarang kan [ee] begitu mudahnya mahasiswa mengakses informasi dari luar. Dan banyak ada kasus juga mereka mengenal permasalahan radikalisme itu justru didapatkan dari media. Dan bahkan media itu lebih menarik buat mereka ketimbang penanaman nilai yang disampaikan oleh perguruan tinggi.

Pejabat PTKIN, 2020

Menurut saya, salah satu faktor yang mempengaruhi moderasi beragama seseorang itu, kalo sekarang, media. Media itu menurut saya, kuat banget mempengaruhi pola pikir orang untuk [ee] beragama. Khususnya orang-orang yang dasar agamanya [e] belum kuat, belum cukup kuat. Tetapi, akan pengaruh media itu, sangat mempengaruhi sekali. Karena bisa kita liat ya, sebagai contoh, kenapa media berpengaruh? Karena [ee] [mm] soal [ee] istilah berhijrah itu, gencar sekali, saat ini. Padahal kan, berhijrah itu seperti apa [e] tidak bisa kita patokan dengan halnya [ee] apa yang diinfokan atau apa yang diberitakan di media massa gitu. Nah, orang-orang ya [ee] tidak [ee] mempunyai, orang-orang yang awam [e] langsung [mmm] istilahnya apa ya...dia langsung menghakimi, bahwa hal ini lah yang baik, bahwa hal ini lah yang tidak baik gitu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Faktor terakhir yang paling sering disebut adalah mengenai pengalaman dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan. Hasil FGD cenderung positif mengenai pengalaman organisasi kemahasiswaan ini. Menurut peserta, dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan, maka individu akan terekspos mengenai keberagaman dalam beragama dan golongan agama dan hal ini akan berhubungan positif dengan moderasi beragama.

Emang gitu di dalam organisasi gitu [ee] mempelajari perihal [ee] keberbedaan,keberbedaan gitu ya kita apa ya menanggapi sesuatu gitu atau menanggapi agama [kata tidak terdengar jelas] iri gitu ya artinya kita di dalam,didalam apa didalam organisasi itu banyak [ee] apa ya perbedaan-perbedaan golongan juga gitu Bu.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Implementasi Moderasi Beragama di PTKIN

Kekuatan. Walau terhitung baru diluncurkan menjadi regulasi yang dihimbau dijalankan oleh PTKIN, menurut peserta FGD ada beberapa praktik dalam PTKIN yang sebenarnya sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang dinilai dalam menanamkan moderasi beragama di kalangan *civitas akademika* PTKIN. Implementasi adalah dalam hal Pendidikan dan Pengajaran. Cara pertama adalah memasukkan moderasi beragama dalam MKDU atau mata kuliah tertentu (n=16). Cara memasukkannya adalah dengan materi yang memang membahas moderasi beragama dan juga dengan penyisipan nilai-nilai yang berkaitan dengan moderasi beragama seperti toleransi dan komitmen kebangsaan (n=16). Beberapa mata kuliah yang dianggap sudah mencoba menyisipkan materi atau nilai moderasi beragama adalah PPKN, Studi Agama-agama dan Sejarah Islam Indonesia.

ah kemudian SII 3, sejarah islam indonesia 3 itu pasca era kemerdekaan sampai kontemporer. Oke nah secara khusus bahwa di SII itu dijelaskan bahwa islam yang masuk ke nusantara ini ya adalah islam yang moderat gitu

Dosen, 2020

Namun walau tidak ada mata kuliah khusus misalkan mata kuliah islam dan moderasi seperti yang tadi tapi dalam konteks pembelajaran kita juga apa, menyisipkan juga ya kita juga menjelaskan juga lagi moderasi kepada mahasiswa kita yang nanti kan menjadi guru itu, [ee] termasuk ketika menjelaskan ayat-ayat al Qur'an yang memang [ee] berkaitan dengan kerukunan, dengan toleransi, dan sebagainya dan sebagainya

Dosen, 2020

Kemudian itu diaplikasikan dalam sebaran mata kuliah. Ya ada mata kuliah dasar umum MKDU, itu pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu ya pada intinya adalah [ee] pendidikan politik, pendidikan nasionalisme, dan pendidikan demokrasi gitu. Kemudian [ee] pendidikan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah di situlah indikator yang disampaikan kemenag tadi tentang komitmen kebangsaan.

Dosen, 2020

Dalam mempelajari materi kuliah, terutama yang terkait dengan ajaran agama, para dosen juga mencoba meningkat-

kan moderasi beragama lewat penggunaan berbagai macam sumber (n=16) dalam menafsirkan dan memahami suatu materi. Hal ini dianggap dapat meningkatkan moderasi beragama karena mahasiswa akan terbiasa dan terbuka melihat sudut pandang lain dalam memutuskan sesuatu dan metode ini juga dianggap dapat membuat mahasiswa mengerti, terutama materi agama, bahwa beberapa ayat atau hukum harus ditafsirkan sesuai konteks dimana dia berada.

Mungkin [eee] yang jadi sharing Studi Fatwa ya. Studi Fatwa ini [e] saya bersama dengan temen [aa] mahasiswa Ekonomi Syariah ya. Ekonomi Syariah.....Dalam prakteknya, saya me...me- me-, mengakomodir dua pendekatan ya, Lembaga. Kelembagaan Fatwa dan, individual, atau ulama lah, salah satu ulama. Nah, ketika me-...menjelaskan Kelembagaan Fatwa- -Metode pembelajarannya biasa, seperti halnya presentasi. Kemudian kita cek, dokumen-dokumen fatwa. Baik itu MUI. MUI ada dua ya. Ada MUI, ada Komisi Fatwa. Dan ada Komisi apa itu namanya, DSN MUI. Karena di FEBI, sehingga lebih banyak mengakomodir DSN MUI. Artinya, fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi. Fatwa-fatwa MUI dalam bidang ekonomi. Kemudian [ee]...Majelis Tarjih, Bathsul Masail kalo di NU. [e] dan terakhir [e] juga, mendekati fatwa dari sudut...keulamaan individu ulama. Jadi- Ada fatwa klasiknya kita akomodir, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Tapi juga kontemporeranya, kita mengambil Yusuf Qardhawi dan juga Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili. [ee] Jadi mahasiswa memang dikenalkan lebih dalam, terkait dengan produk-produk fatwa. Sehingga, [ee] temen-temen mahasiswa, sesungguhnya akan menangkap bahwa fatwa ini sendiri adalah dinamis. Dinamis. Selalu mengalami perubahan, sesuai dengan konteksnya.

Dosen, 2020

Selain lewat materi atau transfer nilai, moderasi beragama juga coba ditingkatkan lewat metode pembelajaran dewasa (andragogi). Metode ini merupakan metode *student centered learning* dimana mahasiswa yang diharapkan aktif dalam pembelajaran dan dosen hanya bersifat sebagai fasilitator yang membantu memfasilitasi proses belajar mahasiswa. Beberapa metode *andragogi* yang disebutkan adalah diskusi, berdebat, studi kasus, penulisan esai yang dipublikasikan dan penekanan pada *problem solving* (FGD, 2020).

kita mengembangkan yang bu DSN02 juga tau dengan metode aktif learning...nah aktif learning ini menjadi keniscayaan jadi saya tidak ceramah tidak tutorial tetapi saya lebih banyak melibatkan mahasiswa untuk melakukan sesuatu untuk memasukkan ide ide ke keciputatan tentang moderasi beragama.

Dosen, 2020

Sangat mengenalkan Islam dari dalam dan kuliatnya gitu loh, [eee] tapi saya ingin jawab yang barusan, yang pertama itu [ee] praktik-praktik yang mendorong moderasi, moderasi [ee] beragama, kalau di jurusan sendiri kan jurusan sejarah, saya semester satu itu belajar dasar-dasar ilmu sejarah, saya sangat suka dosen saya [ee] beliau itu tidak hanya mengajarkan teori ya, kita itu kan ada teori sejarah, tapi di langsung, langsung diimplementasikan ke studi kasus, kasusnya nggak lama-lama, kaya kemarin pas pemilu dua ribu sembilan belas, kaya semua nya membawa nama agama, untuk diperjuangkan kembali lagi ke politik gitu loh, tapi [eee] dosennya tuh [ee] apa ya, kita disuruh untuk studi kasus atas apa, yang barusan kita pelajari nih nah dari situ semua terakhirnya kita presentasi-presentasi, terus seperti di revisi lah pemikirannya sama dosen ini, jadi kita disuruh untuk berpikir, di akhirnya kita akan mendapatkan kaya apa, wejangan, wejangan gitu lah, dan itu bukan final, bukan keputusan final, kaya ini loh, agama itu kaya gini, tapi itu nanti masih bisa berkembang loh, kita diajarin, misalkan nih, kalau kita, misalkan ni mohon maaf kita mendirikan khilafah, kita bisa hancur kaya Suriah, kaya di Baghdad gitu,, contoh kecilnya seperti itu.

Mahasiswa non-key actors, 2020

Terakhir adalah moderasi beragama diusahakan masuk dalam bagaimana dosen mengajar di dalam kelas. Baik mahasiswa dan dosen menyatakan bahwa penyisipan moderasi beragama sangat bergantung pada bagaimana dosen mengajar di dalam kelas (FGD, 2020). Sikap dan perilaku dosen dalam mengajar di dalam kelas menjadi contoh dan memengaruhi bagaimana mahasiswa mengadopsi pandangan moderasi beragama. Sikap dosen yang terbuka untuk berdiskusi dan menerima sudut pandang yang berbeda juga punya wawasan yang luas menjadi dorongan mahasiswa untuk bisa menjadi lebih moderat juga (n=11).

Memang harus setiap dosen-dosennya itu memiliki wawasan yang memegang prinsip-prinsip [ee] pemahaman yang moderat. Jadi jadi lebih ke dalam hal interaksi, kalau tadi kata pak DSN05 itu kan lebih ke dinamis antara dosen dan mahasiswa. Dan itu sering sering terjadi sering dilaksanakan dan diskusi baik formal maupun di kelas ya

Dosen, 2020

jadi ketika, yang saya suka dari beliau itu dia, membuka mindset kita akan yang namanya itu toleran gitu, yang namanya toleran dan pembaharuan agama seperti apa, beliau itu berani membuka tabir-tabir yang kita anggap itu sebagai hal yang tabu gitu, semisalnya Islam itu apa sih, Islam itu apa, coba kita kalo salaman sama perempuan itu gimana, itu di buka semua sama beliau, dengan, dengan ini yang saya suka, beliau itu punya dasar agama yang kuat dan intelektual yang sangat sangat mumpuni, jadi bener-bener bisa menjawab dengan rasional, pertama,

karena semuanya kan butuh rasional kan di kampus, tapi beliau bisa mendasarinya dengan dalil-dalil gitu lho, nah itu [uuh] keren banget sih, jadi beliau moderat banget sih menurut saya,

Mahasiswa non-key actors

Selain dalam pendidikan dan pengajaran, PTKIN juga mendorong implementasi moderasi beragama menjadi tema penelitian (n=13). Dari analisis judul penelitian yang diberikan, tema penelitian yang sering muncul adalah membahas keberagaman dan toleransi di suatu masyarakat tertentu, pembahasan mengenai kajian moderasi beragama dalam topik tertentu (misal dalam hukum Syariah, tafsir, dalam agama tertentu, tokoh atau organisasi tertentu), efektivitas praktik baik dalam moderasi (dalam pendidikan atau di lingkungan masyarakat). Ketiga tema penelitian ini muncul di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Sunan Gunung Djati. Topik penelitian lain yang muncul juga ada mengenai radikalisme dan deradikalisasi di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu di beberapa PTKIN yang mengelola jurnal, tema moderasi beragama diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal tersebut (FGD, 2020). *Mainstreaming* moderasi beragama di UIN Sunan Kalijaga juga didukung oleh adanya pusat atau lembaga yang mempunyai *concern* mengenai moderasi beragama seperti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara, Pusat Studi Kerukunan, Cisform, Moslem and Global Affairs (MoGA), Pusat Kajian Sunan Kalijaga dan Laboratorium Agama dan Budaya (FGD, 2020).

Dalam hal pengabdian masyarakat, moderasi beragama didorong dengan lewat tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) (n=6). Saat KKN, mahasiswa diminta membuat program yang menyesuaikan dengan tema moderasi beragama (FGD, 2020). Selain itu, dosen juga merasa pembekalan mahasiswa sebelum terjun KKN untuk dapat lebih luwes berinteraksi dengan masyarakat yang lebih beragam dianggap meningkatkan moderasi beragama (FGD, 2020).

Salah satu tema penelitian yang ditawarkan lewat program kementerian agama itu bersifat moderasi agama. Artinya [ee] bukan juga dituntut untuk berpikir apa maksudnya berpikir secara berpikir secara kritis, berpikir secara (mutlak/buta?) bagaimana penelitian kita juga diarahkan ke tema-tema yang berkaitan dengan nilai moderasi beragama. Artinya, dari sisi tri dharma perguruan tinggi di penelitian ini ya pada dasarnya di fakultas dakwah sendiri banyak tema-tema yang [ee] nilai moderasi beragama.

Dosen, 2020

kita membangun kali mahasiswa saja yang melakukan pengabdian kepada masyarakat agar paling tidak lah ketika berinteraksi dengan masyarakat tidak menampilkan sikap,ucapan dan perilaku yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai moderasi itu ya paling apa memberikan pembekalan-pembekalan ya [mmm] baik mungkin pengetahuan, wawasan dan sebagainya, bagaimanapun ketika mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa jadi akan berhadapan dengan (?mukhotob?) dengan orang-orang yang beragam ya, di samping juga mungkin ada yang homogen. Ya, ketika tadi mereka menghadapi masyarakat yang homogen. Tadi kata pak dSN02 ya pendekatannya kan berbeda dengan [e]e masyarakat yang heterogen. Maka supaya tidak terjadi kontra produktif dengan dengan nilai moderasi paling yang selama selama ini kita lakukan adalah semacam pembekalan dan pendampingan agar baik dalam menyusun program, dalam melaksanakan program, dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, tidak tidak apa menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi itu sendiri gitu

Dosen, 2020

Moderasi beragama juga coba dimasukkan dalam budaya Organisasi PTKIN. Beberapa peserta FGD merasa visi-misi PTKIN sudah ada semangat moderasi beragama (n=7). Selain itu, adanya rumah/pusat kajian moderasi beragama yang memang bertugas fokus mengembangkan moderasi beragama di tiga PTKIN ini dianggap dapat membantu implementasi moderasi beragama, walau keberfungsian sendiri belum begitu lama yaitu sekitar tahun 2019 dan 2020 (FGD, 2020).

Bagaimana menanamkan nilai, merujuk pada pedoman kelembagaan, yaitu visi universitas. Ya visi universitas adalah [ee] mbingkai akhlakul karimah. Jadi dengan wahyu memandu ilmu kemudian akhlak karimah itu bagian dari ajaran atau [ee] nilai-nilai [ee] moderasi beragama, karena. Kalau sudah akhlaknya mulia, akhlaknya karimah, itu sudah menunjukkan moderasi

Dosen, 2020

Karena ada paradigma atau core values UIN itu kan integrated dan interconnected. Itu berarti koneksi itu sebenarnya dalam penerapannya itu ya, Moderasi Beragama, sebenarnya.

Dosen, 2020

visi misalnya visi UIN visi fakultas semua kayanya sudah tidak diragukan lagi integrasi keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan gitu.

Dosen, 2020

Terakhir, implementasi moderasi beragama disisipkan dalam kegiatan kemahasiswaan, baik yang dilakukan oleh pihak

PTKIN maupun organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan yang diadakan oleh PTKIN adalah membuat moderasi beragama menjadi tema dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (n=15) pada mahasiswa baru (UIN SUKA, 2020). Kegiatannya sendiri masih banyak yang berupa seminar satu arah yang wajib dihadiri oleh mahasiswa baru (FGD, 2020). Kegiatan lain yang diadakan adalah seminar atau diskusi yang diadakan oleh PTKIN (n=10), walau dalam pelaksanaannya diadakan secara daring (*online*) karena pandemi COVID-19.

Terutama diawali dengan PBAK mahasiswa baru tema yang diusung itu sudah ada tema moderasi beragamanya dan itu salah satu calon mahasiswa yang ketika itu ikut membacakan deklarasi moderasi beragama, kemudian setelah itu kita juga melakukan kegiatan ya.

Pejabat PTKIN, 2020

Ya kan ada regulasinya dari Kementerian Agama mas, jadi setiap mahasiswa baru di berikan [eee] ruang untuk mengikuti pengenalan budaya, akademik, dan kemahasiswaan itu mulai 2017 ya dirancang arahnya ke moderasi beragama sampe sekarang, jadi sepertinya seperti itu, nah selain di PBAK kami di UIN Sunan Kalijaga ada penyambutan mahasiswa baru dengan istilahnya sosialisasi pembelajaran itu yang soft skill kemudian cara [ee] belajar di perguruan tinggi sebagai mahasiswa baru itu di situ juga ada muatannya, bagaimana [ee] terkait dengan moderasi Beragama.

Pejabat PTKIN, 2020

Jadi, selama musim-musim covid kemarin itu ya di fakultas adab beberapa kali ya mengangkat di webinar itu tema tentang moderasi beragama.

Dosen, 2019

Untuk dosen, banyak kegiatan moderasi beragama terwujud dalam bentuk *workshop*. UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan *workshop* yang diikuti oleh para dosen pada Desember 2020 yang membahas mengenai konsep moderasi beragama dan bagaimana menerapkan konsep ini dalam kondisi sosial masyarakat (UIN SUKA, 2020). Sedangkan untuk UIN Sunan Gunung Djati, sejak dibentuknya rumah moderasi beragama, mereka mengawali kegiatan dengan mengadakan *workshop* pembentukan modul moderasi beragama yang terdiri dari kompetensi pedagogik, integritas diri, wahyu memandu ilmu, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan (UIN SGD, 2020). Modul ini kemudian dipakai dalam *workshop*

moderasi beragama dimulai dari dosen muda yang berstatus CPNS dengan tujuan membekali para dosen baru dari aspek kependidikan, kepribadian, integrasi keilmuan, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan (Kampusiana, 2020). Selain *workshop*, ada juga modul dan buku pendukung lain, seperti Pancasila perspektif lintas iman (Katolik, Islam, Protestan, Hindu, Konghucu, Budha, dan Penghayat/Aliran Kepercayaan) dari UIN Sunan Kalijaga sebagai usaha untuk *mainstreaming* moderasi beragama (UIN SGD, 2020).

Selain itu, organisasi kemahasiswaan juga turut berkontribusi dalam mengadakan kegiatan yang mempromosikan moderasi beragama (n=24) khususnya untuk mahasiswa. Kegiatan yang mempromosikan moderasi beragama bentuknya beragam bisa seminar atau diskusi dengan mengundang narasumber dengan latar belakang keagamaan/aliran keagamaan yang berbeda apalagi jika memang bentuknya diskusi lintas agama (FGD, 2020; Ushuludin UIN SUKA, 2020). Selain itu bentuk lain adalah kegiatan (seperti bakti sosial) yang memang berkolaborasi dengan organisasi yang berbeda latar belakang agama atau alirannya (FGD, 2020).

IMM sendiri rencananya, sedang sedang direncanakan mas, akan dilakukan diskusi lintas agama gitu kang, menghargai, menjadi penengah gitu mengundang pembicara ain agama lain gitu. Jadi saling sharing session.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Kalau pada saat kegiatan, misalnya di luar pandemi ini, pada saat off-line berarti kan, itu kita bisa terjun langsung ke studi kasusnya, karena moderasi ini banyak, di sini biasanya kalau saya cenderung, karena saya pernah melakukan bersama-sama teman tapi bukan dari teman kampus ya, ruang lingkup kampus, di luar kampus, itu saya mengajak teman-teman secara umum itu dari golongan apapun, kalo ngga salah lebih kompleksnya ke yang, teman saya bercadar atau tidak, terus ada yang non-muslim, sama tidak disitu saya ajak bersama-sama untuk melakukan kebaikan, membagikan, makanan bagi masyarakat, disini tujuan saya itu, ini loh moderisasi [moderasi] tuh seperti ini gitu, kita tuh bersama-sama untuk membantu saling tolong menolong gitu.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Menurut mahasiswa key actors juga, menangkal paparan radikalisme dilakukan dengan pola pengkaderan dalam organisasi kemahasiswaan itu sendiri (n=3), dimana nilai-nilai moderasi beragama disampaikan dalam proses kaderisasi dan

junior juga bisa melakukan klarifikasi mengenai pengetahuan beragama dengan senior dalam organisasi kemahasiswaan.

Organisasi Internal dan eksternal mahasiswa salah satu yang lumayan [eee] rame juga secara kaderisasi karena kan organisasi ini organisasi kaderisasi ada pola pengkaderan yang dijalankan dan dalam sistem pengkaderan juga ya kita juga menyampaikan nilai nilai moderasi dan tidak tidak cenderung untuk membahas [eee] berbagai apa konflik konflik internal lebih kepada kemudian membuka wawasan teman teman juga jadi aktor aktor nya tuh bisa dilakukan misalnya lewat jalur organisasi internal maupun lewat organisasi eksternal.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Kelemahan. Implementasi moderasi beragama yang sudah sangat beragam tentu tidak lepas dari beberapa kelemahan. Analisis dari transkrip FGd menemukan adanya beberapa kelemahan dalam dua kategori yaitu (1) Pendidikan dan Pengajaran dan (2) Budaya Organisasi. Dalam pendidikan dan pengajaran, walau nilai moderasi beragama sudah coba disipkan, para dosen masih merasa membutuhkan pedoman dalam memasukan materi/nilai moderasi beragama dalam mata kuliah (n=5).

Modul yang bisa dipakai bersama sama. [ee] modul yang dipakai kampus seperti apa gitu ya?.....tapi semua itu akan bagus kalau ada modulnya, kalau ada materi-materi nya untuk dijadikan acuan sebagai standar minimalnya. Bahwa mahasiswa UIN punya standar minimal moderasi beragama itu seperti apa, menurut saya itu sangat penting. Sehingga lulusan UIN dari pandangan sikap, perilaku, seperti inilah standarnya dalam moderasi beragama dan menjadi panutan yang lain.

Pejabat, 2020

Tema yang juga banyak ditemukan yang menjadi kelemahan dalam implementasi moderasi beragama di PTKIN adalah masih adanya dosen yang bersifat kurang terbuka terhadap perbedaan pandangan (n=17). Kurang terbukanya dosen ini dilihat dari saat dirinya mengajar, dirinya menjelekkan aliran lain atau mendiskriminasi mahasiswa dari aliran agama/organisasi agama tertentu (FGD, 2020). Selain itu dalam diskusi, dosen juga tidak netral, memihak sudut pandang aliran keagamaan tertentu dan tidak mau menerima sudut pandang yang berbeda dari mahasiswa (FGD, 2020).

Dari jurusan saya sendiri itu memang ada dosen yang..masih..diskriminasi terhadap satu golongan, jadi seperti yang dikatakan oleh MHS06 tadi di Indonesia ada beberapa golongan di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU, nah jadi dosen saya nih, kebetulan beliau mengajar apa ya, Al-Quran dan hadits, tapi beliau di setiap pembelajaran itu akan menyempatkan indoktrinasi, indoktrinasi nya itu tentang bahwa golongan ini tidak baik gitu, atau lebih kongkritnya lagi, golongan Muhammadiyah itu tidak baik, itu sangat dilarang begitu.

Mahasiswa non-key actors, 2020

Nah [ee]jadi pernah satu waktu dimana bukan satu waktu tapi beberapa kali ibu itu kaya menyudutkan tentang organisasi LDK dan (?kami?) gitu loh Kak dimana [ee]itu tuh sebenarnya gak moderasi gitu loh, yang ini nih gak moderasi intinya [ee] intinya kaya gitu loh kak,LDK dan (?kami?) tuh gak moderasi gitu kan itu tuh bibit-bibit teroris. Jadi yang kaya langsung, Kaya terlalu keras gitu, sebenarnya moderasi, jadinya kita mikir lagi ibu ini mengusung moderasi beragama tapi sebenarnya moderasi beragama itu seperti apa yang baik gitu (karena dosen menyalahkan aliran agama lain, red.) jadinya kita mikir lagi gitu bener-bener moderasi beragama tapi menjatuhkan juga gitu

Mahasiswa non-key actors, 2020

Selain itu, beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam implementasi moderasi beragama juga ada dalam budaya organisasi. Belum adanya operasionalisasi dari visi-misi (n=5) yang dianggap mengandung nilai moderasi beragama dalam renstra kerja PTKIN dianggap dapat menghambat pengarusutamaan moderasi beragama. Selain renstra, pengarusutamaan ini juga belum didukung kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur (n=2).

Pembelajaran itu implementasinya pada pelaksanaan tridharma PT, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ditambah kegiatan kemahasiswaan [ee] menurut saya ini dimulai dari penajaman visi ya. Visi UIN nya mengenai wasatiahnya itu harus diliat lagi mungkin gitu ya.

Pejabat PTKIN, 2002

level monitoring dan evaluasi terhadap semua ini karena semuanya sudah punya, tinggal di laksanakan dimonitor dan dievaluasi hasilnya seperti apa, kemudian juga program-program itu harus dijalankan gitu, karena kita sudah punya gitu desain programnya.

Pejabat PTKIN, 2020

Selain itu juga ada kelemahan dalam segi regulasi. Ada beberapa aturan dalam PTKIN yang dianggap menghambat penerapan moderasi beragama seperti larangan bagi mahasiswa

untuk mengadakan kegiatan yang tujuannya mengeksplorasi topik-topik atau praktik yang dianggap tabu (n=4). Beberapa kegiatan yang tujuannya mengeksplorasi topik atau praktik keagamaan tertentu dilarang diadakan atau dibubarkan oleh PTKIN itu sendiri (FGD, 2020).

Saya kira, ruang ini, forum Zoom ini, kurang beberapa organisasi ekstra ya. Termasuk KAMMI, Gema Pembebasan, GMNI, SEKBER, dan lain-lain ya. [ee]..yang saya kira, kemarin, di UIN itu ada kasus. Dimana kawan-kawan Gema Pembebasan [e] membahas, berdiskusi terkait [eee] khilafah. Dan itu...punya, dapat sikap yang...fasis banget, represif dari rektorat. Sehingga--langsung dibubarkan gitu, diskusinya. Dan itu bagiku bukan bentuk demokrasi. Demokrasi nggak kayak gitu. Datang, lalu membubarkan, fenomenal. Dan itu saya kira, kita juga perlu pertimbangkan terkait moderasi keagamaan di wilayah rektorat ya, rektorat bahkan. Dan itu sangat tidak moderasi gitu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Selain itu, adanya regulasi melarang bercadar yang juga masih menjadi kontroversi di kalangan *civitas akademika*, khususnya pada mahasiswa (n=4). Beberapa mahasiswa memahami pelarangan memakai cadar di lingkungan PTKIN diniatkan untuk mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan karena pengalaman di masa lampau, namun ada juga yang menganggap pelarangan memakai cadar ini justru berlawanan dengan prinsip moderasi beragama yang dibawa.

Semester tujuh yang dulunya semester lima dia bercadar semester satu sampai semester lima dia bercadar sorry sampai semester empat dia bercadar sampai akhirnya keluar pelarangan itu dan dia sudah membuka cadarnya sekarang itu maksudnya saya begini hak-hak seperti itu yang yang tidak bisa di dibatasi oleh kampus gitu hal hal seperti itu yang tidak bisa dibatasi atau tidak boleh dibatasi oleh kampus menurut saya karena itu adalah hak seseorang itu adalah sebuah [eee] prerogatif seseorang untuk entah dia ingin memakai cadar ataupun dia memakai celana seperti apa karena tidak karena tidak menyalahi aturan agama gitu kan nah ini kok kampus islami tapi tidak moderat juga gitu loh tidak tidak bikin moderasi juga gitu kan kan kan itu sesuatu hal yang aneh gitu ya kan dan hal yang perlu dikritisi menurut saya.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Ya mungkin [ee] aturan-aturan yang mendorong itu [ee] contohnya mungkin [ee] dengan, dengan dilarangnya memakai cadar gitu kan Kak, Nah.. [ee] itu seperti tidak menghargai tapi mungkin [ee] kita melihat dari UIN yang memiliki pengalaman, ya mungkin awalnya saya juga terlalu ih apa sih maksudnya juga Uin ngelarang pake cadar segala macem ya. ..Nah

untuk [hmm] iya ternyata dengan mereka memiliki sejarah juga tentang cadar itu sendiri dimana mungkin ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tentang cadar. Nah contohnya itu adalah [ee] pas ane (saya) lupa diceritain tahun berapa ya sama iyah (suara tidak jelas) pokoknya ada sejarah kenapa UIN [ee] tidak boleh atau tidak boleh pake cadar tuh. [ee] itu salah satunya adalah ada mahasiswi yang memang ketika absen itu (suara tidak jelas) gitu Kak, itu yang pertama. Itu kan menyalahi aturan gitu Kak. [ee] itu kan kalo melihat dari hukum islam sendiri itu kan sebuah kebohongan ya Kak. Nah terus yang kedua adalah tentang ada satu komunitas yang memang itu bercadar semua tetapi[ee] sebenarnya bukan cadarnya yang salah tapi penyalahgunaan cadarnya itu tapi memang dibelakangnya mereka itu [ee] radikal, ketika (?pulangnyanya?) merakit BOM dan seperti itu...

Mahasiswa non-key actors, 2020

Terakhir terkait dengan aturan adalah belum adanya aturan yang menjadikan rumah/pusat kajian moderasi beragama menjadi Organisasi dan Tata Kerja Struktural di PTKIN itu sendiri (n=6). Hal ini tentu berdampak pada proses kerja rumah/pusat kajian moderasi beragama yang tidak bisa punya *account* dalam mengatur anggaran kegiatan yang mendorong moderasi beragama.

Oke, perlu juga disampaikan dalam pertemuan ini mengenai kebijakan anggaran, bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh setiap Satker termasuk UIN Bandung itu harus terkait dengan Lembaga-lembaga yang sudah ada ortakernya dan di UIN bandung saya kira mungkin di PTKIN lain, bahwa moderasi Beragama itu tidak termasuk dalam Ortaker sehingga karena itu tidak ada ortaker, tentu maka dari itu regulasi yang ada itu tidak bisa memberikan akun khusus kepada rumah moderasi beragama.

Pejabat PTKIN, 2020

Saran. Pelaksanaan yang telah dilakukan dan kekurangannya tidak lepas dari kesempatan untuk ditingkatkan kembali performanya. Beberapa saran yang muncul untuk implementasi moderasi beragama muncul dalam dua kategori besar yaitu (1) Pendidikan dan Pengajaran (2) Budaya Organisasi. Dalam hal pendidikan pengajaran, salah satu yang muncul adalah agar moderasi beragama dijadikan satu MKDU yang memuat nilai-nilai moderasi beragama versi PTKIN tersebut (n=5).

Tentang sebenarnya kalo mau ada moderasi beragama itu adalah tentang mata kuliah [ee] kejadi dirian [ee] UIN Bandung, yaitu misalnya tentang ke-sunan gunung djati-an. Ya mungkin ke sunan gunung djati-an ini

menjadi bagian [ee] bagaimana [ee] karena sunan gunung djati kan juga punya pandangan moderat dalam beragama

Dosen, 2020

Menurut saya ya ini menjadi kebijakan tersendiri, untuk memberikan kurikulum yang, mungkin dari materi tersendiri untuk, kalo sudah punya...apa maksud saya, poin-poin tadi, penting terkait dengan rumusannya jelas, gitu kan. Maka Moderasi Beragama itu penting untuk menjadi sebuah, sebuah keilmuan tersendiri.

Dosen, 2020

Selain itu juga disebutkan adanya kebutuhan untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan mengenai moderasi beragama (n=8). Pelatihan ini bisa ditujukan untuk dosen baru, khususnya mengenai bagaimana menyisipkan nilai moderasi beragama pada proses belajar mengajar (FGD, 2020). Selain itu pelatihan juga bisa berupa penyamaan *mindset* moderasi beragama pada dosen baru, khususnya yang lulusan non-agama dan juga yang sifatnya *re-charge* pada dosen senior (FGD, 2020). Dalam pelatihan ini juga dibutuhkan pedoman yang memasukkan moderasi beragama di perkuliahan, agar bisa sama dan terstandarisasi (n=5)

Sebagai dosen baru, memang sangat perlu ya, peningkatan SDM, Mbak. Terutama, saya gitu ya. [ee] jadi [ee] yang dibutuhkan PTKIN agar dapat mengintegrasikan Moderasi Beragama, salah satunya adalah, mungkin dalam bidang teknologi pembelajaran Mbak

Dosen, 2020

Mungkin ada pelatihan yang lebih masif, kepada dosen-dosen baru, yang belum punya mindset yang sama, ya, menginduksi itu. Kemudian, men-charge kembali [ee] tenaga kependidikan

Dosen, 2020

Jadi ada semacam pedoman yang bisa menjadi rujukan dasar untuk bisa diterjemahkan nanti di dalam berbagai prodi atau mata kuliah yang ada gitu, ke mana nih arah? Artinya perlu persepsi yang sama, butuh persepsi yang sama tapi di dalam aplikasinya nanti ya beragam. Jadi ada semacam rumah moderasi itu mengeluarkan semacam panduan.

Dosen, 2020

Saran berikutnya terkait budaya organisasi adalah operasionalisasi visi-misi yang terintegrasi (n=5) disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dari kegiatan *mainstreaming* yang dilakukan (n=2).

Mempertajam visi UIN sendiri ya [ee] dari aspek wasatiahnya karena review kurikulum itu dimulai dari visinya ya VMTS nya kan gitu [ee] itu, itu nomor satu ya wasatiyyah. [ee] kalau diimplementasikan dalam kurikulum sebenarnya sangat strategis.

Pejabat PTKIN, 2020

Harus ada kegiatan-kegiatan moderasi beragama dan dikontrol, karena nama nya kegiatan apalagi REINSTRA itu kan ada evaluasinya, kita pena, punya penjaminan mutu dan penjaminan mutu ini be bekerja secara berkala jadi akan dimonitoring dan dievaluasi apakah semua kegiatan sebagaimana yang ada di REINSTRA itu sudah [ee] berjalan dan di renopnya juga bunyi nggak gitu.

Pejabat PTKIN, 2020.

Selain itu, diharapkan PTKIN dapat lebih sering mengadakan kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang yang lebih beragam (n=11). Kegiatan ini bisa diadakan dengan kolaborasi dengan organisasi lain atau umat agama/aliran lain.

Kurang ada wadahnya antar elemen ekstra mahasiswa di UIN. Mungkin bisa dijadikan studi banding di beberapa kampus. Misalkan, kampus mana itu yang dekat Bethesda, lupa saya kan. Kampus apa itu? Ya, non-islam. Ada lah itu kampus. Mungkin Atmajaya ya. Mungkin kita studi banding, saling sharing mengenai moderasi beragama atau hal yang lain sebagainya. Ya, seperti itu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

kegiatan kemahasiswaan perlu diarahkan [ee] banyak berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok yang berbeda tidak harus semuanya kiri atau kanan ya jadi ada yang kiri ada yang kanan, ada yang seagama ada yang beda agama. Semakin banyak kesempatan (suara tidak jelas) interaksi dengan kelompok yang berbeda tentu [ee] akan semakin membuka wawasan dan kesadaran mahasiswa itu. Tentu-tentu didampingi dengan mentor yang, yang cakap dalam hal itu.

Pejabat PTKIN, 2020

Selain itu, PTKIN juga diharapkan dapat ikut serta mensosialisasikan moderasi beragama di Masyarakat (n=6). Dalam hal ini diharapkan PTKIN tidak hanya bermain di kalangan akademis, tetapi juga turun membawa moderasi beragama ke kalangan akar rumput, yang tentu saja membutuhkan pendekatan yang berbeda (FGD, 2020) sehingga moderasi beragama bukan hanya menjadi topik di kalangan elit ilmu.

Justru lebih menarik kalo moderasi beragama itu, di luar UIN gitu. Karena mereka kan tidak mendapatkan, materi-materi ke-Islaman, dibanding

dengan kita. Saya ini, wacana yang cukup menarik. [e] bagi orang-orang di luar sana [ee] yang tidak, mendapatkan pendidikan ke-Islaman yang baik atau pendidikan agama yang cukup baik. Jadi itu sebenarnya isu ini, cukup menarik gitu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Jadi mengajari gimana mereka sudah punya kesadaran dan kemudian menyebarkan itu tidak hanya di kampus tapi di masyarakat juga. Dan mungkin desiminasi soal logika-logika... moderasi itu yang kemudian menurut saya perlu disebar ke masyarakat sehingga kita tidak kemudian dianggap sebagai yang aneh gitu ya, malah kita yang dianggap aneh padahal sebenarnya, [ee], tidak gitu.

Pejabat PTKIN, 2020

Saran yang terakhir adalah terkait kebutuhan institusi rumah/pusat kajian moderasi beragama sebagai organisasi dan tata kerja struktural sehingga mampu mengatur penganggaran sendiri (n=3). Hal ini dibutuhkan agar Rumah/Pusat Kajian Moderasi Beragama dapat dengan leluasa mengatur anggaran sehingga dapat dengan mudah fokus merencanakan kegiatan yang dapat meningkatkan moderasi beragama di PTKIN (FGD, 2020). Tentu saja kebutuhan ini terwujud dalam regulasi yang harusnya didorong afirmasi dari Kementerian Agama.

Kalau dalam konteks UIN Bandung meminta supaya moderasi beragama masuk dalam ortaker, sehingga kalau sudah menjadi ortaker dalam perguruan tinggi yang punya satker BLU akan lebih mudah dengan penganggaran karena punya akun sendiri. Itu kira-kira yang dibutuhkan kampus dari Kemenag, kalau dari anggaran itu hanya terkait kebijakan, kalau UIN Bandung karena dia BLU bisa menggali dari apa yang dimiliki, kalau non satker BLU mungkin butuh afirmasi dr Kemenag.

Pejabat PTKIN, 2020

Gender

Pengaruh Perbedaan Perempuan dan Laki-laki di dalam Moderasi Beragama. Salah satu temuan yang muncul dari analisis survei adalah bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda dalam faktor-faktor moderasi beragama (lihat Tabel 3.5.x3). Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa perempuan dan laki-laki umumnya tidak mempengaruhi variabel moderasi beragama, namun ada dua variabel yang diprediksi oleh perbedaan gender:

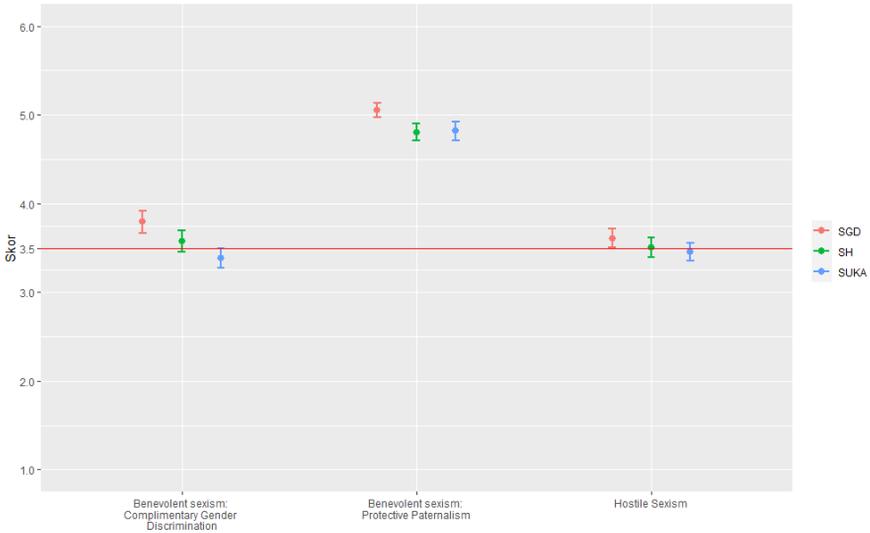
Perempuan cenderung memiliki skor empati eksternal yang lebih rendah ($b = -.19$, $t(833) = -3.79$, $p = .0002$).

Skor anti kekerasan di perempuan cenderung lebih rendah dibanding laki-laki ($b = .14$, $t(833) = 2.76$, $p = .006$).

Sikap seksisme. Sikap seksisme diukur menggunakan **Ambivalent Sexism Inventory** (). Instrumen ini didasari oleh konsep bahwa seksisme dapat termanifestasi tidak hanya melalui tindakan-tindakan yang negatif saja (*hostile sexism*), tapi kadangkala berbentuk tindakan yang umumnya dilihat positif, walaupun sebenarnya mendiskriminasi atau merendahkan perempuan (*benevolent sexism*). Kedua jenis seksisme inilah yang diukur oleh instrument ini.

Analisis faktor yang dilakukan menggunakan sampel mahasiswa umum ($N = 897$) menemukan total 3 faktor di dalam adaptasi dari ASI, satu faktor untuk *hostile sexism*, dan dua faktor terpisah untuk *benevolent sexism*, yaitu *complimentary gender discrimination* dan *protective paternalism*. Ketiga faktor ini merupakan sebagian dari faktor yang dihasilkan oleh alat ukur ini sebelum adaptasi (Glick & Fiske, 1996). *Complimentary gender discrimination* mendiskriminasi dengan cara menganggap perempuan makhluk yang berbeda dari laki-laki, lebih baik dalam segala cara. *Protective paternalism* merupakan sikap diskriminatif dalam bentuk anggapan bahwa perempuan butuh perlakuan istimewa, sebagai gender yang lebih rapuh dan butuh dilindungi.

Dari survei terhadap mahasiswa umum di ketiga PTKIN ($N = 897$), ditemukan bahwa nilai untuk *complimentary gender discrimination* ($M = 3.59$, $SD = 1.08$) dan *hostile sexism* ($M = 3.52$, $SD = .94$) cenderung ada di titik tengah. Hal ini menunjukkan ambivalensi terkait dengan kedua bentuk seksisme tersebut. Beda dengan keduanya, nilai rata-rata *protective paternalism* sangat tinggi ($M = 4.89$, $SD = .85$). Hal ini menunjukkan bahwa di ketiga PTKIN, bentuk seksisme yang paling umum adalah anggapan bahwa perempuan perlu perlindungan khusus.



Gambar 4. Gambaran ASI di Sampel Mahasiswa

Analisis *multiple regression* dengan variabel-variabel demografis serta skor ASI di mahasiswa rujukan dan dosen/pejabat fakultas sebagai prediktor. Berikut adalah temuan-temuan dari analisis tersebut:

- *Complimentary gender discrimination* diprediksi oleh jenis kelamin ($b = .24$, $t(833) = 3.27$, $p = .001$), tingkat kuliah ($b = -.14$, $t(833) = -3.34$, $p = .0008$), apabila mahasiswa tersebut berasal dari madrasah aliyah ($b = .17$, $t(833) = 2.21$, $p = .02$), dan nilai rata-rata *complimentary gender discrimination* di mahasiswa rujukan di masing-masing PTKIN ($b = .69$, $t(833) = 2.61$, $p = .009$). Mahasiswi cenderung menunjukkan *complimentary gender discrimination* yang lebih tinggi, yang artinya mereka lebih merasa perempuan lebih baik daripada laki-laki. Lebih lama mahasiswa tersebut sudah berkuliah di PTKIN juga memprediksi nilai *complimentary gender discrimination* yang lebih rendah. Mahasiswa yang berasal dari madrasah aliyah cenderung memiliki skor yang lebih tinggi. Terakhir, jika mahasiswa-mahasiswa rujukan di PTKIN yang sama dengan partisipan memiliki nilai *complimentary gender discrimination* yang tinggi, maka partisipan kemungkinan juga memiliki nilai yang tinggi.

- *Protective paternalism* diprediksi oleh jenis kelamin ($b = -.21, t(833) = -3.71, p = .0002$), tingkat kuliah ($b = -.07, t(833) = -2.21, p = .03$), dan keterlibatan di kelompok studi Islam ($b = .12, t(833) = 2.07, p = .04$). Skor *protective paternalism* pada mahasiswi lebih rendah dibanding mahasiswa. Partisipan yang sudah lebih lama menjadi mahasiswa di PTKIN juga menunjukkan tingkat *protective paternalism* yang lebih rendah. Jika mahasiswa ikut kelompok studi Islam, kemungkinan ia akan memiliki sikap *protective paternalism* yang lebih kuat.
- Terakhir, *hostile sexism* hanya diprediksi oleh jenis kelamin ($b = -.64, t(833) = -10.66, p < .0001$). Perempuan memiliki nilai *hostile sexism* yang lebih rendah dibanding laki-laki.

Tabel 20. Model Regresi ASI

	B. Sexism Com. Gender Disc.	B. Sexism Protective Paternalism	Hostile Sexism
Perempuan	0.236** (0.072)	-0.210*** (0.057)	-0.644*** (0.060)
Usia	0.017 (0.010)	0.008 (0.008)	-0.008 (0.008)
Organisasi Int.	0.077 (0.099)	0.069 (0.078)	0.067 (0.083)
Organisasi Eks.	-0.112 (0.076)	-0.053 (0.060)	-0.025 (0.064)
Tingkat Kuliah	-0.141*** (0.042)	-0.073* (0.033)	-0.061 (0.035)
Ikut KSI	-0.039 (0.075)	0.121* (0.059)	-0.047 (0.062)
Prodi St. Agama	-0.028 (0.077)	0.002 (0.060)	0.110 (0.064)
Dari Aliyah	0.173* (0.078)	0.045 (0.062)	0.060 (0.066)
Dari Pesantren	-0.059 (0.084)	-0.051 (0.066)	-0.019 (0.070)
Kontak Agama Lain	0.017 (0.018)	-0.004 (0.014)	0.006 (0.015)
Mhs. Rujukan	0.688** (0.263)	-0.961 (0.852)	-0.310 (0.825)
DosJab	-0.776 (0.694)	2.879 (2.066)	0.571 (0.740)

Observations	846	846	846
R ²	0.064	0.048	0.135
Adjusted R ²	0.050	0.035	0.123
Residual Std. Error (df = 833)	1.035	0.813	0.867
F Statistic (df = 12; 833)	4.740***	3.536***	10.831***

Indikator Gender dalam Moderasi Beragama. Salah satu hal baru yang dibawa PPIM dalam indikator moderasi beragama adalah sikap positif terhadap kesetaraan gender. Peneliti juga menanyakan sejauh mana persetujuan sikap positif terhadap kesetaraan gender untuk masuk ke dalam salah satu indikator perilaku orang yang punya moderasi beragama. Hasil analisis diskusi menunjukkan bahwa mayoritas partisipan setuju jika orang yang punya moderasi beragama mempunyai pandangan yang positif antara kesetaraan laki-laki dan perempuan (n=11). Ini juga merupakan respon dari fenomena kelas sosial di masyarakat yang memomorduakan perempuan yang masih terjadi (FGD, 2020). Namun ada juga yang merasa *term* kesetaraan harus diganti menjadi keadilan gender (n=5) karena memang ada hal-hal yang secara biologis berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga tidak bisa dianggap setara. Keadilan menjadi dipilih karena bersikap adil berarti memberikan hak individu sesuai dengan gendernya dan individu juga diminta untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kodratnya (FGD, 2020).

keberpihakan kepada gender itu yang saya belum masukan dan saya juga setuju masukan salah satu item bahwa moderasi beragama itu salah satu adanya keberpihakan terhadap dengan gender itu FAS komen saya.

Pejabat PTKIN, 2020

Saya mengusulkan istilahnya itu bukan kesetaraan gender, keadilan gender. Ya karena itu berbeda di, kalo di dalam islam itu [ee] tidak semuanya harus setara karena kalau dipaksakan kesetaraan itu malah menimbulkan ketidakadilan, jadi menurut saya ya waktu dulu membantu Prof. Tuti itu tentang melakukan studi perempuan itu diketahui bahwa dalam al-quran atau dalam islam itu memang dia, dia menekankan keadilan bukan kesetaraan, ada yang memang tidak setara tapi adil gitu jadi itu beda. Jadi kalo sudah diperoleh keadilan, orang gak mempersoalkan setara tidak setara gitu jadi [ee]jadi dari saya seperti itu jadi mungkin

bukan [ee] apa namanya apa equity atau equality istilahnya itu yang [ee] keadilan, keadilan gender [ee] bukan dalam islam ada yang tidak setara tapi itulah keadilan.

Pejabat PTKIN, 2020

Hak Perempuan. Hasil diskusi juga menunjukkan hasil yang positif untuk hak-hak yang diterima dan bisa dilakukan oleh perempuan. Tema yang muncul dalam diskusi adalah Perempuan bisa dan berhak menjadi pemimpin (n=8), punya hak dalam berpakaian (n=7) dan juga bisa bekerja (n=3). Walau terkait menjadi pemimpin, masih ada bias-bias yang melekat pada perempuan seperti dianggap emosional (n=3) atau masih punya *belief* memang perempuan tidak boleh memegang posisi kepemimpinan tertinggi (n=4).

Bandung sendiri ini sudah menjadi hal yang lumrah ya jika ada pimpinan organisasi baik itu di HMJ, DEMA F maupun DEMA dan untuk perempuan sendiri sudah tidak menjadi hal yang tabu jika mereka ingin mencalonkan diri maupun memilih.

Mahasiswa Key actors, 2020

Dalam konteks ekonomi apalagi pak, sudah banyak wanita-wanita karir yang bisa menghidupi kebutuhan dirinya sendiri dan bisa memenuhi [ee] mencukupi kebutuhan rumah tangganya buat suaminya dan buat anak-anaknya seperti itu.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Tetapi [eee] tapi kan kalo misalnya di syariat gitu kan, perempuan memang tidak bisa untuk dijadikan pemimpin tertinggi gitu kan, tertinggi dalam kepemimpinan gitu, nah itu juga yang perlu [ee] diingat-ingat karena emang setahu saya, kaya gitu, ya yang diajarkan seperti itu, ketika, boleh kita, bukan memanfaatkan gitu ya, [ee] berjalan bersama dengan perempuan dalam konteks apa pun itu tetapi ketika memang dalam konteks kepemimpinan itu perempuan emang, setahu saya ya dilarang memimpin di urutan tertinggi, kalo, beda ya dengan ketua, misalnya dalam organisasi ya, gambaran kecilnya gitu, jadi ketua itu, nggak boleh, tapi ini konteksnya yang luas gitu, yang luas ya.

Mahasiswa Non-Key Actors, 2020

Namun hak-hak perempuan dalam menjadi pemimpin, bekerja dan lainnya boleh terus dipegang selama dirinya tetap menjalankan syariat Islam (n=8). Menjalankan disini maksudnya adalah tetap menjalankan hal-hal yang dianggap wajib dalam syariat Islam seperti mematuhi suami dan tidak melakukan hal yang dilarang seperti menjadi imam shalat padahal ada laki-laki (FGD, 2020).

MHS05 yang bahwa perempuan harus berbakti kepada suami, setahu saya itu memang benar tapi dalam konteks syariat agama, ketika dia sudah menikah maka memang tugasnya adalah berbakti kepada suami, dari yang saya tahu juga, ketika istirejika ingin berpuasa harus dengan izin suami dulu.

Mahasiswa non-key actors, 2020

Peran Perempuan dalam Moderasi Beragama. Dalam hal mensosialisasikan moderasi beragama, Perempuan dan laki-laki mempunyai posisi dan kewajiban yang sama (FGD, 2020). Posisi perempuan dianggap juga strategis dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama karena perempuan dianggap bisa lebih mudah merangkul teman-teman di sekelilingnya, begitu juga dengan orang-orang di lingkungan tempat tinggal seperti ibu-ibu PKK atau Posyandu (n=4).

Untuk mendorong teman-teman yang lain dalam moderasi beragamanya tentunya tidak salah atau [ee] [batuk] harus bisa merangkul, harus bisa merangkul dan memberikan pengertian kepada teman-temannya ke pada teman-teman seangkatan, orang-orang yang di sekitarnya.

Mahasiswa Key Actors, 2020

Selain itu, perempuan juga mempunyai posisi strategis dalam peran domestik rumah tangga sebagai Ibu, yang penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada anak-anaknya kelak (n=4). Karena peran yang cukup strategis baik di lingkungan maupun rumah tangga, peserta FGD menganggap pentingnya bagi perempuan dalam meningkatkan wawasan moderasi beragama (FGD, 2020).

Itu kita dapat melakukan hal dengan cara kita perempuan misalnya [ee] kita misalnya suatu saat menjadi ibu, kita dapat mengajarkan moderisasi beragama kepada anak kita untuk tidak berpikir terlalu ekstrim, atau pokoknya mengajarkan anak kita untuk beragama dengan tepat dan tidak melampaui batas.

Mahasiswa non-key actors, 2020

Implementasi PTKIN terkait *mainstreaming* Gender. Satu PTKIN, yaitu UIN Sunan Kalijaga juga sudah melakukan *mainstreaming* topik gender dalam organisasinya. Salah satunya adalah dengan memasukkan materi kesetaraan gender dalam kurikulum (n=7). Praktiknya adalah bisa memasukkan materi kesetaraan gender dalam mata kuliah yang ada ataupun membuat gender menjadi jurusan di Pascasarjana (FGD, 2020).

Ada fakultas apa opo anu kerja sama dengan fakultas Sya Syariah, tidak hanya di UIN Sunan Kalijaga tetapi beberapa fakultas di Syariah di [aa] seluruh [ee] di PTKIN [ee] kemudian untuk [ee] [ee] apa ya, memasukkan ide kesetaraan gender dan ham itu untuk dalam beberapa mata kuliah misalnya.

Pejabat PTKIN, 2020

di UIN Sunan Kalijaga juga di Paska sudah ada [ee] Islam dan kajian gender di level S2 di Paska sendiri, karena dulu yang inisiatifnya juga dari temen-temen PSW, PJB01 dan temen-temen yang mengodog dan hingga [ee] dari awal di dua tahun pertama pernah di be, di kasih beasiswa ya PJB01 ya, dan kemudian sekarang juga masih berlanjut temen-temen juga dan kita juga menjaga itu.

Pejabat PTKIN, 2020

Selain itu UIN Sunan Kalijaga juga sudah menyiapkan dukungan fasilitas di kampus yang ramah bagi perempuan (n=5) seperti adanya kantin ramah untuk perempuan, ruang menyusui, dan fasilitas perpustakaan yang bisa dipakai untuk kajian gender (FGD, 2020).

Di FISHUM itu sudah ada ruangan laktasi yang permanen, ruang Ibu menyusui di, di Da'wah kalo ngga salah ada kantin ramah perempuan gitu loh.

Pejabat PTKIN, 2020

Kemudian kita punya perpustakaan juga yang kemudian [ee] menjadi apa ya, [ee] apa namanya rumah bersama teman-teman aktivis gender, mahasiswa [ee] IKGE, Islam dan Perjanjian dari yang [ee] bisa menjadi referensi gitu, untuk [ee] dalam melakukan [ee] dalam apa ya, dalam studi atau penelitian yang mereka lakukan gitu.

Pejabat PTKIN, 2020

Yang terakhir adalah adanya Pusat Studi Gender sebagai *focal point* dari *mainstreaming gender* yang dilakukan oleh PTKIN itu sendiri (n=2). Sayangnya dalam diskusi, adanya Pusat Studi ini hanya muncul dalam diskusi Pejabat PTKIN di UIN Sunan Kalijaga, walau Pusat Studi Gender juga ada di UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Gunung Djati.

Di level yang lebih luas misalnya kita di PSW juga, kita juga punya komunitas mungkin (tertawa) ini komunitas ini cukup menarik, informal, kita sebut komunitas Kartini gitu ya, perempuan-perempuan di Kartini yang sebetulnya lebih idenya masih sama tentang penguatan [ee] apa namanya [ee] terkait pada penguatan kapasitas pengarusutamaan gen-

der sesungguhnya gitu lho, bagaimana perempuan berdaya, kemudian melakukan [ee] apa ya [ee] banyak perubahan baik dalam apa ya [ee] struk [eee] dalam aktivisme mulai dari [aa] [aa] persoalan charity hingga hingga diskusi yang lain gitu loh, begitu sih.

Pejabat PTKIN, 2020

3.7 Pembuatan Modul Pelatihan

Protokol

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa empati kepada pemeluk agama yang berbeda dan pemeluk aliran yang berbeda dalam satu agama, memainkan peranan penting dalam mencegah paparan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Empati, atau memahami apa yang orang lain inginkan, rasakan dan bagaimana mereka melihat dunia menjadi kemampuan yang penting, terutama saat berinteraksi dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Mengingat hal ini, penting bagi setiap PTKIN memastikan mahasiswanya terus berusaha mengembangkan moderasi beragama dalam dirinya. Dengan begitu, mahasiswa PTKIN tidak hanya diharapkan cerdas secara kognitif saja dan menjalankan praktik beribadah yang bersifat vertikal, tetapi juga menjalankan tuntutan dirinya sebagai umat yang *rahmatan lil 'alamin*, yang tentu di dalamnya mempunyai *social skills* yang bagus dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakangnya. *Social skills* adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang dalam konteks sosial tertentu secara spesifik yang diterima secara sosial dan dalam waktu yang bersamaan juga menguntungkan satu dengan lain (Combs & Slaby, 1977 dalam Merrel & Gimple, 1988).

Upaya untuk mengarusutamakan moderasi agama dalam lingkungan PTKIN mestilah dilakukan secara terpadu oleh Rumah Moderasi Beragama. Untuk itulah pendekatan yang digunakan harus melingkupi langkah-langkah yang bersifat preventif, promotif, hingga kuratif dan rehabilitatif. Dalam kaitan itu, kegiatan ini mencoba menawarkan protokol pengarusutamaan moderasi beragama di PTKIN yang disingkat dengan SAPA-SALAM-RANGKUL (bisa diringkas menjadi SMR, dibaca “semar”).

1. Pendekatan Preventif SAPA (Selidik-Asesmen-Pendampingan) digunakan sebagai pengejawantahan konsep bahwa

PTKIN adalah “Rumah Moderasi” itu sendiri. Dengan kata lain, semua mahasiswa yang belajar di PTKIN tidak sekedar memiliki moderasi yang baik, dalam poin tertentu bahkan diharapkan sebagai *marketeters* moderasi beragama di masyarakat.

2. Pendekatan Promotif SALAM (Sinergisasi, Asesmen, Latih, Monitoring dan evaluasi) menekankan adanya sinergisasi pihak PTKIN dalam hal ini Rumah Moderasi Beragama kepada pihak-pihak potensial, seperti lembaga kemahasiswaan untuk bersama melakukan kegiatan dan intervensi penguatan moderasi beragama di PTKIN.
3. Pendekatan Kuratif-Rehabilitatif RANGKUL (Respon dan Rehabilitasi, Analisis, Narasikan, Gali, Kaji Ulang, Lakukan), Perlu diperhatikan antara Respon dan Rehabilitasi adalah proses siklus, sehingga bisa saja setelah proses rehabilitasi dilakukan ada respon lanjutan, apakah rehabilitasi dianggap berhasil, perlu dilanjutkan, atau malah dihentikan.

Modul Pelatihan

Salah satu kegiatan yang ditawarkan dalam aspek promotif SALAM adalah pelatihan calon anggota pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan PTKIN. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pengurus lembaga kemahasiswaan turut menghayati bahwa usaha-usaha pengarusutamaan moderasi beragama tidak selalu bersifat *top-down*, tetapi usaha bersama yang bersifat partisipatoris.

Modul pelatihan moderasi beragama ini disusun sebagai pelengkap praktis dari Protokol Sapa-Salam-Rangkul, terutama bagian Salam. Modul ini disusun sedemikian rupa sehingga bisa digunakan oleh pihak PTKIN atau Rumah Moderasi dalam ikhtiar meningkatkan moderasi beragama calon pengurus organisasi kemahasiswaan. Tentu perlu diperhatikan bahwa moderasi beragama yang dimaksud di sini, sebagaimana yang telah dijelaskan di Protokol, adalah sebagai *social skills*.

Tujuan pelatihan yang diakomodasi dalam modul pelatihan ini adalah (1) menyadari keragaman identitas, pilihan moral, dan belajar menghargai keragaman tersebut (kemampuan *flexibility*); (2) menyadari bias-bias pribadi terkait relasi dengan kelompok lain, seperti stereotip, prasangka, subordinatif, marginalisasi dan

diskriminasi dan berusaha untuk tidak terbawa dalam bias-bias tersebut; (3) meningkatkan kemampuan empati, baik afektif dan *perspective taking*; dan (4) meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

BAB IV

Capacity Building dan Technical Assistance

4.1 Capacity Building

Desain Capacity Building

Capacity Building yang dilakukan menyasar Institusi/Rumah Moderasi Beragama di PTKI. Saat acara diadakan diketahui sudah ada 38 rumah moderasi beragama yang dibentuk oleh PTKI di Indonesia. Dengan usia yang relatif baru, tentu saja banyak dari rumah moderasi beragama ini pasti masih mencari dan membangun bentuk mengenai apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab institusi tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan referensi atau bahan mengenai model, modul dan penelitian mengenai moderasi beragama di kalangan PTKIN.

Untuk memenuhi tujuan di atas, ada kebutuhan juga bagi rumah moderasi beragama untuk membangun jejaring dengan Kementerian Agama, sebagai *stakeholder* yang menaungi dan juga sesama Rumah Moderasi Beragama. Jejaring dengan Kementerian Agama bertujuan untuk mengetahui perkembangan terbaru arah rumah moderasi beragama sedangkan dengan sesama rumah moderasi beragama bertujuan untuk bertukar pikiran dan praktik baik yang dapat diadaptasikan dalam meningkatkan moderasi beragama di PTKI.

Capacity Building didesain dalam dua kegiatan besar yaitu

- a. Presentasi Materi
 - i. Hasil Penelitian dan Tawaran Modul dan Protokol dari Tim Peneliti
 - ii. Update terbaru mengenai kebijakan dari Kementerian Agama Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
- b. Focus Group Discussion (FGD) yang membahas mengenai
 - i. Hasil penelitian, modul, protokol dan kebijakan dari Kementerian Agama
 - ii. Rencana untuk membangun jejaring antar sesama rumah moderasi beragama

Tujuan dari *Capacity Building* ini adalah:

1. Memperoleh masukan mengenai hasil penelitian, modul dan protokol dari institusi rumah moderasi beragama
2. Mengidentifikasi penerimaan rumah moderasi beragama terhadap modul dan protokol yang dibuat
3. Inisiasi awal dalam membangun forum jejaring antar sesama Rumah Moderasi Beragama

Dari segi penelitian, *capacity building* dilakukan dengan desain hanya *post-test* dalam mengukur sikap atau penilaian individu karena pengambilan data dilakukan sehabis dilakukannya *treatment* atau intervensi.

Target Capacity Building

Target dari *Capacity Building* ini adalah Ketua/Pengurus Rumah/Institusi Rumah Moderasi Beragama yang sudah dibentuk. Sampai undangan disebar, tim mendapatkan info ada 34 Rumah Moderasi Beragama yang sudah dibentuk, dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 21. Nama PTKIN yang mempunyai Rumah Moderasi Beragama

Nama PTKIN	
1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	18 UIN Mataram
2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon	19 IAIN Jember

3 UIN Sunan Gunung Djati	20 IAIN Samarinda
4 IAIN Metro	21 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5 IAIN Surakarta	22 UIN Jakarta
6 IAIN Salatiga	23 IAIN Ternate
7 UIN Walisongo Semarang	24 UIN Antasari Banjarmasin
8 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	25 IAIN Palangka Raya
9 IAIN Kudus	26 UIN Alauddin Makassar
10 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	27 IAIN Madura
11 UIN Raden Intan Lampung.	28 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
12 IAIN Palu	29 IAIN Bukittinggi
13 IAIN Purwokerto	30 IAIN Pontianak
14 IAIN PEKALONGAN	31 STAIN Sultan Abdurrahman Kep. Riau
15 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	32 IAIN Manado
16 UIN Sunan Ampel Surabaya	33 UIN Sumatera Utara Medan
17 IAIN Curup	34 IAIN Palopo

Namun pada hari H acara, tim peneliti mendapat informasi ada sekitar 38 Rumah Moderasi Beragama yang sudah dibentuk.

Alat Ukur Capacity Building

Alat ukur *capacity building* menggunakan kuesioner daring yang akan diisi oleh perwakilan rumah moderasi beragama yang mengikuti kegiatan *capacity building* ini. Alat ukur ini mengidentifikasi materi yang disampaikan dalam *capacity building* yaitu hasil penelitian, protokol SMR dan Modul Pelatihan Moderasi Beragama sebagai *social skills*. Adapun pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner daring adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Indikator Alat Ukur Capacity Building

No	Perihal	Pertanyaan	Respon Jawaban
1.	Hasil Penelitian	Topik penelitian ini relevan untuk isu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Sangat Tidak Sesuai (1) - Sangat Sesuai (4)
		Pemaparan hasil penelitian sudah jelas untuk saya	

		Hasil Penelitian ini relevan dengan kondisi di Perguruan Tinggi tempat saya berada	
		Hasil Penelitian bisa menjadi masukan dalam mendesain program di Institusi saya	
2.	Protokol SMR	Pendekatan SAPA-SALAM-RANGKUL relevan diterapkan di institusi/PTKI tempat saya berada	
		Saya mau menggunakan/ mengadaptasi Pendekatan SAPA-SALAM-RANGKUL di institusi/PTKI tempat saya berada	
		Apa masukan Anda terkait pendekatan SAPA-SALAM-RANGKUL?	<i>Open-Ended</i>
3.	Modul Pelatihan	Desain Pelatihan untuk Mahasiswa yang dipaparkan sesuai jika digunakan di institusi/PTKI tempat saya berada	Sangat Tidak Sesuai (1) - Sangat Sesuai (4)
		Saya mau menggunakan/ mengadaptasi Desain Pelatihan yang dipaparkan di institusi/PTKI tempat saya berada	
4.	Kegiatan <i>Capacity Building</i>	Apa masukan Anda terkait dengan kegiatan <i>capacity building</i> ini secara keseluruhan?	<i>Open-Ended</i>
5.	Kesediaan bergabung dalam konsorsium rumah moderasi beragama	Apakah Anda bersedia bergabung dalam konsorsium kerja sama antar Rumah Moderasi Beragama seluruh PTKIN?	Bersedia-Tidak Bersedia

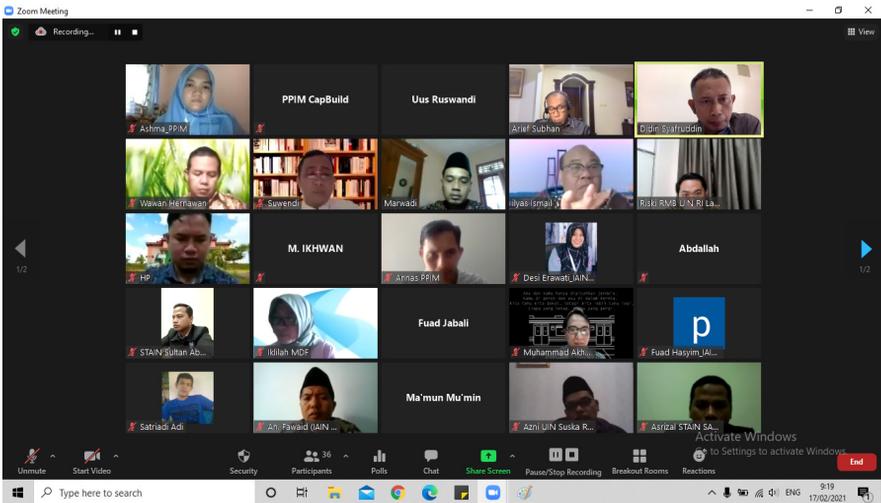
Pertanyaan ini dibuat dalam bentuk kuesioner daring dan disebar-kan ke peserta *capacity building* maksimal 20 menit sebelum acara selesai.

Pelaksanaan *Capacity Building*

Capacity Building dilakukan di tanggal 17 Februari 2021 dari jam 09.00-12.00 WIB lewat aplikasi *zoom meeting*. Sesuai dengan desain kegiatan, selain tim peneliti, turut hadir juga pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang awalnya direncanakan akan dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., namun karena kesibukan beliau, akhirnya beliau diwakili oleh Dr. Suwendi, M.Ag., Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Ada 38 dimana sekitar 33 pe-

serta yang berasal dari berbagai macam Rumah Moderasi Beragama PTKI yang mengikuti *capacity building* ini. Terkait gender, hanya 11% dari peserta yang hadir yang merupakan partisipan perempuan. Hal ini juga disimpulkan bahwa posisi ketua/direktur rumah moderasi beragama masih banyak diemban oleh laki-laki.

Acara dimulai sekitar 10 menit dari rencana agar menunggu mayoritas peserta masuk. Kegiatan dimulai dengan presentasi dari tim peneliti dalam memaparkan hasil penelitian serta tawaran pendekatan protokol dan modul selama 50 menit. Setelah presentasi penelitian, diberi kesempatan kepada Dr. Suwendi untuk memberikan tanggapan sekaligus memaparkan update kebijakan mengenai Rumah Moderasi Beragama. Dr. Suwendi menguatkan bahwa moderasi beragama masih menjadi prioritas dari Kementerian Agama, sebagai *leading sector* dan sedang dalam proses pembuatan peta jalan moderasi beragama. Selain itu Dr. Suwendi juga menginfokan mengenai sedang adanya pembahasan dalam internal Kementerian Agama mengenai SOP atau Juknis untuk operasional Rumah Moderasi Beragama. Dr. Suwendi sempat menampilkan draft juknis tersebut di sesinya dan menyatakan draft sedang dalam proses finalisasi di Kemenag.



Gambar 5. Proses Capacity Building Moderasi Beragama

Setelah sesi Dr. Suwendi, baru dilakukan diskusi atau tanya-jawab dengan peserta FGD lain yang merupakan ketua/pengurus rumah moderasi beragama. Karena durasi yang terbatas, tiap peserta dibatasi waktu sekitar 5 menit dalam bertanya atau menyatakan pendapat.

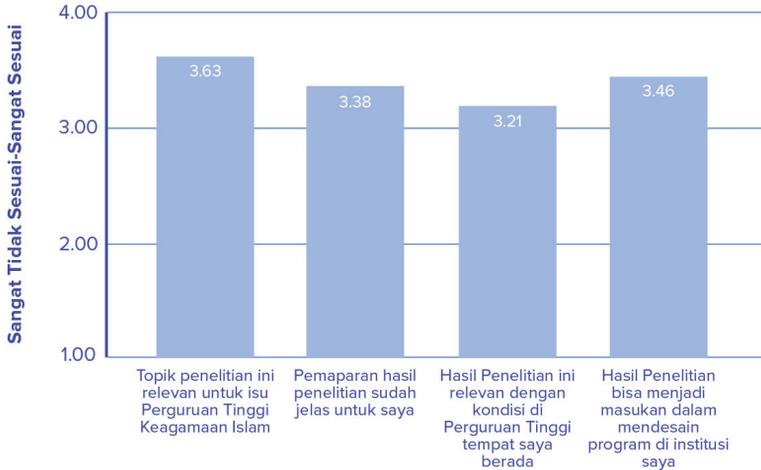
Ada sekitar 12 orang ketua/pengurus rumah moderasi beragama yang menyatakan pendapatnya, baik bertanya ataupun memberikan masukan yang dipandu oleh moderator. Selain menyatakan via lisan, fitur *chat zoom* juga bisa digunakan dalam menyatakan pendapat. Dalam menyatakan pendapat ini banyak juga peserta yang melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh rumah/institusi moderasi beragama di PTKI tempat dirinya berada. Dalam 15 menit terakhir, Dr. Arief Subhan, koordinator peneliti, menyimpulkan kegiatan dan membuka wacana pembangunan jejaring antar sesama rumah moderasi beragama. Selain itu, tim peneliti juga membagikan kuesioner yang mengukur hal-hal yang ingin ditanyakan terkait hasil penelitian, protokol dan modul. Setelah memastikan mayoritas peserta mengisi kuesioner, Dr. Arief Subhan meminta Dr. Suwendi untuk memberikan *closing statement*. Dalam *closing statement*nya, Dr. Suwendi mengapresiasi kegiatan ini lalu menginfokan jika dalam waktu dekat, Dirjen Diktis akan mengadakan acara yang mengundang seluruh rumah moderasi beragama di PTKI. Acara pun ditutup sekitar pukul 12.00 WIB.

Hasil dari *Capacity Building*

Hasil dari *Capacity Building* diolah dari pendapat yang disampaikan peserta dalam tanya jawab secara lisan, dari *chat zoom* dan juga kuesioner yang dibagikan. Ada beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut:

Hasil penelitian. Beberapa masukan mengenai hasil penelitian yang diterima adalah ada baiknya jika penelitian ini dilakukan juga kepada PTKIN yang terletak di pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Peserta berpendapat bahwa dengan hanya mengambil di 3 UIN yang menjadi target penelitian, ada bias tertentu yang memengaruhi hasil penelitian. Ada masukan juga dapat mengolah apakah ada perbedaan jika dosen berasal dari latar belakang pendidikan keagamaan atau umum, karena menurut beberapa peserta ada indikasi jika dosen dari latar belakang umum cenderung terpapar terhadap radikalisme/ekstremisme kekerasan. Yang terakhir adalah pengembangan konsep moderasi beragama yang lebih terintegrasi kembali serta penggunaan instrumen pengukuran yang sifatnya bukan hanya *self-report* tetapi lebih komprehensif. Beberapa juga menyatakan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan saat mereka membuat program terkait moderasi beragama.

Dari 24 data peserta yang mengisi kuesioner, peneliti membuat nilai rata-rata dari pernyataan yang terkait hasil penelitian dan diperoleh hasil sebagai berikut

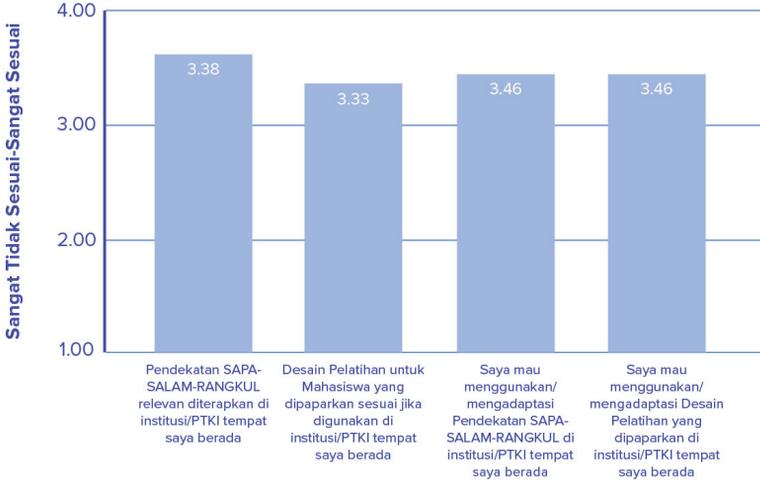


Gambar 6. Hasil Evaluasi terhadap hasil penelitian

Dari hasil di atas dengan skor 1 berarti sangat tidak sesuai dan skor 4 berarti sangat sesuai, nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap item yang menanyakan mengenai hasil penelitian berada dalam range skor 3,21 - 3,63. Dari skor rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi peserta. Dengan nilai skor rata-rata 3,63 menyatakan bahwa topik penelitian mengenai moderasi beragama dianggap relevan oleh peserta. Skor rata-ratanya menjadi turun ke 3,21 ketika ditanyakan terkait relevansi hasil penelitiannya namun dalam kategori skor masih bisa dianggap relevan. Penurunan ini bisa saja terjadi karena partisipan menganggap ada karakteristik yang beda antara UIN tempat dimana penelitian ini berada dan tempat PTKIN peserta berada sekarang. Peserta juga merasa bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dalam mendesain program di institusinya (nilai skor rata-rata 3,46).

Protokol dan Modul. Protokol dan Modul yang dibuat diapresiasi oleh Dr. Suwendi dan beberapa peserta FGD. Menurut Dr. Suwendi, Protokol SMR bisa diadaptasikan dan menjadi kewenangan pekerjaan Rumah Moderasi Beragama. Beberapa rumah moderasi beragama menyatakan bersedia untuk mengadaptasikan protokol dan modul yang dibuat ke dalam modul dan protokol yang sudah atau sedang

mereka rancang yang akan disesuaikan dengan konteks PTKIN tempat dirinya berada. Dari data kuesioner, juga diperoleh hal yang serupa, yang bisa dilihat pada diagram di bawah.



Gambar 7. Evaluasi terhadap Protokol dan Modul Pelatihan

Nilai Skor rata-rata dari tiap aitem pernyataan berada pada *range* skor 3,33-3,46 yang berarti rata-rata peserta menyatakan “sesuai” dalam menjawab pernyataan tiap aitem ini. Dengan skor rata-rata 3,46 pada aitem adaptasi protokol dan desain pelatihan dapat disimpulkan ada intensi peserta dalam untuk menggunakan protokol dan modul pelatihan yang telah dibuat.

Jejaring Rumah Moderasi Beragama. Kebutuhan jejaring rumah moderasi beragama juga diungkapkan dalam *capacity building* ini. Beberapa juga menyatakan adanya kebutuhan untuk berjejaring antar sesama rumah moderasi beragama. Beberapa komentar ini disampaikan juga via kolom *chat zoom*.

Setuju dengan usulan Pak Arief kerjasama RMB dengan instansi terkait di daerah masing-maing.

Mahrus As'ad (Direktur RMB IAIN Metro)

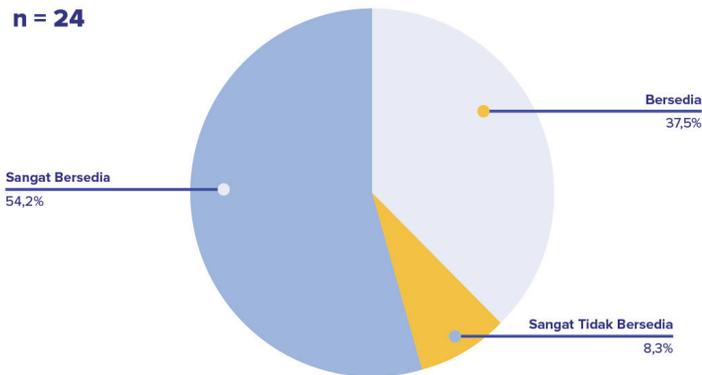
Sepakat dengan pak Arif harus adanya koordinasi dengan semua RMB se Indonesia

Dr.Muhammad,S.Th.I MA (Wakil Ketua RMB UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Alangkah bermanfaat bagi kita jika Forum atau Asosiasi Rumah Moderasi Agama dibuat, Adminnya Diktis, mengingat kita ini kademisi.

Husna Amin (Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Hal ini sesuai dengan pertanyaan di kuesioner yang menyatakan bahwa mayoritas bersedia bergabung dengan konsorsium jejaring rumah moderasi beragama (91% dari total partisipan yang mengisi kuesioner).



Gambar 8. Kesiadaan pengurus RMB dalam mengikuti jejaring/konsorsium RMB

Dalam kuesioner yang ditanyakan secara *open-ended*, banyak juga yang merespon positif adanya jejaring antar rumah moderasi beragama ini. Banyak yang menganggap jejaring ini bisa menjadi tempat untuk diskusi, *sharing* praktik baik atau pelatihan bagi pengurus rumah moderasi beragama. Saran yang lain adalah ada baiknya kegiatan ini diadakan berkala dan tidak berhenti hanya di pertemuan ini. Inisiasi jejaring dalam capacity building ini dan antusiasme peserta sejalan juga dengan rencana Dirjen Diktis Kemenag, dimana menurut Dr. Suwendi, dalam waktu dekat memang ada rencana Dirjen Diktis mengundang RMB yang sudah ada untuk berkoordinasi.

4.2 Technical Assistance

Desain Technical Assistance

Dengan pertimbangan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, *Technical Assistance* didesain dengan pendekatan daring kepada pengurus rumah moderasi beragama di UIN yang menjadi tempat penelitian. Tujuan dari *technical assistance* ini adalah menjelaskan secara lebih detail protokol SMR dan modul pelatihan moderasi beragama serta melatih beberapa sesi yang ada dalam modul pelatihan secara langsung. Adapun susunan kegiatan dalam *technical assistance* adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai pendekatan SMR
2. Penjelasan mengenai Pendekatan Pelatihan
3. Diskusi mengenai pendekatan SMR dan Pelatihan
4. Penjelasan dan Praktik Sesi dalam Modul Pelatihan
5. Diskusi dan Tanya-Jawab mengenai modul

Technical Assistance menargetkan ketua dan pengurus rumah/institusi moderasi beragama. Di UIN Syarif Hidayatullah, pembentukan pengurus masih belum dilakukan sehingga, Ketua Rumah Moderasi Beragama menunjuk beberapa dosen yang dianggap relevan mengikuti pelatihan ini. Desain *technical assistance* menggunakan pengukuran *post-test* dengan menyebarkan kuesioner di akhir kegiatan *technical assistance*. Penyebaran kuesioner ini juga sebagai prinsip monitoring dan evaluasi yang ada dalam Protokol SMR. Adapun hal yang ditanyakan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Indikator Evaluasi Technical Assistance

No	Perihal	Aitem	Respon
1.	Materi	Materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan saya	Sangat Tidak Sesuai (1) - Sangat Sesuai (4)
		Materi yang diberikan bermanfaat untuk tugas saya di Rumah/Institusi Moderasi Beragama	
		Saya akan menerapkan materi yang diberikan dalam institusi saya	
		Saran untuk materi pelatihan	Open Ended

2.	Fasilitator	Fasilitator jelas dalam menyampaikan materi	Sangat Tidak Sesuai (1) - Sangat Sesuai (4)
		Fasilitator menguasai materi yang disampaikan	
		Saya merasa puas dengan jawaban yang diberikan fasilitator ketika saya/peserta lain bertanya	
		Saran untuk fasilitator pelatihan	<i>Open-Ended</i>
3.	Proses Pelatihan	Pelatihan Berjalan Kondusif	Sangat Tidak Sesuai (1) - Sangat Sesuai (4)
		Saya merasa senang dengan proses pelatihan	
		Saran untuk proses pelatihan	<i>Open-Ended</i>

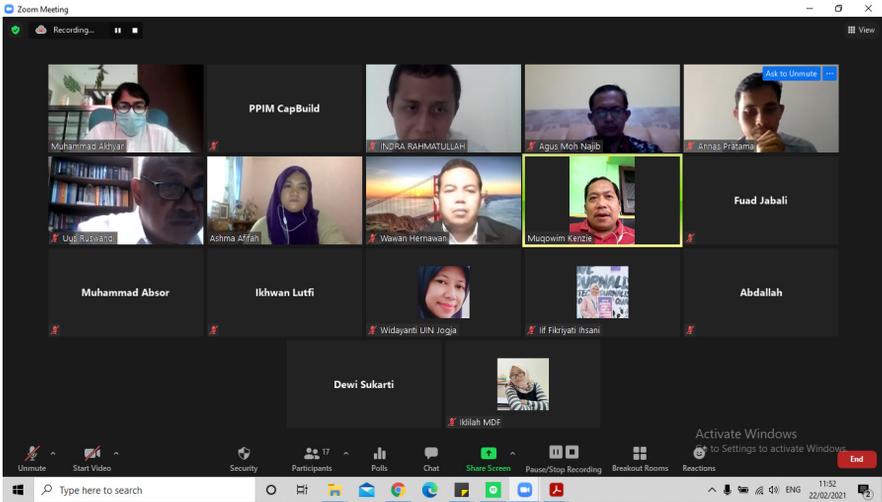
Pelaksanaan *Technical Assistance*

Kegiatan *technical assistance* diadakan pada Senin, 22 Februari 2021 secara daring menggunakan aplikasi *zoom-meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh 9 orang ketua dan pengurus rumah moderasi beragama dengan detail per PTKIN sebagai berikut:

Tabel 24. Peserta *Technical Assistance*

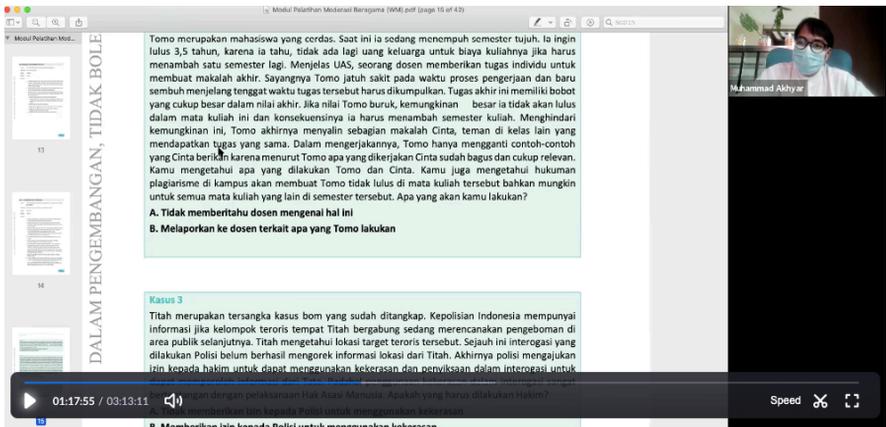
	P	L	Jumlah Peserta
UIN Syarif Hidayatullah	1	2	3
UIN Sunan Gunung Djati	0	2	2
UIN Sunan Kalijaga	1	3	4
Total	2	7	9

Kegiatan *technical assistance* diawali dengan pembukaan lalu langsung ke Fasilitator, yaitu Muhammad Akhyar, M.Si., yang juga merupakan anggota dari tim peneliti, dalam menyampaikan pendekatan SAPA-SALAM-RANGKUL yang ada dalam protokol. Dalam menyampaikan ini digunakan metode ceramah sehingga fasilitator menyampaikan secara satu arah. Dalam sesi ini sempat ada gangguan internet yang dialami fasilitator sehingga acara sempat terjeda 5-7 menit menunggu sinyal internet fasilitator kembali lancar. Setelah protokol SAPA-SALAM-RANGKUL dijelaskan, dibuka sesi tanya jawab dalam mengupas protokol ini.



Gambar 9. Peserta Technical Assistance

Setelah sesi tanya jawab selesai, *technical assistance* masuk ke dalam sesi ke-2 yaitu pembahasan dan praktik sesi dalam modul pelatihan. Sebelum masuk ke modul pelatihan, dilakukan sesi *energizing* dengan mempraktikkan sesi *ice breaking* yang ada dalam modul pelatihan dengan menggambar dengan mata tertutup dengan mengikuti instruksi dari fasilitator. Instruksi fasilitator mengarahkan peserta menggambar orang/manusia. Setelah selesai instruksi, peserta diminta menunjukkan hasil gambarnya yang memang tidak akan berbentuk secara baik. Peserta kemudian diminta berefleksi. Setelah sesi menggambar dengan mata tertutup, peserta diminta untuk kembali menggambar dengan mata terbuka sesuai dengan instruksi fasilitator. Di gambar kedua ini, fasilitator mengarahkan peserta menggambar kucing tanpa diberitahu terlebih dahulu, sehingga peserta masih terpaku menggambar manusia. Setelah sesi menggambar dengan mata terbuka ini, peserta kemudian diminta berefleksi dimana pentingnya instruksi dan peran fasilitator dalam memberikan instruksi dalam pelatihan.



Gambar 10. Fasilitator menjelaskan skenario kasus yang ada pada sesi 1

Setelah sesi *energizer* ini, Fasilitator menjelaskan mengenai pendekatan moderasi beragama sebagai *social skills* kepada peserta. Moderasi beragama sebagai *social skills* merujuk bagaimana moderasi beragama bisa membantu individu, dalam hal ini mahasiswa untuk bisa berinteraksi dalam kehidupan sosial yang berisi orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Fasilitator pun menjelaskan tujuan dari pelatihan ini kepada peserta. Selain tujuan, Fasilitator juga menekankan digunakannya prinsip pembelajaran “Andragogi” dan “Daur Belajar Kolb” dalam proses pelatihan yang dipakai sehingga keaktifan peserta pelatihan menjadi kunci dalam pelatihan ini. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengalaman dan *prior knowledge* yang dipunya peserta serta juga daya refleksi dan mengambil kesimpulan yang dipunya dalam peserta. Dalam pelatihan ini, jika satu peserta sudah mendapat *insight* dan dibagikan dalam kelas, maka peserta lain juga turut belajar. Sehingga peran fasilitator hanya memfasilitasi proses belajar tersebut.

Setelah menjelaskan pendekatan, baru Fasilitator *Technical Assistance* menjelaskan modul pelatihan dengan cara menjelaskan tujuan per sesi, tahapan dalam tiap sesi serta jika di sesi tersebut dibutuhkan lembar kegiatan, skenario kasus, *vignette* atau cerita *role-play*, maka hal tersebut akan dijelaskan oleh Fasilitator. Berikut penjelasan ringkas per sesi.

1. Sesi Kegiatan Harapan dan Kontrak Belajar. Dalam sesi ini yang ditekankan adalah adanya aturan yang berasal dari peserta dan

disepakati bersama, serta sinkronisasi harapan dan keresahan yang dialami peserta agar fokus menjalani pelatihan.

2. Sesi Beragam sudut pandang. Sesi ini merupakan sesi pemicu dimana peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mendengarkan dan menghormati pendapat yang berbeda. Di sesi ini peserta mendiskusikan cerita yang mengandung dilema moral untuk diambil keputusan berdasarkan *reasoning*-nya. Ada dua sesi diskusi, dimana sesi diskusi pertama, peserta dengan bebas memilih pilihan dan membangun argumen dan di sesi kedua, pilihannya sudah ditentukan oleh fasilitator dan peserta harus membangun argumen dari itu. Di sesi ini tujuan yang sebenarnya bukanlah argumen mana yang benar, tetapi proses mana yang lebih sulit saat pembangunan argumentasi keputusan, apakah saat pilihan sendiri atau dipikirkan orang lain. Di sini juga peserta diharapkan menyadari adanya bias jika kita didorong oleh pilihan sendiri sehingga dari sesi ini, dia bisa mulai terpicu untuk mulai mendengarkan alasan orang lain dan menghargai pendapatnya.
3. Sesi Kamu adalah aku. Sesi ini merupakan sesi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman empati kepada peserta pelatihan. Dalam menjelaskan ini peserta *technical assistance* mempraktikkan sesi ini dengan mengisi Lembar Kegiatan A yang menjawab pertanyaan ketika membayangkan dirinya. Lalu setelah selesai, peserta diminta mengisi Lembar Kegiatan B dimana peserta diminta menjawab pertanyaan yang sama, namun dengan membayangkan orang yang telah ditunjuk oleh fasilitator. Lalu setelah selesai, peserta diminta membandingkan jawaban yang sama antara lembar A dan lembar B, diberikan skor 1. Peserta *technical assistance* diminta *sharing* di kolom chat berapa skor dari persamaan tersebut. Skor ini menunjukkan jika semakin tinggi, peserta membayangkan jawaban orang tersebut (jawaban di lembar B) dengan merujuk kepada dirinya (jawaban di lembar A), padahal maksud dari empati bukanlah itu, karena empati poinnya berusaha memahami orang lain dari sudut pandang dirinya. Kegiatan ini merupakan pembuka dalam mengenal empati.
4. Sesi Mengenal Diri melalui Orang lain. Dalam sesi ini, fasilitator menjelaskan gambaran kegiatan dimana peserta pelatihan dibagi ke dalam berpasangan diminta untuk menggali pengalaman peserta pelatihan yang paling dikenang terkait dengan perilaku

menganggap orang lain setara dan apa yang dirasakan. Hasil dari sharing ini akan didiskusikan dalam kelompok besar kemudian akan dipresentasikan dalam kelas. Di sesi ini dengan menceritakan pengalaman masing-masing, peserta mengafirmasi kembali bahwa dirinya adalah pribadi yang empatik sehingga diharapkan dapat juga memunculkan perilaku yang empatik di masa depan.

5. Sesi Ketidaktahuan sebagai Awal Ketakutan. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini adalah mengganti persepsi kelompok terkait batas antar kelompok dan mengubah asosiasi negatif (stereotip) pada *outgroup*. Fasilitator kemudian menjelaskan tiga *vignette* yang diberikan dalam sesi ini dan menanyakan dari ketiga *vignette* tersebut, perilaku mana yang paling mereka bisa terima. Dalam menanyakan alasan, fasilitator juga menggali alasan yang disebutkan peserta dikaitkan dengan asosiasi individu terhadap kelompok keagamaan atau etnik tertentu. Sesi ini diakhiri dengan mendiskusikan *counter-asosiasi* dari *outgroup* dan berdiskusi mengapa membuat *counter-asosiasi* itu sulit.
6. Sesi Jika Aku Menjadi. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini adalah sesi bermain peran dua babak, dimana peserta pelatihan dibagi dua dan berperan menjadi pemeluk agama non-muslim dan muslim yang berada dalam desa yang sedang konflik karena pembangunan gereja. Peserta dalam kelompoknya diminta untuk membangun argumen, mengapa gereja boleh atau tidak boleh dibangun yang kemudian akan didiskusikan lewat forum Desa yang difasilitasi oleh fasilitator yang berperan sebagai Kepala Desa. Setelah dianggap diskusi cukup, peserta langsung masuk ke dalam sesi *roleplay* kedua dan ditukar perannya dimana peserta yang berperan menjadi muslim diberikan peran sebagai pemeluk Ahmadiyah sedangkan yang menjadi non-muslim diberikan peran sebagai muslim di bagian *roleplay* yang kedua. Konflik yang didiskusikan adalah pembangunan Masjid Ahmadiyah. Setelah sesi bermain peran ini, fasilitator menjelaskan pentingnya sesi refleksi bagaimana perasaan ketika *roleplay* dan saat dibalik dan pengambilan *perspective* untuk kelompok minoritas.
7. Sesi Selamatkan Dirimu!. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini menekankan pentingnya kerja sama atau kolaborasi dalam menyelesaikan masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan

yang dicapai dengan mendiskusikan kasus yang diberikan. Di sini fasilitator menjelaskan bagaimana kasus dan penyelesaian masalah yang diharapkan dan bagaimana peserta *technical assistance* yang nanti menjadi fasilitator dapat memakai panduan yang diberikan untuk skoring dan menjelaskan makna skor tersebut ke dalam makna kolaborasi/kerja sama.

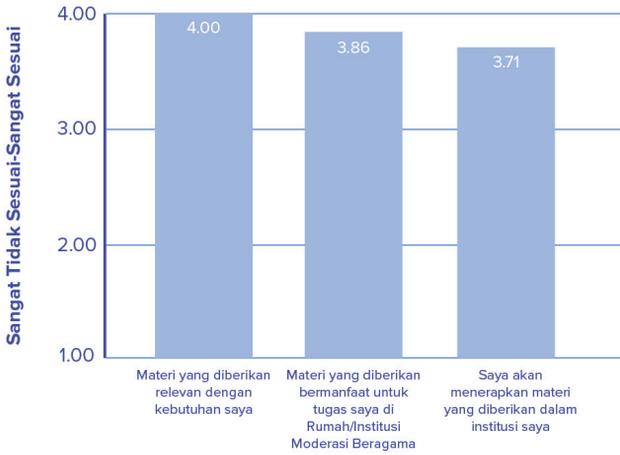
8. Sesi Kegiatan Penutup “Refleksi dan Rencana Aksi”. Fasilitator hanya menjelaskan singkat pada bagian ini, yang bertujuan sebagai konsolidasi bagi peserta pelatihan yang merupakan pengurus organisasi dalam membuat rencana program yang dapat mengandung tema moderasi beragama. Rencana program ini yang dapat *difollow up* oleh pihak rumah moderasi beragama dalam mengukur *impact* dari program pelatihan ini.

Kegiatan *technical assistance* dilakukan dari jam 09.00-12.00 WIB. Ada 2-3 orang partisipan yang tidak mengikuti secara *full* dari awal karena alasan tertentu, namun di akhir acara, semua partisipan sudah memberikan komentar baik dalam proses maupun di akhir kegiatan *technical assistance*.

Hasil dari *Technical Assistance*

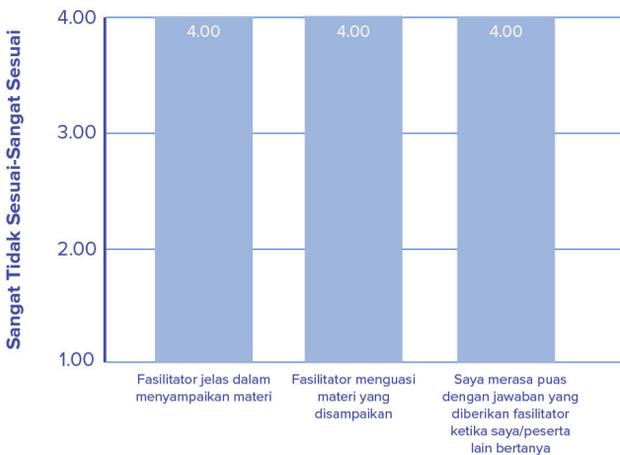
Dalam mengukur evaluasi dari *technical assistance*, tim peneliti menyebarkan kuesioner di akhir kegiatan. Dari sembilan orang peserta *technical assistance*, hanya tujuh orang yang mengisi kuesioner evaluasi. Data dari ketujuh orang ini yang diolah dalam mengevaluasi pelaksanaan *technical assistance*.

Materi *Technical Assistance*. Dengan nilai skor rata-rata jatuh dalam rentang 3,71-4,00 dimana 1 berarti sangat tidak sesuai dan 4 sangat sesuai, dalam mengevaluasi relevansi, kebermanfaatan dan intensi untuk memakai modul pelatihan dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari peserta *technical assistance* positif terhadap materi yang ada dalam modul ini. Nilai skor rata-rata 3,71 dalam rencana mengadaptasi/menggunakan modul menyatakan bahwa partisipan yang mengikuti *technical assistance* sudah ada intensi dalam menggunakan modul pelatihan ini di PTKINnya. Beberapa masukan dari materi pelatihan adalah adanya kebutuhan bagi peserta mendapatkan materi pengayaan lain dan penjabaran pesan penting yang ingin didapatkan di tiap sesi.



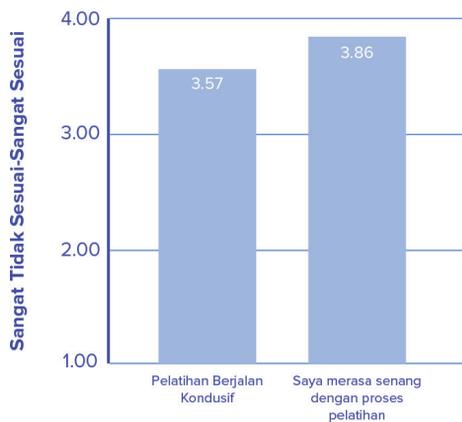
Gambar 11. Evaluasi terkait materi pelatihan

Fasilitator Pelatihan. Evaluasi peserta *technical assistance* sangat positif terkait fasilitator pelatihan karena nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,00 untuk semua aitem yang menandakan bahwa peserta puas dengan cara fasilitator menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan. Selain itu, peserta juga mempersepsikan jika fasilitator menguasai materi yang disampaikan.



Gambar 12. Evaluasi terhadap fasilitator *Technical Assistance*

Proses Pelatihan. Hanya dua hal yang ditanyakan terkait proses pelatihan yaitu kondusifitas proses dan rasa senang/nyaman dengan proses pelatihan. Nilai skor rata-rata keduanya adalah 3,57 dan 3,86 sehingga dapat diasumsikan jika peserta merasakan kedua hal ini selama proses *technical assistance*. Walau saat *open-ended* banyak masukan terkait durasi waktu yang terlalu singkat sehingga peserta merasa waktu untuk memahami tujuan pelatihan terbatas dan beberapa sesi yang bisa dipraktikkan menjadi tidak dipraktikkan. Beberapa peserta juga menyarankan bentuk *offline* atau luring dalam *technical assistance* ini agar bisa lebih efektif.



Gambar 13. Evaluasi mengenai proses pelatihan

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian proses penelitian terhadap tiga PTKIN target, peneliti menarik kesimpulan dari tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan sikap dan perilaku moderasi beragama di tiga PTKIN target, dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang meliputi (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal secara psikometrik dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi opini pro *violent-extremism*/radikalisme, sehingga dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai alat untuk menilai resiliensi dan kerentanan dalam mengukur moderasi beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan hampir semua faktor dari variabel moderasi beragama mampu memprediksi opini pro VE/radikalisme, walau arah dari pediksinya tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal.
2. Secara regresi prediksi antara variabel dengan opini pro VE/radikalisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada indikator toleransi, variabel empati eksternal yakni variabel yang menggambarkan empati terhadap agama lain $b = -.27$, $t(821) = -5.59$, $p < .0001$, variabel penolakan internal sebagai variabel persetujuan atas aliran lain di dalam satu agama ($b = .16$, $t(821) = 4.80$, $p < .0001$) dan variabel *social dominant orientation* (SDO) sebagai variabel perujuk mayoritas-minoritas, menunjukkan regresi yang signifikan dengan opini pro VE/radikalisme ($b = .20$,

$t(821) = 3.71, p = .0002$). Indikator komitmen kebangsaan melalui variabel kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, baik pusat, daerah dan juga penegakan hukum ($b = -.13, t(821) = -3.56, p = .0004$.) serta intensi terlibat dalam politik praktis ($b = .17, t(821) = 4.97, p < .0001$), dan aktivisme ($b = .24, t(821) = 3.48, p = .0005$) mampu berorientasi signifikan terhadap opini pro VE/radikalisme.

3. Berdasarkan asesmen psikometrik terhadap variabel moderasi beragama ditemukan tingkat kerentanan yang cukup signifikan utamanya pada indikator toleransi yang dalam hal ini ditandai oleh ekskalasi empati internal dan eksternal yang rendah. Hal ini tampak memperjelas asumsi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang mengisyaratkan meningkatnya pemahaman radikal di kalangan civitas akademika perguruan tinggi. Civitas termasuk di dalamnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada empati eksternal, kerentanan spesifiknya ditemukan di faktor pengambilan perspektif ($M = 3.14, SD = .86, CI = 3.09 - 3.20$), dan pada empati internal ditemukan di faktor penolakan ($M = 3.67, SD = .97, CI = 3.61 - 3.74$), walaupun empati umum, yang tidak signifikan memprediksi opini pro ekstremisme kekerasan, juga rentan ($M = 2.92, SD = .89, CI = 2.86 - 2.98$)
4. Meskipun tidak tampak secara signifikan sebagai faktor resiliensi, variabel pada aktivisme, khususnya keterlibatan dalam mengikuti organisasi ekstra mahasiswa secara eksplisit tampaknya cukup banyak mempengaruhi melemahnya opini pro-VE/radikalisme dan meningkatkan daya moderasi beragama. Namun karena variabel ini tidak sesuai dengan asumsi awal terkait dengan faktor tarik dan dorong dalam radikalisme dan ekstremisme kekerasan, variabel ini diputuskan untuk tidak dijadikan tolak ukur resiliensi dan kerentanan.

Kedua, terkait dengan implementasi moderasi beragama di tiga PTKIN target, disimpulkan berikut:

1. Sebagai sebuah konsep, definisi moderasi beragama telah diterima, diakui dan dirasakan kebutuhannya oleh tiga PTKIN target. Ketiga Perguruan Tinggi telah menjadikan moderasi beragama sebagai tema program dan kegiatan. Hampir dalam setiap program yang diselenggarakan oleh unit-unit di lingkungan PTKIN kesemuanya menggunakan tema moderasi beragama. Namun demikian, penggunaan tema masih terbatas

pada kampanye moderasi beragama dan belum inheren ke dalam program dan kegiatan itu sendiri.

2. Belum ada operasionalisasi kerja baik secara regulasi, struktur maupun kewenangan dalam menurunkan konsep moderasi beragama ke dalam implementasi yang sistematis. Dalam pendidikan dan pengajaran, moderasi beragama masih sebatas wacana, belum ada standar prosedur operasionalisasi baku baik pada materi kuliah, metodologi pengajaran dan sumber daya tenaga pengajar. Dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, moderasi beragama masih terbatas sebagai isu, belum menjadi instrumen praktikal baik monitoring maupun evaluatif.
3. Rumah Moderasi Beragama sebagai unit agen pelaksana kebijakan pun belum beroperasi maksimal. Selain karena usia pendiriannya yang masih relatif muda, keterbatasan ruang pembiayaan karena bukan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan perguruan tinggi menjadi salah satu aspek hambatan. Fungsionalisasi Rumah Moderasi Beragama dipandang penting oleh tiga Perguruan Tinggi sebagai upaya mempersiapkan metodologi implementasi dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama di PTKI.

Moderasi beragama dengan demikian, berdasarkan penelitian ini mengindikasikan bahwa di tiga PTKIN sifatnya masih terbatas sebagai wacana dan isu, belum melekat secara kelembagaan. Hal ini membutuhkan upaya asistensi, intervensi dari berbagai pihak, kegiatan *capacity building* yang juga menjadi bagian dari langkah lain pada penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yang dirangkum dari kegiatan bersama 3 Rumah Moderasi Beragama sebagai agen pelaksana moderasi beragama di 3 PTKIN, yakni:

1. Penguatan kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang dijawantahkan melalui regulasi struktur dan tata kerja sebagai konsekuensi pembiayaan dan penganggaran pada program dan kegiatan yang hendak diinisiasi oleh Rumah Moderasi Beragama.
2. Jejaring Rumah Moderasi Beragama antar PTKIN sebagai bagian dari konsolidasi serta kesamaan persepsi dan pelaksanaan program. Ini mutlak dilakukan, karena setiap Rumah Moderasi Beragama peran utamanya tidak hanya terletak pada membangun civitas akademika tetapi juga menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitar kampus itu sendiri.

3. *Capacity Building* bagi aparaturnya pelaksana kerja di Rumah Moderasi Beragama yang disertai pula dengan modul, model serta kapasitas organisasi sumber daya, sehingga Rumah Moderasi Beragama mampu dan siap menginternalisasi dan menginternalisasi seluruh konsep moderasi beragama ke dalam setiap unsur tri dharma perguruan tinggi.

5.2 Rekomendasi

Untuk itu diperlukan beberapa langkah rekomendasi, pertama ditunjukkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Agama sebagai pengampu otoritas kebijakan pada PTKIN, yakni:

1. Regulasi Struktur Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang jika dimungkinkan menjadi bagian terpadu dalam Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Perguruan Tinggi, jika tidak dimungkinkan mengingat agenda penyederhanaan birokrasi, mungkin dapat dibuat regulasi khusus advokasi struktur dimana program dan kegiatan turunan moderasi beragama dilembagakan ke dalam satu mata kuliah tertentu dan atau kegiatan pelatihan bersertifikat sebagai syarat kompetensi dalam SKPI;
2. Indeks pengukuran terpadu sebagai alat evaluasi moderasi beragama di PTKIN, hal ini dapat menjadi alat deteksi dini kerentanan dan ketahanan moderasi beragama di masing-masing perguruan tinggi, sehingga PTKIN sebagai simpul Islam wasathiyah dapat terus terjaga eksistensinya;
3. Panduan/SOP bagi rumah moderasi dalam menjelaskan cakupan tugas dan fungsinya, baik dalam PTKIN itu sendiri maupun ke dalam masyarakat.

Kedua, rekomendasi bagi PTKIN atau dalam hal ini Rumah atau Institusi moderasi beragama sebagai agen pelaksana moderasi beragama di PTKIN, sebagai berikut:

1. Pembuatan modul dasar bagi masing-masing Rumah Moderasi Beragama dalam mengembangkan bidang cakupannya yang terdiri dari

- a. Modul Pendidikan dan Pelatihan; yang menjadi basis bagi para dosen dalam menyisipkan tema/nilai moderasi beragama dalam pembelajaran maupun pelatihan moderasi beragama di kalangan dosen atau mahasiswa
 - b. Model Kajian dan Penelitian yang menjadi panduan civitas academica dalam mengadakan penelitian mengenai moderasi beragama
 - c. Sosialisasi serta advokasi dan pendampingan masyarakat; yang menjadi panduan civitas academica untuk mensosialisasikan moderasi beragama di luar PTKIN.
2. Memasukkan agenda moderasi beragama dalam rencana kerja terintegrasi di PTKIN yang dikawal dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, baik ditujukan untuk mengetahui dan memantau performa civitas academica terkait moderasi beragama maupun untuk mengawasi jalannya mainstreaming moderasi beragama di PTKIN;

Referensi

- Abdillah, M. (2015, 9 Februari). Meneguhkan Moderasi Beragama. *Kompas*. Diakses pada <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325>
- Abdullah, M. (2019). Argumen pengarusutamaan budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam proyek moderasi beragama di Indonesia. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Bennett, M. (2017) Development model of intercultural sensitivity. Dalam Kim, Y (Ed). *International encyclopedia of intercultural communication*. Wiley
- Blasko, Z., Dinis da Costa, P., & Vera-Toscano, E. (2018). *Civic attitudes and behavioural intentions among 14-year-olds. How can education make a difference towards a more democratic and cohesive Europe?* <https://doi.org/10.2760/257872>
- Botticher, A. (2017). Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. *Perspective On Terrorism*, 11(4), 73-77
- Broer, N.A., Munyck, B., Potgieter, F.J. (2019). On Measuring Religious Tolerance in Education. *Conference Paper*.
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160.
- Decety, J., & Jackson, P.L. (2004). The Functional Architecture of Human Empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience*, 3 (2), 71-100
- Donlagic, S., & Fazlic, S. (2015). *Quality assessment in higher education using the SERVQUAL model*, 40-57

- Elliott, R., Bohart, A.C., Watson, J.C., & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Dalam J. Norcross (ed.), *Psychotherapy relationships that work* (2nd ed.) (pp. 132-152). New York: Oxford University Press.
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 491–512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>
- Grossman, M., Hadfield, K., Jefferies, P., Gerrand, V., & Ungar, M. (2020). Youth Resilience to Violent Extremism: Development and Validation of the BRAVE Measure. *Terrorism and Political Violence*, 00(00), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1705283>
- Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism. *Studiens in Conflict & Terrorism*, 38(11), 958-975
- Ho, A.K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffin, J., Pratto, F., Henkel, K.E., Foels, R., Stewart, A.L. (2015). The Nature of Social Dominance Orientation: Theorizing and Measuring Preferences for Intergroup Inequality Using the New SDO7 Scale. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2015, Vol. 109, No. 6, 1003–1028
- Kamali, M.,H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. New York: Oxford University Press.
- Kampusiana. (2020, 21 Desember). 57 Dosen Muda UIN Bandung Ikuti Pelatihan Wahyu Memandu Ilmu Dan Moderasi Beragama. *Kampusiana.net*. Diakses pada <https://kampusiana.net/57-dosen-muda-uin-bandung-ikuti-pelatihan-wahyu-memandu-ilmu-dan-moderasi-beragama/>
- Manning, T.M. (2016). *Institutional Capacity Assessment Tools: Alignment to Accreditation*. Diakses pada https://www.achievingthedream.org/sites/default/files/news/institutional_capacity_assessment_tool_-_alignment_to_accreditation.pdf
- Mirahmadi, H. (2016). Building Resilience against Violent Extremism: A Community-Based Approach. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 668(1), 129–144. <https://doi.org/10.1177/0002716216671303>

- Mujahidin, A. (2019). Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTkl. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Mukri, M. (2019). Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Nizar, S. (2019). Moderasi Agama: Memperkuat fungsi kekhalfahan dalam budaya global. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Pope, R., & Reynolds, A. (1997). Student Affairs Core Competencies: Integrating Multicultural Awareness, Knowledge and Skills. *Journal of College Student*, 38 (3), 267-277
- Pratto, Felicia, James Sidanius, Lisa M. Stallworth, and Bertram F. Malle. 1994. Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology* 67, no. 4: 741-763.
- Saidurrahman, T.G.S., (2019). Penguatan moderasi Islam Indonesia dan Peran PKTIN. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Saputra, R. E. (2018a). Api dalam Sekam : Keberagamaan Generasi Z, 1(1).
- Saputra, R. E. (2018b). Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam, 1(8).
- Suharto, B. (2019). Moderasi Beragama dan Masa Depan Tradisi Keilmuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- UIN SGD. (2020, 18 November). RMB UIN Bandung Susun Modul Moderasi Beragama. *Uinsgd.ac.id*. Diakses pada <https://uinsgd.ac.id/rmb-uin-bandung-susun-modul-moderasi-beragama/>
- UIN SUKA. (2020, 30 September). Kemenag Sambut Mahasiswa Baru Dalam PBAK UIN Sunan Kalijaga 2020. *Uin-suka.ac.id*. Diakses pada <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/574/kemenag-sambut-mahasiswa-baru-dalam-pbak-uin-sunan-kalijaga-2020>
- UIN SUKA. (2020, 8 November). BPIP-PSPBN UIN Sunan Kalijaga Akan Menerbitkan Buku Pancasila Perspektif Lintas Iman. *Uin-suka*.

ac.id. Diakses pada <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/585/bpip%20pspbu-uin-sunan-kalijaga-akan-menerbitkan%20buku-pancasila-perspektif-lintas-iman>

UIN SUKA. (2020, 11 Desember). UIN Suka Selenggarakan Workshop Moderasi Beragama Seri 1. *Uin-suka.ac.id*. Diakses pada <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/617/uin%20suka-selenggarakan-workshop-moderasi%20beragama-seri-1>

Ushuluddin UIN SUKA. (2020, 28 November). CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga Mengadakan Webinar Nasional Sebagai Upaya Menyiarkan Islam Moderat. *Ushuluddin.uin-suka.ac.id*. Diakses di <http://ushuluddin.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2512/cssmora-uin-sunan-kalijaga-mengadakan-webinar-nasional-sebagai-upaya-menyiarkan-islam-moderat>

Walker, J. S. (2005). The Maudsley Violence Questionnaire: Initial validation and reliability. *Personality and Individual Differences*, 38(1), 187–201. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.04.001>

Wang, Y.W., Davidson, M.M., Yakushko, O.F., Savoy, H.B., Tan, J.A., & Bleier, J.K. (2003). The Scale of Ethnocultural Empathy: Development, Validation and Reliability. *Journal of Counseling Psychology*, 50 (2), 221-234



**Empowering Educational Actors and Institutions
to Promote Religious Moderation in Preventing Violent Extremism**

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Indonesia
Tel.: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com |
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:

